

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK BUMIDAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh

**ALFISHARI
E.11.16.125**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh

ALFISHARI

E.11.16.125

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan Telah
Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal**

Gorontalo, 20 Mei 2020

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Ariawan, S.Psi., SE., MM
NIDN : 09 220575 02

Pembimbing II



Afriana Latungio, SE, M.Ak
NIDN : 0929049203

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

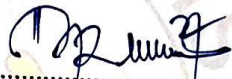

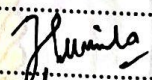
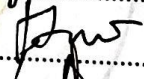
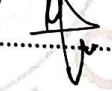
Oleh

ALFISHARI
E.11.16.125

Telah Memenuhi syarat dan dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Gorontalo, Sabtu 18 Juli 2020

Komisi Penguji :

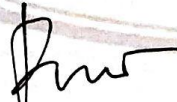
1. DR. Darmawati Bahruddin, SE., M.Si
2. DR. BalaBakri, SE., MM
3. Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak
4. DR. Ariawan, S.Psi., SE., MM
5. Afriana Lamagio, SE, M.Ak


.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Ariawan, S.Psi., SE., MM
NIDN : 0922057502


Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
NIDN : 0914027902

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ischsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan tanpa ada bantuan pihak lain, Kecuali arahan dari Tim Pembimbing Pembimbing .
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan ke dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 20 April 2020
Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
C:7ACAHF55906985
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ALFISHARI
NIM. E11.16.125

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATANPENDAPATANDAERAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA”**, sesuai dengan yang di rencanakan,. Skripsi ini di buat utuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

Bapak Mohammad Ichsan Gaffar, S.E.,Ak.,C.Sr/C.PA.CPAi Selaku KetuaYayasan,Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke. M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.Ibu Rahma Rizal, SE,Ak.,M.si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.Bapak Dr. Ariawan, S.Psi.,SE.,MM,Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini.Ibu Afriana Lamagio,SE,M.Ak, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan Skripsi ini. Serta kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan.Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam menerjakan Skripsi ini.Penulis ucapan terimakasih kepada kedua orang tua yaitu Bapak Agus Nusi Dan Ibu saya Tercinta Sugiarti dan keluarga yang telah membantu/mendukung penulis.Terahir penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada “Alif Riskiansyah” seseorang yang telah memberikan kekuatan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil skripsi ini dapat di terima dan bermanfaat bagi bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 20 April2020

ALFISHARI
NIM. E11.16.125

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dalam peningkatan pendapatan daerah, serta untuk mengetahui tingkat efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam Penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kuantitatif deskriptif dengan melampirkan laporan keuangan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian ditinjau dari Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) pada Kabupaten Gorontalo Utara di kategorikan efektif apabila Rasio ini mencapai 100%. secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2013 hanya mencapai 66% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Sedangkan dalam kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2019 berada pada kategori efektif. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan selama tahun 2014 sampai dengan 2018 namun kenaikannya tidak terlalu besar.

Kemudian Pada tingkatan efisien dari tahun 2015 sampai dengan 2019 termasuk dalam kategori sangat efisien dan efisien di karenakan penggunaan biaya pemungutan di gunakan dengan baik.

Kata Kunci : Efektivitas PBB, Efisiensi PBB.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Maka sesungguhnya Bersama kesulitan dan kemudahan.sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk Urusan yang lain).dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."(QS.Al-Insyirah,6-8)

Di awali dengan Bismillah

Dijalani dengan Wasyukurillah

Dan di akhiri dengan Alhamdulillah

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan Untuk ke dua orang tua saya yang sangat saya cintai yaitu Ibunda Sugiarti Dan Bapak Agus Nusi yang telah memberi kekuatan kepada saya dalam situasi apapun. walaupun mereka jauh dari pandangan saya tapi mereka tidak pernah lupa untuk menasehati dan menguatkan saya saat saya merasa terpuruk dan tertekan, terutama kepada ibu saya "Ibu Sugiarti" seorang wanita terhebat yang pernah saya kenal dalam hidup saya yang telah menjadikan saya sebagai wanita yang tegar dalam menghadapi rintangan seperti apapun itu.

Kemudian saya berterima kasih kepada semua teman dan rekan seperjuangan karna dari awal hingga ujian Skripsi ini kita masih Bersama. Semoga kita bisa bersama seperti ini terus hingga toga terpakai di tubuh kita masing-masing.

Dan yang Terakhir saya berterima kasih kepada orang special yang sudah menemani saya dari awal kuliah hingga saya berada pada step ini.Yaitu, "Firmansyah Mamu" orang yang mau menemani saya pada kondisi apa pun dan dimanapun, Terima kasih atas perjuanganmu selama ini dan memberikan kekuatan kepada saya di saat saya jatuh/Putus asa akan drama di balik semua ini, Semoga perjuangan kita selama ini biasa beujung dengan sesuatu yang kita impikan dan doakan bersama.Aminnn....!!!

*Once again, thank you to all of you who played a role in this story
of my life*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1Latar Belakang Penelitian	1
1.2Rumusan Masaalah	12
1.3Maksud dan Tujuan Penelitian.....	13
1.4.1 Maksud Penelitian	13
1.4.2Tujuan Penelitian	13
1.4Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2Manfaat Praktis.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1Kajian Pustaka	15
2.1.1 Otonomi Daerah.....	15

2.1.2 Pengertian Analisis	17
2.1.3 Pengertian Evektivitas	17
2.1.4 Pengertian Efisiensi	18
2.1.5 Pengertian Pajak.....	19
2.1.5.1Ciri-ciri Pajak	20
2.1.5.2 Fungsi Pajak	21
2.1.5.3 Tarif Pajak.....	22
2.1.5.4Sistem Pemungutan Pajak	22
2.1.5.5 Wajib Pajak	23
2.1.5.6 Hak Wajib Pajak	24
2.1.5.7 Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.1.5.8 Tata cara Pemungutan Pajak	25
2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	27
2.3 Pengertian Pajak Daerah	28
2.4 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan.....	29
2.4.1 Asas Pajak Bumi Dan Bangunan.....	29
2.4.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	30
2.4.3 Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan	31
2.4.4Klasifikasi Objek Pajak	32
2.4.5 Syarat Pajak Bumi Dan Bangunan	33
2.5 Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan	34
2.6 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	35
2.7 Konsep Efektivitas Dan Efisiensi PBB	38
2.8 Sanksi Dibidang PBB	40
2.9 Landasan Teori.....	42
2.10 Menurut Para Ahli.....	43
2.11 Peneliti Terdahulu	43
2.12 Kerangka Pemikiran	45

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	44
3.2 Meteologi Penelitian	44
3.2.1 Definisi Oprasional Variabel	45
3.2.2 Tehnik Pengumpulan Data.....	46
3.2.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian	46
3.2.3.1 Jenis Data Penelitian	47
3.2.3.2 Sumber Data Penelitian	47
3.3 Teknik Analisis Data Penelitian	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo Utara.....	51
4.1.2 Lokasi Penelitian.....	51
4.2 Analisis Data Penelitian.....	52
4.2.1 Analisis Rasio Efektivitas	52
4.2.2 Perhitungan Rasio Efektivitas PBB Kabupaten Gorontalo Utara.....	53
4.2.2.1 Kecamatan Sumalata	53
4.2.2.2Kecamatan Sumalata Timur	55
4.2.2.3Kecamatan Tolinggula.....	56
4.2.2.4Kecamatan Biau	58
4.2.2.5 Kecamatan Kwandang	60
4.2.2.6 Kecamatan Tomilito	62
4.2.2.7 Kecamatan Ponelo Kepulauan	64
4.2.2.8 Kecamatan Anggrek.....	66
4.2.2.9 Kecamatan Monano.....	68
4.2.2.10 Kecamatan Atinggola	70
4.2.2.11 Kecamatan Gentuma Raya	72
4.2.3 Perhitungan Total Rasio Efektivitas PBB Kabupaten Gorontalo Utara.....	74

4.2.4 Analisis Rasio Efisiensi.....	78
4.2.5 Perhitungan Rasio Efisiensi PBB Kabupaten Gorontalo Utara.....	78
4.2.6 Perhitungan Total Rasio Efektivitas PBB Kabupaten Gorontalo Utara	81
4.3 Pembahasan.....	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Pendapatan Daerah	27
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Reaisasi Penerimaan PBB	6
Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	12
Tabel 2.3 Interpretasi Nilai Efisiensi	36
Tabel 3.1 Oprasional Variabel	37
Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Efektivitas.....	45
Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Efisiensi	49
Tabel 3.4 Daftar Informan.....	49
Tabel 4.1 Target dan Reaisasi Pajak Bumi dan Bangunan	50
Tabel 4.2.2.1 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kecamatan Sumalata	54
Tabel 4.2.2.2 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kecamatan Sumalata Timur	55
Tabel 4.2.2.3 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kecamatan Tolinggula.....	57
Tabel 4.2.2.4 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kecamatan Biau.....	59
Tabel 4.2.2.5 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kecamatan Kwandang	61
Tabel 4.2.2.6 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kecamatan Tomilito	63
Tabel 4.2.2.7 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kecamatan Ponelo Kepulauan	65
Tabel 4.2.2.8 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kecamatan Anggrek	67
Tabel 4.2.2.9 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kecamatan Monano	69
Tabel 4.2.2.10 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kecamatan Atinggola	71
Tabel 4.2.2.11 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kecamatan Gentuma Raya	73
Tabel 4.2.3.1 Total Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	74
Tabel 4.2.3.2 Kriteria Rasio Efektivitas PBB Kabupaten Gorontalo Utara.....	75
Tabel 4.2.3.3 Tingkat Efektivitas PBB DiKabupaten Gorut Tahun 2013 s/d 2019.....	77
Tabel 4.2.4.1 Biaya pemungutan PBB Di Kab. Gorut Tahun 2015 s/d 2019	78
Tabel 4.2.4.2 Kriteria Rasio Efisiensi PBB Kabupaten Gorontalo Utara T.A 2015 s/d 2019	79

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik4.1 Efektivitas PBB Kecamatan Sumalata	54
Grafik 4.2 Efektivitas PBB Kecamatan Sumalata Timur	56
Grafik 4.3 Efektivitas PBB Kecamatan Tolinggula.....	58
Grafik 4.4 Efektivitas PBB Kecamatan Biau.....	60
Grafik4.5 Efektivitas PBB Kecamatan Kwandang.....	62
Grafik 4.6 Efektivitas PBB Kecamatan Tomilito	64
Grafik 4.7 Efektivitas PBB Kecamatan Ponelo Kepulauan.....	66
Grafik 4.8 Efektivitas PBB Kecamatan Anggrek	68
Grafik4.9 Efektivitas PBB Kecamatan Monano.....	70
Grafik 4.10 Efektivitas PBB Kecamatan Atinggola	72
Grafik 4.11 Efektivitas PBB Kecamatan Gentuma Raya	74
Grafik4.12 Total Efektivitas PBB Tahun 2013-2019	76
Grafik 4.13 Total Efisiensi PBB Tahun 2015-2019	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di Indonesia pada tingkat Provinsi maupun tingkat Daerah pada saat ini dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi “Untuk memajukan Kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah diupayakan agar daerah tersebut dapat mengolah sendiri potensi daerahnya bersama masyarakat sekitarnya supaya mereka dapat meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat. (Puspitasari : 2014)

Demi mencapai pembangunan yang optimal setiap penduduk harus meningkatkan, mengembangkan, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alam. Selain dari aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam salah satu aspek penentu berjalannya suatu pembangunan adalah tersedianya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menyebabkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumberdaya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumberdaya alam merasa sedikit khawatir karena pemerintah daerah selalu mengharapkan sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan sumbangan dari

pemerintah pusat maka pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah pasal 1 angka 18 “pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang timah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang”.

Sedangkan menurut Helina Rahman (2005) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah yang ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Pengeluaran daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam badan pembangunan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu, usaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilihat dari sudut pandang yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing, tapi juga seluruh wilayah Indonesia .

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dipertimbangkan sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan berbagai keperluan yang ditentukan oleh daerah khusus keperluan rutin. Oleh karena itu meningkatkan pendapatan ini merupakan hal yang dikehendaki daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional , yang merupakan pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian system perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak

diintensifkan, dan aparat perpajakan atau pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional. (Adelina:2011).

Untuk merealisasikan anggaran pembangunan dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dana yang diperlukan dalam berinvestasi sebaiknya dana yang berasal dari dalam negeri, agar dapat mengurangi jumlah utang negara. Sumber pendapatan Negara dapat berasal dari penghasilan dari perusahaan-perusahaan entah itu perusahaan dari negara ini sendiri maupun perusahaan yang dibangun oleh pihak asing di Indonesia. Negara, yang berpenghasilan dari barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah atau barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak. Sebagai salah satu penerimaan bagi Negara, pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan, pembangunan dan pengeluaran Negara. Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada KAS Negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan balas jasa langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. (Sapriadi : 2009).

Berdasarkan wewenang pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat merupakan pajak yang pemungutannya dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah salah satu jenis pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya, maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-undang. (Adelina, 2011)

Pajak Bumi Dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya akan dilimpahkan kepada daerah. Dengan berlakunya Undang-undang No. 28 tahun

2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Maka penerima pajak ini akan dihitung sebagai pendapatan asli daerah dan menambah sumber PAD, juga meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya itu sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, diharapkan kepada pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan di dasarkan pada undang-undang. Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3569). Pajak Bumi Dan Bangunan selanjutnya di sebut PBB adalah pajak yang di kenakan atas bumi dan bangunan. Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (Sepuluh Persen) untuk pemerintah dan 90% (Sembilan Puluh Persen) untuk daerah.

Pembagian secara merata kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sedangkan pemberian insentif di maksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan PBB dari sektor perkotaan dan sektor perdesaan.

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata "*Efektivity*" yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan, atau tingkat keberhasilan. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terhutang ditentukan

oleh keadaan objeknya yaitu bumi (Tanah) dan /Bangunan. Kondisi dan keadaan objek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang.

Akibat reformasi yang terjadi sejak tahun 1997, membawa dampak yang positif terhadap terbentuknya daerah otonomi baru. Ada beberapa daerah otonomi baru yang sudah di bentuk berdasarkan undang-undang, baik daerah otonomi baru baik provinsi maupun Kabupaten kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di provinsi Gorontalo juga di bentuk beberapa daerah otonomi baru salah satu diantaranya adalah Kabupaten Gorontalo utara yang di bentuk berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pembentukan kabupaten Gorontalo utara di Provinsi Gorontalo. sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang di mulai tahun 2007, Kabupaten Gorontalo Utara di tuntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintah tersebut, Kabupaten Gorontalo Utara berhak mengeluarkan pungutan pajak kepada masyarakat.

Di Kabupaten Gorontalo Utara sendiri pajak yang menjadi salah satu pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan di karenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu factor pemasukan bagi kabupaten gorontalo utara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan kabupaten jika dibandingkan dengan pajak lainnya.

Penerimaan pajak dari pertumbuhan ekonomi di kabupaten gorontalo utara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuat masyarakat memiliki financial untuk membayar pajak yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Berikut ini adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013-2018.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013-2018

NO	KECAMATAN	TARGET					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sumalata	54.567.963	54.946.896	56.962.251	66.387.280	66.459.784	66.588.726
2	Sumalata Timur	25.308.776	26.114.762	27.597.083	32.833.931	33.028.979	33.026.419
3	Tolinggula	40.248.899	41.050.792	43.435.885	52.153.938	52.172.703	52.145.902
4	Biau	34.095.651	34.594.725	34.530.430	40.275.998	40.255.646	40.244.967
5	Kwandang	167.706.858	169.467.972	191.751.522	203.549.288	201.846.937	201.141.046
6	Tomilito	52.426.549	54.154.581	55.441.792	60.797.309	61.257.720	63.928.465
7	Ponelo Kepulauan	5.848.446	6.238.380	6.830.808	15.239.169	15.207.586	15.144.387
8	Anggrek	85.036.954	86.818.441	91.033.940	100.559.431	136.994.470	136.660.618
9	Monano	39.011.123	40.201.913	42.370.551	48.314.324	48.343.830	49.457.965
10	Atinggola	55.910.875	57.456.020	61.879.518	76.141.294	76.112.837	76.096.277
11	Gentuma Raya	50.757.628	50.731.871	52.205.369	58.651.906	59.029.164	58.951.370

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara (Diolah kembali)

NO	KECAMATAN	REALIALISASI					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sumalata	54.567.963	54.946.896	56.962.251	66.387.280	66.459.784	66.588.726
2	Sumalata Timur	25.308.776	26.114.762	27.597.083	32.833.931	33.028.979	33.026.419
3	Tolinggula	40.248.899	41.050.792	43.435.885	46.386.015	52.172.703	52.145.902
4	Biau	34.095.651	34.594.725	34.530.430	15.625.147	40.255.646	40.244.967
5	Kwandang	11.920.007	157.577.942	189.322.067	202.798.088	201.324.152	200.709.852
6	Tomilito	43.377.254	54.154.581	52.596.096	58.077.943	59.311.527	61.937.636
7	Ponelo Kepulauan	5.848.446	6.238.380	6.830.808	15.239.169	15.207.586	15.144.387
8	Anggrek	36.240.938	86.818.441	86.679.060	100.559.431	136.994.470	128.380.844
9	Monano	39.011.123	40.201.913	42.370.551	48.314.324	48.343.830	49.457.965
10	Atinggola	55.910.875	57.456.020	61.879.518	73.711.294	76.112.837	76.096.277
11	Gentuma Raya	58.951.370	50.757.628	52.205.369	58.651.906	59.029.164	58.951.370

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara (Diolah kembali)

Dilihat dari table 1.1 diatas, dari kecamatan Sumalata pada tahun 2013 taerget sebesar Rp.54.567.963.- yang terealisasi Rp.54.567.963. Kemudian pada tahun 2014 target

Rp.54.946.896 dan realisasi Rp.54.946.896, pada tahun 2015 target Rp.56.962.251 dan realisasi Rp.56.962.251, Pada tahun 2016 target Rp.66.387.280 dan realisasi Rp.66.387.280 . Pada tahun 2017 target Rp.66.594.784 dan realisasi Rp.66.594.784 dan pada tahun 2018 target Rp.66.588.726 dengan realisasi Rp.66.588.726 artinya pada tahun 2013 sampai dengan 2018 penerimaan PBB di Kecamatan Sumalata sudah sangat bagus dan memenuhi target karena adanya kesadaran dari wajib pajak akan kewajiban membayar pajak dan di tambah sikap tegas para pemungut pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Kemudian dari kecamatan Sumalata Timur pada tahun 2013 taerget sebesar Rp.25.308.776.- yang terealisasi Rp.25.308.776. Kemudian pada tahun 2014 target Rp.26.114.762 dan realisasi Rp.26.114.762 , pada tahun 2015 target Rp.27.597.083 dan realisasi Rp.27.597.083, Pada tahun 2016 target Rp.32.833.931 dan realisasi Rp.32.833.931. Pada tahun 2017 target Rp.33.028.979 dan realisasi Rp.33.028.979 dan pada tahun 2018 target Rp.33.026.419 dengan realisasi Rp.33.026.419 artinya pada tahun 2013 sampai dengan 2018 penerimaan PBB di Kecamatan Sumalata timur sudah sangat bagus dan memenuhi target sama halnya pada kecamatan sumalata di kecamatan sumalata timur juga para wajib pajak sadar dan taat dalam kewajibanya untuk pembayaran pajak maka pemungutan PBB pada kecamatan sumalata timur selalu baik setiap tahunnya.

Kemudian dari kecamatan Tolinggula pada tahun 2013 taerget sebesar Rp.40.248.899.- yang terealisasi Rp.40.248.899. Kemudian pada tahun 2014 target Rp.41.050.792 dan realisasi Rp.41.050.792 , pada tahun 2015 target Rp.43.435.885 dan realisasi Rp.43.435.885 , Pada tahun 2016 target Rp.52.153.938 dan realisasi Rp.46.386.015. Pada tahun 2017 target Rp.52.172.703 dan realisasi Rp.52.172.703 dan pada tahun 2018 target Rp.52.145.902 dengan realisasi Rp.52.145.902 artinya pada

tahun 2013 sampai dengan 2018 penerimaan PBB di Kecamatan Tolinggula sudah sangat bagus walaupun realisasi penerimaan pada tahun 2016 tidak mencapai target. Di karenakan pada tahun 2016 target PBB di kecamatan tolinggula naik disebabkan bertambahnya para wajib pajak yang baru dan menyebabkan penerimaan PBB pada tahun 2016 tidak sesuai target sebab para wajib pajak yang baru ini belum tau apa kewajiban mereka sebagai WP.

Kemudian dari kecamatan Biau pada tahun 2013 taerget sebesar Rp.34.095.651.- yang terealisasi Rp.34.095.651. Kemudian pada tahun 2014 target Rp.34.594.725 dan realisasi Rp.34.594.72 pada tahun 2015 target Rp.34.530.430 dan realisasi Rp.34.530.430 Pada tahun 2016 target Rp.40.275.998 dan realisasi Rp.15.265.174. Pada tahun 2017 target Rp.40.255.646 dan realisasi Rp.40.255.646 dan pada tahun 2018 target Rp.40.244.976 dengan realisasi Rp.40.244.976 artinya pada tahun 2013 sampai dengan 2018 penerimaan PBB di Kecamatan Biau sudah sangat bagus walaupun realisasi penerimaan pada tahun 2016 tidak mencapai target. Sama halnya dengan kecamatan tolinggula pada kecamatan Biau juga di dapatkan tidak tercapainya target PBB pada tahun 2016 kasusnya masih sama seperti dua kecamatan yang sudah dibahas tadi yaitu masih kurangnya kesadaran wajib pajak yang baru dalam pembayaran PBB.

Kemudian dari kecamatan Kwandang pada tahun 2013 target sebesar Rp.167.706.858.- yang terealisasi Rp.11.920.007. Kemudian pada tahun 2014 target Rp.169.467.972 dan realisasi Rp.157.577.942 pada tahun 2015 target Rp.191.751.522 dan realisasi Rp.189.322.067, Pada tahun 2016 target Rp.203.549.288 dan realisasi Rp.202.798.088. Pada tahun 2017 target Rp.201.846.937 dan realisasi Rp.201.324.152 dan pada tahun 2018 target Rp.201.141.046 dengan realisasi Rp.200.709.852. Pada kecamatan Kwandang yang sangat kecil penerimaan PBBnya adalah pada tahun 2013 itu di karenakan pada tahun tersebut masih kurangnya sosialisasi tentang WP dan pada saat

itu juga kabupaten Gorontalo utara masih dalam proses pemisahan jadi para pemungut pajak masih belum fokus pada PBB, sehingga Penerimaan PBB di kecamatan kwandang pada tahun 2013 masih kurang efektif.

Kemudian dari kecamatan Tomilito pada tahun 2013 taerget sebesar Rp.52.426.549.- yang terealisasi Rp.43.377.254. Kemudian pada tahun 2014 target Rp.54.144.581 dan realisasi Rp.54.144.581 pada tahun 2015 target Rp.55.441.792 dan realisasi Rp.52.596.096, Pada tahun 2016 target Rp.60.797.309 realisasi Rp.58.077.943. Pada tahun 2017 target Rp.61.257.720 dan realisasi Rp.61.257.720 dan pada tahun 2018 target Rp.63.928.465 dengan realisasi Rp.61.397.636 artinya pada tahun 2013 sampai dengan 2018 penerimaan PBB di Kecamatan Tomilito sudah sangat bagus. Karena target dan realisasi PBB pada kecamatan Tomilito ini hampir setiap tahun lunas kecuali, pada tahun 2013 masih ada kekurangan dalam penerimaan PBBnya di sebabkan masih ada para WP yang menunggak dalam pembayarannya.

Kemudian dari kecamatan Ponelo Kepulauan pada tahun 2013 taerget sebesar Rp.5.848.446.- yang terealisasi Rp. 5.848.446. Kemudian pada tahun 2014 target Rp.6.238.380 dan realisasi Rp.6.238.380 pada tahun 2015 target Rp.6.830.808 dan realisasi Rp.6.830.808, Pada tahun 2016 target Rp.15.239.169 dan realisasi Rp.15.239.169, Pada tahun 2017 target Rp.15.207.586 dan realisasi Rp. 15.207.586 dan pada tahun 2018 target Rp.15.144.387 dengan realisasi Rp.15.144.387, artinya pada tahun 2013 sampai dengan 2018 penerimaan PBB di Kecamatan Ponelo Kepulauan memenuhi target karna pada setiap tahunnya realisasi dan target PBB di Kecamatan Ponelo Kepulauan setiap tahunnya tidak pernah berkurang dalam penerimaan PBB.

Kemudian dari kecamatan Anggrek pada tahun 2013 taerget sebesar Rp.85.036.954. yang terealisasi Rp.36.240.938. Kemudian pada tahun 2014 target Rp.86.818.441 dan realisasi Rp.86.818.441, pada tahun 2015 target Rp.91.033.940 dan

realisasi Rp.86.679.060, Pada tahun 2016 target Rp.100.559.431 dan realisasi Rp.100.559.431. Pada tahun 2017 target Rp.136.994.470 dan realisasi Rp.136.994.470 dan pada tahun 2018 target Rp.36.240.938 dengan realisasi Rp.28.380.844. Pada tahun 2013 di kecamatan anggrek hanya sekitar 30% WP yang membayar PBB karna pada tahun 2013 kecamatan anggrek ini masih kurang perhatian dari pemerintah serta kurangnya pengetahuan akan kewajibannya dalam pembayaran PBB. Dan pada tahun-tahun berikutnya pemerintah mengadakan sosialisasi pembahasan tentang PBB dan WP kepada masyarakat yang belum paham apa itu PBB dan hasilnya target dan realisasi PBB pada tahun berikutnya membaik.

Kemudian dari kecamatan Monano pada tahun 2013 target sebesar Rp.39.011.123,- yang terealisasi Rp. 39.011.123. Kemudian pada tahun 2014 target Rp.40.201.913 dan realisasi Rp.40.201.913, pada tahun 2015 target Rp.42.370.511 dan realisasi Rp.42.370.511, Pada tahun 2016 target Rp.48.314.324 dan realisasi Rp.48.314.324, Pada tahun 2017 target Rp.48.343.830 dan realisasi Rp.48.343.830 dan pada tahun 2018 target Rp.49.457.965 dengan realisasi Rp. 49.457.965. Pada kecamatan Monano pembayaran PBB setiap WP sangat memuaskan karena realisasi setiap tahunnya memenuhi target PBB.

Kemudian dari kecamatan Atinggola pada tahun 2013 target sebesar Rp.55.910.875 yang terealisasi Rp.55.910.875. Kemudian pada tahun 2014 target Rp.57.456.020 dan realisasi Rp.57.456.020 ,pada tahun 2015 target Rp.61.879.518. dan realisasi Rp.61.879.518, Pada tahun 2016 target Rp.76.141.294 dan realisasi Rp.73.711.294. Pada tahun 2017 target Rp.76.112.837 dan realisasi Rp.76.112.837 dan pada tahun 2018 target Rp.76.096.277 dengan realisasi Rp.76.096.277. sama halnya dengan Kecamatan monano pada kecamatan Atinggola juga pada setiap tahunnya realisasi

penerimaan PBB sangat memuaskan karna para WP di kecamatan Atinggola sebagian besar taat dalam melaksanakan pembayaran PBB tersebut.

Kemudian dari kecamatan Gentuma Raya pada tahun 2013 taerget sebesar Rp.50.757.628,- yang terealisasi Rp.50.757.628. Kemudian pada tahun 2014 target Rp.50.731.871 dan realisasi Rp.50.731.871 ,pada tahun 2015 target Rp.52.205.369 dan realisasi Rp.52.205.369, Pada tahun 2016 target Rp.58.651.906 dan realisasiRp.58.651.906. Pada tahun 2017 target Rp.59.029.164 dan realisasi Rp.59.029.164 dan pada tahun 2018 target Rp.58.951.370 dengan realisasi Rp.58.951.370. Pada kecamatan Gentuma raya juga penerimaan PBB setiap tahunnya sangat memuaskan karena realisasi PBB pada kecamatan ini sudah memenuhi target maka dinyatakan sudah sangat baik.

Sebagaimana di amanatkan bahwa setiap daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka diberikan kewenangan untuk menggali potensi yang menerbitkan atau menyusun peraturan daerah. Pemerintah kabupaten gorontalo utara dalam hal ini juga tela mengatur pajak daerah yang mempunyai potensi melalui peraturan daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah

Hal ini terjadi di karenakan masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang pajak bumi dan bangunan itu sendiri,ada pula masyarakat yang mampu membayar tapi mereka tidak patuh dalam pembayaranya. Di dapatkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengeolahan pajak bumi dan bangunan pada dinas pengelolaan keuangan di Kabupaten gorontalo utara adalah kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakanya, Hal ini disebabkan karena belum adanya sanksi tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam peraturan tersebut.

Disamping itu berusaha melakukan upaya demi meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat memberikan kotribusi yang besar dalam peningkatkan

pendapatan daerah. Kemudian berikut tabel biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2018.

**Tabel 1.2 Biaya pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan
Dikabupaten Gorontalo Utara 2015-2018**

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018
1	Sumalata	Rp.7.902.326	Rp.16.788.308	Rp.23.177.210	Rp.23.503.302
2	Sumalata Timur	Rp.4.875.522	Rp.12.021.361	Rp.17.396.226	Rp.17.275.526
3	Tolinggula	Rp.4.875.522	Rp.14.330.297	Rp.16.824.787	Rp.20.202.483
4	Biau	Rp.5.771.983	Rp.11.307.217	Rp.20.113.351	Rp.18.445.321
5	Kwandang	Rp.23.808.099	Rp.43.491.769	Rp.48.457.232	Rp.44.387.129
6	Tomilito	Rp.9.347.888	Rp.16.231.623	Rp.19.803.748	Rp.19.546.414
7	Ponelo Kepulauan	Rp.1.950.209	Rp.6.338.745	Rp.6.953.553	Rp.7.290.022
8	Anggrek	Rp. 15.490.777	Rp.25.872.009	Rp.36.233.207	Rp.30.610.654
9	Monano	Rp.8.539.400	Rp.13.662.550	Rp.18.214.580	Rp.19.811.346
10	Atinggola	Rp.8.221.912	Rp.23.750.235	Rp.28.574.418	Rp.26.599.763
11	Gentuma Raya	Rp.99.948.199	Rp.199.899.482	Rp.259.095.672	Rp.249.429.629
JUMLAH		Rp.190.731.837	Rp.303.693.596	Rp.494.843.984	Rp.477.101.589

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui suatu penelitian dengan formulasi judul : **“Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2015-2018?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2013-2018?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2013-2018.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis Penulis memperoleh tambahan pengetahuan terkait proses pengalihan pengelolaan PBB menjadi pajak daerah. Mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi Masyarakat Masyarakat dapat menambah wawasan pengetahuannya tentang pajak. Mengetahui kinerja pemerintahan khususnya pemerintah daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa di jadikan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan tentang efektifitas dan efisiensi pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yakni bagi DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai masukan dan informasi

dalam rangka pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1. Bagi Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sebagai bahan masukan dalam pengelolaan PBB yang mulai berjalan efektif dan efisien masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bagi masyarakat Dapat memberikan informasi mengenai PBB yang sudah dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadikan masyarakat sebagai pengawas pengelolaan PBB tersebut.
3. Bagi peneliti sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai seperti apa pelaksanaan penagihan PBB dari pemerintah Desa sampai ke pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Otonomi Daerah

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah di ubah dengan Undang-undang No 8 Tahun 2005 menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam waktu otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu ketentuan dan syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana yang diatur pada Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Dengan adanya Undang-undang tersebut telah memberi angin segar terhadap daerah kabupaten/kota untuk mengelolah kuangan sendiri dengan lebih mandiri. Hal tersebut disebabkan karena yang lebih mengerti persoalan daerah itu sendiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah disamping merupakan amanat konstitusi, juga merupakan kebutuhan objektif dalam penyelenggaraan pemerintah saat ini pola penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik dimasalalu sudah tidak sesuai lagi pada masakini karena sudah tidak efesien, biasanya juga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang telah berubah baik karena beberapa factor.

Yaitu factor internal dan factor eksternal. Peran Pemerintah Pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis sudah harus diserahkan kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan target pemerintah yang lebih efisien dan efektif, serta demokratis, serta mendorong peran masyarakat dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada di daerah tersebut dan keanekaragamannya. Dengan demikian otonomi daerah harus mampu memberdayakan potensi yang ada tersebut serta mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Pemberian otonomi yang luas kepada suatu daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah juga diharapkan harus mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan semua prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan sebuah hubungan antarasusunan pemerintah dan antara pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global kemudian memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Nurlan Darise, 2009)

2.1.2 Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. (KBBI,2008) Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitanya lalu ditafsirkan maknanya.

Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “analisis” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail dalam suatu hal atau benda dengan cara mengurangi komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.(Rohayati,2017)

2.1.3 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Efektivitas dipakai untuk menghitung hubungan antara jumlah pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat pula dikatakan sebagai pengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. (Warren 2014)

Efektivitas menunjukkan sebuah keberhasilan dalam mencapai suatu target tertentu. Kemudian di lihat dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti membuat kesimpulan bahwa efektivitas adalah tercapainya suatu target yang telah disusun pada proses

sebelumnya dan mendapatkan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan, sehingga apabila hasil yang dicapai mendapatkan hasil yang baik maka mendapat nilai efektif. Namun berbanding terbalik jika kegiatan gagal maka nilainya juga mendapat tidak efektif karena tidak sesuai target.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang peneliti lakukan maka efektivitas yang dimaksud adalah mengukur realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara. Efektif atau tidaknya realisasi pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan.

2.1.4 Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kerja atau target yang telah ditetapkan. (Kinanti :2017)

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai ketetapan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga.

2.1.5 Pengertian Pajak

Pajak (Dari bahasa latin *taxo*, "rate") adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang sehingga kewajiban financial atau retribusi yang dikenakan wajib pajak oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam keperluan public. Pajak di kumpul berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi sebagian

besar biaya produksi barang dan jasa kolektif agar mencapai kesejahteraan umum. Jika ada Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum maka akan dikenakan sanksi pidana, Pajak Juga merupakan alat untuk memasukan uangsebanayak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan bangunan umum. Pada hakikatnya pajak merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat disuatu Negara dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dinegara ini.

Pajak merupakan salah satu fasilitas pemerikatan Negara dan sumber dana pembangunan Negara bagi pemerintah. Jadi di jangka panjang masyarakat dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Menurut Soemitro (2013). Pajak adalah iuran atau pemungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan darisektor swasta kepda sektor public yang dapat untuk di pakasakan serta yang langsung ditunjuk dan di pakai untuk membiayai kebutuhan Negara.

Menurut Smeeths (2013)Pajak adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terutang degan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya konta prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya dalah untuk membiayai Pengeluaran pemerintah.

Menurut Feldmann,dalam Resmi (2014) Pajak adalah prestasi yang dipakasakan sepihakoleh terutang kepada penguasa (Menurut norma-norma yang di

tetapkan secara umum) tanpa adanya kontaprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Solich Jamin (2014) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “Surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2.1.5.1 Ciri-ciri Pajak

Ada beberapaciri-ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak. Ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo 2011 yaitu sebagai berikut :

1. “Iuran dari rakyat kepada Negara” yang mempunyai hak untuk memungut pajak adalah Negara, Iuran tersebut berupa uang (Bukan Barang).
2. Berdasar dari Undang-undang pajak dipungut atas dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontaprestasi dari Negara secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi secara individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti fasilitas umum.

Kemudian ciri-ciri pajak menurut Erly Suandy (2015) yaitu :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan perundang-undangan serta aturan pelaksan sehingga dapat dipaksakan.
3. Pajak di tagih oleh Negara baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi public.
5. Pajak dapat di gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
6. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tanpa ada realissi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut Sudirman dan Amiruddin (2012) :

1) Fungsi pendapatan pajak

Pendapatan terbesar negara adalah pajak. Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukan uang ke kas Negara sesuai dengan peraturan yang telah di tentukan.

2) Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur semua kegiatan perekonomian di suatu negara atau daerah sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.

3) Fungsi pemerataan

Peranan pemerintah tentang pajak diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi disuatu negara atau daerah yang cukup tinggi. Untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam membiayai pembangunan di suatu daerah

Sendangkan menurut Mardiasmo (2016), ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :

1) Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi.

2.1.5.3 Tarif Pajak

Tarif dari PBB bersifat proposional yang tidak mencerminkan keadilan dalam perpajakan dan menggunakan tarif tunggal (Single Rate) atau tarif seragam (Unifrom Rate) atau (Flat Rate) yang besarnya adalah 0,5% (Diana, 2013)

2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga system pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009), ke tiga system pemungutan pajak tersebut :

1. *Official Assessment system* merupakan system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar.
3. *Withholding System* merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.5.5 Definisi Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. (Adelina:2011).

NPWP diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan undang-undang perpajakan. Menurut undang-undang perpajakan nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5.6 Hak Wajib Pajak

1. Memperoleh formulir SPOP secara gratis pada kantor pelayanan pajak (KPP), kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak (KP2KP) atau tempat lain yang di tunjuk.
2. Memperoleh Penjelasan, keterangan tentang tatacara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada KPP atau KP2KP.
3. Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari KPP atau KP2KP.
4. Memperbaiki atau mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan melampirkan fotocopy bukti yang SAH.

5. Menunjuk orang/pihak lain selain pegawai direktorat jendral pajak dengan surat kuasa khusus bermaterai, sebagai kuasa wajib pajak untuuk mengisi dan mendatangi SPOP.
6. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang SAH.

2.1.5.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penerimaan pajak, para WP harus patuh dan taat dalam peraturan yang berlaku. Pemungutan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara yang di dasari oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan adanya *self assessment system* agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu melakukan pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktivitas suatu negara.

Dalam kepatuhan wajib pajak PBB sesuai dengan definisi tersebut di atas, dapat di ukur dengan melihat peraturan PBB yang berlaku (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994). Kepatuhan WP.PBB dapat dihubungkan misalnya dengan melihat perilaku WP dalam pembayaran PBB tepat pada waktunya, Melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah/rumah yang ditempati sendiri ataupun tanah/rumah yang ditempati tetangga, mengurus dan mengisi SPOP dengan benar, serta menyerahkan SPOP yang sudah terisi ke kantor pelayanan PBB atau aparat yang di tunjuk.

2.1.5.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stesel pajak, asas pemungutan pajak, dan system pemungutan pajak. Menurut Resmi (2011), asas pajak pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

- 1) Stelsel Nyata (Riil) ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun
- 2) Stelsel Anggapan (Fiktif) menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Stelsel Campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara nyata dan telsel anggapan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

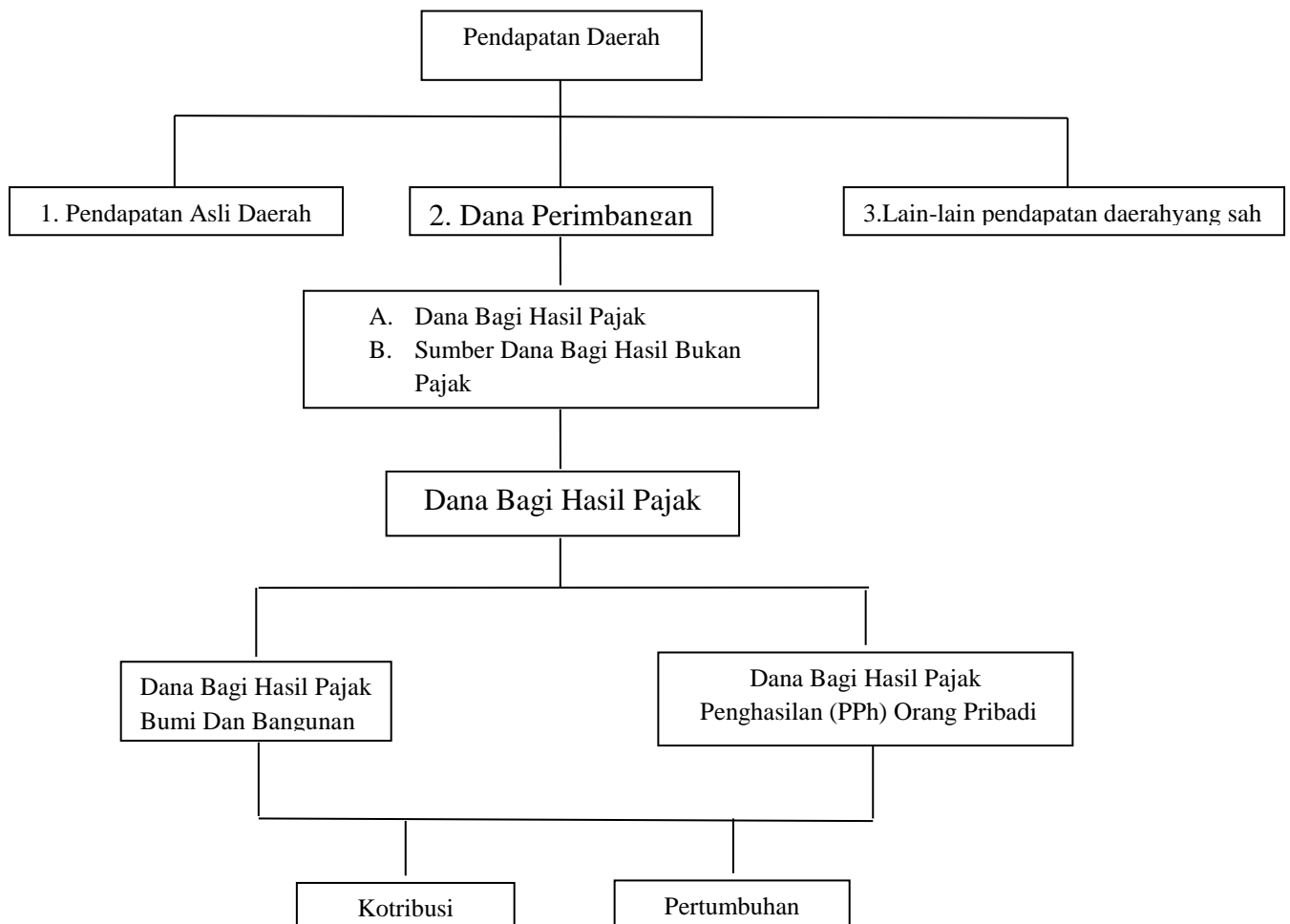
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disngkat menjadi (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah melalui pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah itu sendiri perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat di laksanakan. Resmi (2011)

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 , sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retrebusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah salah satunya adalah Pajak Bumi Dan Bangunan.

Khusus pajak dan retribusi dasar hukum pemungutannya berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan aturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang pajak daerah dan peraturan pemerintah No 66 tentang Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah dan pembangunan daerah .Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang di pisahkan adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada badan usaha milik Negara/Daerah/Swasta dan kelompok Usaha Milik Masyarakat.

Gambar 2.1 : Struktur Pendapatan Daerah

Sumber : *DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara*

2.3 Pengertian Pajak Daerah

Menurut pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud pajak daerah, yang selanjutnya di sebut pajak daerah adalah kotribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya ke makmuran rakyat.

Pajak Daerah harus dibayarkan kepada orang yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang meminta izin berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

ketidak seimbangan langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah yang sebanding dengan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :

Pajak Kendaraan bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Bumi dan Bangunan

2.4 Definisi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan bangunan atau yang di singkat PBB menurut UU NO. 28 tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau yang di kuasai oleh orang pribadi kecuali kawasan yang digunakan untuk area perkebunan dan pertambangan.

Menurut undang-undang No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tarif pajak bumi dan bangunan untuk perdesaan dan perkotaan menjadi paling tinggi 0,3%. Selain itu Besaran NJOPTKP juga di ubah dari sebelumnya di tetapkan setinggi-tingginya Rp.12.000.000,00 ,kini paling rendah Rp. 10.000.000,00 per objek pajak . Selain mengubah tarifnya, undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini juga menetapkan aturan baru tentang Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Sebelumnya NJKP ditetapkan 20-100% dari NJOP yang sudah dikurangi NJOPTKP, kini peraturan tersebut tidak di gunakan lagi.

2.4.1 Asas Pajak Bumi Dan Bangunan

Mardiasmo (2009) pengenaan pajak bumi dan bangunan diatur dalam beberapa asas yang meliputi di antara lain :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak yang berganda

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa asas pajak bumi dan bangunan dapat memberikan kemudahan, kepastian hokum, mudah dimegerti,adil, dan menghindari pajak yang berganda bagi wajib pajak.

2.4.2 Objek Pajak Bumi Dan Bangunan

Objek pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/Bangunan. Yang di maksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tumbuh di bumi yang di bawahnya Contoh : Sawah, ladang, kebun, pekarangan, tanah, tambang. Yang di maksud Bangunan adalah kontruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/ perairan termasuk : Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel,pabrik, dan emplasemenya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan trsebut., Jalan Tol, Kolam Berenang, Pagar Mewah, Tempat Olahraga, Galangan Kapal,Dermaga, Taman Mewah, Tempat Pendamping/Kilang minyak,air dan gas,pipa minyak, Fasilitas lain yang dapat member manfaat.Amiruddin (2012)

2.4.3 Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan

Dalam hal Bumi dan bangunan tidak di huni sendiri atau di sewakan atau di kuasakan kepada orang lain, maka penghuni/penyewa atau penguasa tersebut di sebut sebagai orang pribadi atau yang memperoleh “Manfaat” atas bangunan dan/atau bumi tersebut, termasuk juga orang pribadi atau badan yang memanfaatkan bumi dan/ bangunan dalam sengketa pemilikan di pengadilan. Penghuni atau penyewa dan penguasa tersebut Direktorat Jendral pajak dapat ditunjuk sebagai wajib pajak

Dapat di simpulkan untuk dapat menentukan terutang nya pajak atas satu Objek PBB, maka harus ada subjek pajaknya. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki :

1. Mempunyai suatu hak atas Bumi, dan Bangunan
2. Memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan
3. Memiliki Bangunan dan Bumi (Tanah)
4. Menguasai Bangunan dan Bumi (Tanah)
5. Memperoleh manfaat atas Bangunan.

Subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB ditetapkan sebagai wajib pajak oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (saat ini pihak pemerintah daerah untuk pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan) sebagai mana tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Namun dewasa ini sering kali kita jumpai bahwa nama wajib pajak yang tercantum dalam SPPT tersebut tidak sesuai dengan keadaan sekarang karena subjek pajaknya yang berbeda.

2.4.4 Klasifikasi Objek Pajak

Sebagai suatu harta kebendaan dan sesuai sifatnya yang terbatas (luas tanah atau bumi tidak bertambah) sedangkan jumlah manusia yang ingin menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah atau bumi semakin bertambah, maka tanah atau bumi memiliki harga jual atau harga pasar yang semakin naik setiap saat dan kenaikan itu dapat berbeda-beda. Amiruddin (2012)

Bangunan pun berbeda-beda nilainya tergantung pada bentuk atau model, desain, konstruksi dan bahan bangunan. Meskipun nilai suatu bangunan secara teoritis akan menurun seiring dengan pertambahan masa pemanfaatannya tetapi bangunan sebagai objek pajak memiliki nilai dan nilai itu bervariasi. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan Asli Daerah yang diatur pemungutannya sendiri oleh daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan yang efektifitasnya tinggi maka secara langsung mempunyai korelasi positif terhadap kontribusi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan yang juga akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Artinya bahwa efektifitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan berbanding lurus terhadap kontribusi penerimaan pajak.

2.4.5 Syarat Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini member jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun bagi warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem Pemungutan pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.5 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak Bumi Dan Bangunan perlu dipahami terlebih dahulu unsure-unsur didalamnya yaitu pengertian dari NJOP, NJOPTK, NJKP dan tarif pajak.

Menurut Rohayati (2017) Unsur-unsur pajak Bumi dan Bangunan terutang perlu dipahami terlebih dahulu adalah :Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTK), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), Tarif Pajak.

1. Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan

Menurut pasal 5 Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagai mana telah diubah terahir dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994 tentang PBB, tariff pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (Nol koma lima persen).

2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Menurut pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), tariff PBB perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sekitar 0,3% (Nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan persturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dikasudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah.

3. Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Banguana

Menurut pasal 6 ayat (1) undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagai mana telah diubah terahir dengan undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Berikut ini penjelasanya :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harganya.

- b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung secara keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan.
- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

2.6 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

Sesuai dengan PerMenkeu No.167/PMK.03/2007, diatur tempat dan tata cara pembayaran PBB sebagai berikut :

1. Pembayaran PBB Terutang untuk objek pajak
 - Perdesaan Dan Perkotaan dilakukan di :
 - 1) Tempat Pembayaran (TP), yaitu Bank umum/kantor pos ditunjuk oleh menteri keuangan untuk menerima pembayaran PBB dan memindah bukukan ke Bank Presepsi/Pos Presepsi
 - 2) TP Elektronik, yaitu Bank umum/Kantor Pos yang di tunjuk oleh menteri keuangan untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik dan memindah bukukan ke Bank Presepsi/Pos Presepsi
2. Dalam hal PBB terutang dipungut oleh petugas pemungut, setiap hari kerja petugas pemungutan wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB ke TP, kecuali untuk daerah tertentu yang sarana dan prasarananya sulit, penyetoran dapat dilakukan paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pemungutan.
3. Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenankan mencicil)
4. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah sebagai berikut :
 - a. SPPT jatuh tempo 6 bulan sejak diterima

- b. SKP jatuh tempo 1 bulan sejak diterima
- c. STP jatuh tempo 1 bulan sejak diterima.

2.7 Konsep Efektivitas Dan Konsep Efisiensi

A. Efektivitas

Secara singkat pengertian efektivitas menurut Peter F. Drucker adalah efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran yang akan di capai “doing the right thing” Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2001) “Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan”.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2004) Efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah disusun pada proses perencanaan dan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga apabila hasil yang dicapai semakin baik maka dapat dinilai semakin efektif.

Purnamasari (2016) menjelaskan bahwa rasio efektivitas pajak dan retribusi daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi

penerimaan pajak/retribusi daerah dengan target penerimaan pajak /retribusi daerah (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327

Kriteria Efektivitas:

1. Nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$ berarti efektif)
2. Nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang
3. Nilai lebih dari 100 ($x > 100\%$ berarti efektif)

Untuk menilai efektif tidaknya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1 : Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327

B. Efisiensi

Efisiensi mempunyai hubungan erat dengan konsep produktifitas. Menurut Mohammad Mahsun (2006) menyatakan bahwa, “Pengukuran Efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost output).” Sehingga untuk mengukur tingkat efisiensi pemberian pajak Daerah adalah dengan membandingkan biaya untuk memperoleh Pajak Daerah hasil perolehan Pajak Daerah. Untuk menghitung efisiensi penerimaan Pajak Daerah menggunakan rumus berikut :

$$Efisiensi PBB = \frac{\text{Biaya pemungutan PBB}}{\text{Realisasi pemungutan PBB}} \times 100\%$$

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327

Kriteria Efisiensi :

1. Nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$ berarti efisien)
2. Nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisien berimbang
3. Nilai lebih dari 100 ($x > 100\%$ berarti efisien)

Untuk menilai efisien tidaknya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.2 : Interpretasi Nilai Efisiensi

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efisien
90-100%	Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Kurang Efisien
<60%	Tidak Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327

2.8 Sanksi Dibiidang Pajak Bumi Dan Bangunan

Sanksi di bidang pajak bumi dan bangunan dapat dibagi menjadi dua :

A. Sanksi Administrasi

Cara penyampaian SKP terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dan Kantor Pos atau melalui Pemerintah Daerah (dalam hal ini Aparat Desa atau Kelurahan). (mardiasmo : 2016)

Selain itu jika Wajib Pajak (WP) tidak melunasi pajak yang terutang sedangkan saat jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah lewat dan Wajib Pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran SPPT/SKP tetapi denda administrasi tidak dilunasi. Maka Kepala Kantor

Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak PBB, yaitu surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrasi. STP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal STP diterima WP. Apabila Wajib Pajak tidak melunasi SPT sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran.

1. Dalam hal WP tidak menyampaikan kembali SPOP pada waktunya dan setelah di tegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang terutang.
2. Apabila pengisian SPOP setelah diteliti atau di periksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa
3. denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terutang.

B. Sanksi Pidana

1. Barang siapa yang kena kealpaanya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara, dipidana dengan pidana

kurungan selama-lamanya 6 (enam) Bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang

2. Barang siapa karena dengan sengaja :

- a. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak;
- b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- c. Memperhatikan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau di palsukan seolah-olah benar;
- d. Tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
- e. Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang. Sanksi pidana tersebut dilipat 2 (dua) kali apabila seorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00,- Standar Investasi adalah jumlah biaya yang di investasikan untuk suatu pembangunan atau penanaman yaitu penggalian jenis sumber daya alam atau bedidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan.

2.9 Menurut Para Ahli

Berikut Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Para Ahli :

- 1) S-Aji Suryo, 2006 Pajak Bumi Dan Bangunan Adalah Pajak yang dikenakan atau di bebaskan atas bumi dan bangunan.
- 2) Racmat Soemitro, Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kas ke sekor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat di pakakan dengan tidak mendapat jasa timbale (tagen prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- 3) Erly Suandy, 2005 Pajak Bumi Dan Bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yakni bumi atau tanah dan bangunan.

2.10 Peneliti Terdahulu

Adapun Penelitian sebelumnya mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah :

Menurut Rohayati Eti (2017), dalam penelitiannya yaitu “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tolangohula”. Berdasarkan hasil penelitian , penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan tolangohula Kabupaten Gorontalo di katagorikan efektif jika rasio inimancapai 100%. secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan tolangohula kabupaten Gorontalo selama kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2016 berada pada katagori efektif.

Menurut Sari (2010), dalam penelitiannya yang menganalisis “Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Dikota Bandung”. Hasil penelitian menunjukan tingkat efektivitas pda ahun 2002 sampai dengan 2008 berdasarkan peneliti tersebut bahwa tahun 2003 sampai

dengan 2005 masih dibawah rata-rata sedangkan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan berada di atas rata-rata.

Menurut Angreini (2008) yang meneliti tentang “Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Pada Kabupaten Nganjuk”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan kabupaten nganjuk periode 2004-2006 sudah efektif dengan presentase tahun 2004 mencapai 136,50% ,2005 mencapai 130,03% dan tahun 2006 mencapai 169,49%. Kotribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah tahun 2004 sebesar 3,80%, tahun 2005 sebesar 3,75% dan tahun 2006 sebesar 3,34%.

Menurut Trie (2006). “Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan Dan Perkotaan kota Bitung” sangat efektif, Kota Tomohon efektif, dan Kota manado cukup efektif. Dan kotribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kota bitung kurang, Kota tomohon kurang , Dan kota Manado sangat kurang.

Menurut O Polli (2014). “Tingkat penerimaan pajak Bumi dan Bangunan” sudah cukup efektif setiap tahunnya. Kontribusi yang diberikan PBB terhadap pendapatan daerah belum memberikan kontribusi yang cukup mempengaruhi jumlah pendapatan daerah. Kotribusi terbesar selama tahun 2008-2012 yaitu pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2008. untuk tingkat pertumbuhan mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2009 yang berada pada posisi negative.

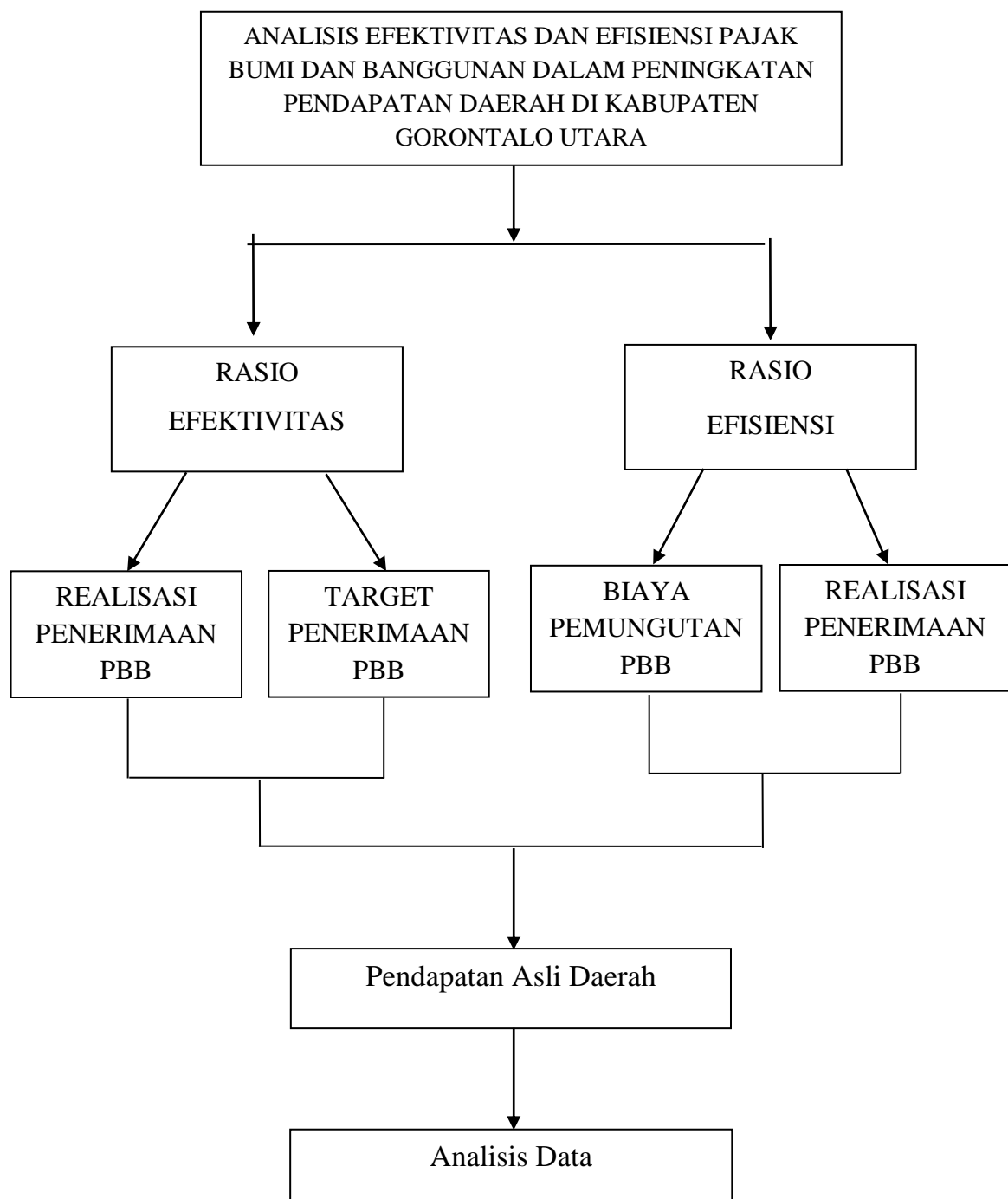
Menurut Sumena O. Polii (2015). “Analisis Efektitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunann Serta Kotribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Dikota Manado” . Juumlah penerimaan pajak bumi dan

bangunan kota manado memberikan kotribusi yang masih kurang bagi pendapatan daerah sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan daerah.

2.11 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah gambaran mengenai tinjauan penyusunan Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara :

Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran





BAB III

METEOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah mengangkat fenomena tentang analisis efektivitas Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan daerah di Kabupaten Gorontalo utara, Alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Gorontalo Utara karena, Kabupaten ini adalah kabupaten yang paling bungsu di Provinsi Gorontalo dan menarik untuk dibahas karena belum banyak yang mengangkat Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten Gorontalo Utara ini.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan rencana yang terstruktur serta berisi pendekatan yang dipakai dalam menjawab rumusan masalah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif.

Metode Deskriptif Kuantitatif adalah metode yang digunakan dan menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Metode penelitian ini dapat diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu. (Sugiyono, 2013)

Metode pengumpulan data adalah cara teknik atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Penelitian pustaka, Yaitu pengumpulan data secara teoritis memilih berbagai buku literatur, lainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

2. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengadaaan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mengumpulkan data yang di perlukan.

3.2.1 Definisi Oprasional Variabel

Penelitian ini mengambil indicator penelitian yang telah dikembangkan sekaligus di uji validitas dan realibilitasnya oleh peneliti terdahulu, yaitu purnamasari (2016). Sehingga peneliti hanya melakukan adaptasi terhadap indicator yang digunakan dan sesuai dengan penelitian yang ingin diuji peneliti.

Tabel 3.1 Oprasional Variabel

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA
Analisis Rasio Efektivitas	Rasio Efektivitas	$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$	Rasio
Analisis Rasio Efisiensi	Rasio Efisiensi	$\text{Efisiensi PBB} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : depdagri, , Kepmendagri No.690.900.327

Pemahaman Wajib Pajak yaitu kegiatan yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam rangka penanaman informasi perpajakan, mengembangkan tingkat pemahaman, dan pengarahan mengenai pemahaman yang benar mengenai pajak terutama pajak PBB. Menurut Purnamasari

(2016), pemahaman perpajakan adalah pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku diIndonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarifpajak,perhitungan pajakterutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimanapengisian pelaporan pajak.Indikator-indikator pemahaman

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji masalah yang telah dirumuskan. Sedangkan tehnik yang penulis gunakan adalah dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data-data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan data primer dan tehnik pengumpulan datanya dilakukan dengan Observasi, wawancara dan pengambilan data. Peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini daftar beberapa nama Informan.

Tabel 3.2 Daftar Informan

NO	NAMA	JABATAN	KODE INFORMAN
1	Suwardi Pailaha,SH.MH	KASUBID Pendaftaran, Pendataan, Penetapan PBB	SP,SH.MH
2	Rinto Haluti,SH	KASUBID Penagihan PBB	RH,SH

3.2.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapatkan oleh penulis melalui Observasi, wawancara dan data realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2.3.1 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka, yang umumnya di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan lokasi penelitian.

2. Data Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif

Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi secara factual, Sistematis dan akurat. Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena.

3.2.3.2 Sumber Data

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pimpinan serta staf yang terkait dalam kantor pendapatan daerah serta pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan melalui data/ dokumen-dokumen serta arsip dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu berupa data realisasi dan rekapitulasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan. Bersumber dari instansi DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara.

3.3 Teknik Analisis data Penelitian

Teknik Analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data, di gunakan menafsirkan data yang telah di peroleh. Pada penelitian ini , peneliti menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif Karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian maka Analisis data dapat dilakukan melalui tahap berikut ini (Inka: 2019)

1. Perencanaan

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah memberikan surat penelitian kepada Sekretariat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPAKAD).

2. Pelaksanaan

Pada kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembelajaran pada sampel penelitian.

3. Evaluasi

Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengelolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah di tentukan.

4. Penyusunan

Tahap ini peneliti melakukan penyusunan data-data (laporan Realisasi) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah.

Untuk mengetahui efektifitas penerimaan PBB terhap pendapatan daerah di Kabupaten Gotrontalo Utara maka digunakan teknis analisis data sebagai berikut :

1. Membuat table penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Menyusun table analisis efektifitas pajak bumi dan bangunann yaitu perbandingan antara peneriamaan dan potensi PBB. Untuk menilai efektif tidaknya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.2 : Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : depdagri, , Kepmendagri No.690.900.327

Dan Untuk mengetahui Efisiensi biaya pengeluaran PBB untuk memungutpendapatan daerah di Kabupaten Gotrontalo Utara maka digunakan teknis analisis data sebagai berikut :

1. Membuat table pengeluaran biaya Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Menyusun table analisis Efisiensi pajak bumi dan bangunann yaitu perbandingan antara pengeluaran biaya untuk pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dan target realisasi penerimaan PBB. Untuk menilai efektif tidaknya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.3 : Interpretasi Nilai Efisiensi

Presentase	Kriteria
<60%	Sangat Efisien
60-80%	Efisien
80-90%	Cukup Efisien
90-100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber : depdagri, , Kepmendagri No.690.900.327



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran ke tiga (2007) Kabupaten Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo Utara di bagi atas sebelas (11) Kecamatan, (123) seratus dua puluh tiga desa dengan jumlah penduduk 104,133 jiwa serta luas 1,230,07 Km² sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 84,60 jiwa/Km².

Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut : Anggrek, Atinggola, Biau mekaran Kecamatan Tolinggula (2011), Gentuma Raya, Kwandang, Monano mekaran Kecamatan Anggrek (2011), Ponelo Kepulauan, mekaran Kecamatan Kwandang (2011), Sumalata, Sumalata Timur, mekaran Kecamatan Sumalata (2011), Tolinggula, dan yang terahir Tomilito, mekaran Kecamatan Kwandang (2011).

4.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara. berlokasi di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara. Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang dilatar belakangi oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, lingkungan pengendalian daerah, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah organisasi BPKD yang telah dirubah namanya menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta aset/barang daerah. Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah yang menuntut alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

4.2 Analisis Data Penelitian

4.2.1 Analisis Rasio Efektivitas

Sebelum dilakukan perhitungan rasio sehubungan dengan rasio efektivitas, maka berikut ini data-data penerimaan pajak bumi dan bangunan yang di butuhkan dalam perhitungan rasio yang bersumber dari laporan keuangan pada Kabupaten Gorontalo Utara, yang di uraikan dalam table berikut :

**Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2013-2018**

NO	KECAMATAN	TARGET						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sumalata	54.567.963	54.946.896	56.962.251	66.387.280	66.459.784	66.588.726	73.815.472
2	Sumalata Timur	25.308.776	26.114.762	27.597.083	32.833.931	33.028.979	33.026.419	35.413.925
3	Tolinggula	40.248.899	41.050.792	43.435.885	52.153.938	52.172.703	52.145.902	55.234.147
4	Biau	34.095.651	34.594.725	34.530.430	40.275.998	40.255.646	40.244.967	49.033.125
5	Kwandang	167.706.858	169.467.972	191.751.522	203.549.288	201.846.937	201.141.046	203.873.594
6	Tomilito	52.426.549	54.154.581	55.441.792	60.797.309	61.257.720	63.928.465	64.937.415
7	Ponelo Kepulauan	5.848.446	6.238.380	6.830.808	15.239.169	15.207.586	15.144.387	15.378.194
8	Anggrek	85.036.954	86.818.441	91.033.940	100.559.431	136.994.470	136.660.618	140.794.201
9	Monano	39.011.123	40.201.913	42.370.551	48.314.324	48.343.830	49.457.965	50.501.233
10	Atinggola	55.910.875	57.456.020	61.879.518	76.141.294	76.112.837	76.096.277	76.983.941
11	Gentuma Raya	50.757.628	50.731.871	52.205.369	58.651.906	59.029.164	58.951.370	59.530.121

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara (Diolah kembali)

NO	KECAMATAN	REALIALISASI						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sumalata	54.567.963	54.946.896	56.962.251	66.387.280	66.459.784	66.588.726	73.815.472
2	Sumalata Timur	25.308.776	26.114.762	27.597.083	32.833.931	33.028.979	33.026.419	35.413.925
3	Tolinggula	40.248.899	41.050.792	43.435.885	46.386.015	52.172.703	52.145.902	54.117.493
4	Biau	34.095.651	34.594.725	34.530.430	15.625.147	40.255.646	40.244.967	49.033.125
5	Kwandang	11.920.007	157.577.942	189.322.067	202.798.088	201.324.152	200.709.852	200.940.358
6	Tomilito	43.377.254	54.154.581	52.596.096	58.077.943	59.311.527	61.937.636	63.710.821
7	Ponelo Kepulauan	5.848.446	6.238.380	6.830.808	15.239.169	15.207.586	15.144.387	15.378.194
8	Anggrek	36.240.938	86.818.441	86.679.060	100.559.431	136.994.470	128.380.844	120.451.101
9	Monano	39.011.123	40.201.913	42.370.551	48.314.324	48.343.830	49.457.965	50.501.233
10	Atinggola	55.910.875	57.456.020	61.879.518	73.711.294	76.112.837	76.096.277	76.983.941
11	Gentuma Raya	58.951.370	50.757.628	52.205.369	58.651.906	59.029.164	58.951.370	59.530.121

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara (Diolah kembali)

4.2.2 Perhitungan Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dihitung melalui rasio di bawah ini :

$$\text{Rasio Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

4.2.2.1 Kecamatan Sumalata

Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bnagunan di Kecamatan Sumalata pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 :

$$\begin{aligned}
 2013 &= \frac{54.567.963}{54.567.963} \times 100\% = 100\% \\
 2014 &= \frac{54.946.896}{54.946.896} \times 100\% = 100\% \\
 2015 &= \frac{56.962.251}{56.962.251} \times 100\% = 100\% \\
 2016 &= \frac{66.387.280}{66.387.280} \times 100\% = 100\% \\
 2017 &= \frac{66.459.784}{66.459.784} \times 100\% = 100\% \\
 2018 &= \frac{66.588.726}{66.588.726} \times 100\% = 100\% \\
 2019 &= \frac{73.815.472}{73.815.472} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi

Dan Bangunan di Kecamatan Sumalata, Dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 4.2.2.1 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kecamatan Sumalata**

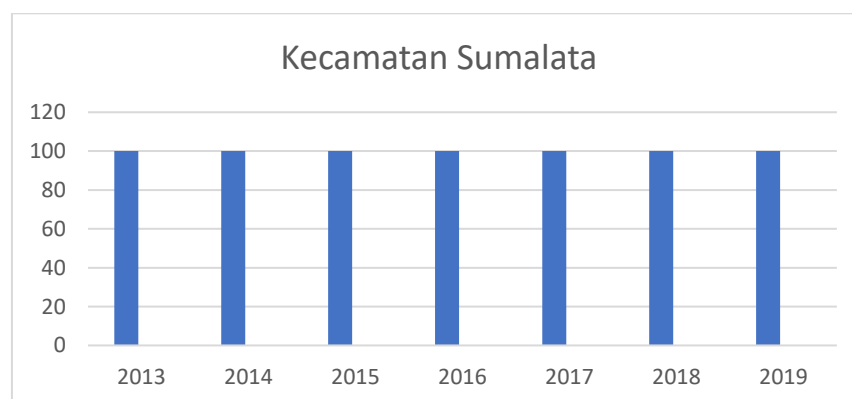
TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS PBB (%)	KRITERIA
2013	100%	Sangat Efektiv
2014	100%	Sangat Efektiv
2015	100%	Sangat Efektiv
2016	100%	Sangat Efektiv
2017	100%	Sangat Efektiv
2018	100%	Sangat Efektiv
2019	100%	Sangat Efektiv

Sumber : Data diolah kembali 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Sumalata, pada tahun 2013 sebesar 100% .kemudian dilanjutkan dengan tahun-tahun berikutnya 2014,2015,2016,2017,2018,2019 juga sama seperti pada tahun 2013 yaitu sebesar 100%, hal itu di sebabkan karena tegasnya peraturan dan tingkat kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB di Kecamatan Sumalata tersebut

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4.2.2.1Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sumalata



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 di kecamatan sumalata sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan karena setiap tahunnya sudah mencapai target 100%.

4.2.2.2 Kecamatan Sumalata Timur

Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bnagunan di Kecamatan Sumalata timur pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 :

$$2013 = \frac{25.308.776}{25.308.776} \times 100\% = 100\%$$

$$\begin{aligned}
 2014 &= \frac{26.114.762}{26.114.762} \times 100\% = 100\% \\
 2015 &= \frac{27.597.083}{27.597.083} \times 100\% = 100\% \\
 2016 &= \frac{32.833.931}{32.833.931} \times 100\% = 100\% \\
 2017 &= \frac{33.028.979}{33.028.979} \times 100\% = 100\% \\
 2018 &= \frac{33.026.419}{33.026.419} \times 100\% = 100\% \\
 2019 &= \frac{35.413.925}{35.413.925} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sumalata, Dapat dilihat pada table di bawah ini

**Tabel 4.2.2.2 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kecamatan Sumalata Timur**

TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS PBB (%)	KRITERIA
2013	100%	Sangat Efektiv
2014	100%	Sangat Efektiv
2015	100%	Sangat Efektiv
2016	100%	Sangat Efektiv
2017	100%	Sangat Efektiv
2018	100%	Sangat Efektiv
2019	100%	Sangat Efektiv

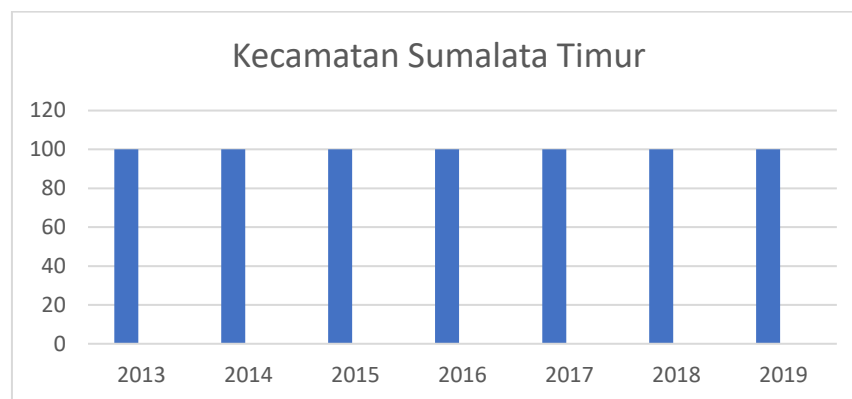
Sumber : Data diolah kembali 2020.

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Sumalata Timur, pada tahun 2013 sebesar 100% .kemudian dilanjutkan dengan tahun-tahun berikutnya 2014,2015,2016,2017,2018,2019 juga sama halnya pada tahun 2013 yaitu sebesar 100%. Pada kecamatan Sumalata Timur kita dapat

melihat tingkat pencapaian yang sangat bagus karena pada setiap tahunnya tidak terdapat penurunan.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4.2.2.2 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sumalata Timur



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 di kecamatan sumalata timur sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan karena setiap tahunnya sudah mencapai target 100%.

4.2.2.3 Kecamatan Tolinggula

Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bnagunan di Kecamatan Tolinggula pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019:

$$2013 = \frac{40.248.899}{40.248.899} \times 100\% = 100\%$$

$$2014 = \frac{41.050.792}{41.050.792} \times 100\% = 100\%$$

$$2015 = \frac{43.435.885}{43.435.885} \times 100\% = 100\%$$

$$\begin{aligned}
 2016 &= \frac{46.386.015}{52.153.938} \times 100\% = 88,94\% \\
 2017 &= \frac{52.172.703}{52.172.703} \times 100\% = 100\% \\
 2018 &= \frac{52.145.902}{52.145.902} \times 100\% = 100\% \\
 2019 &= \frac{54.117.439}{55.234.147} \times 100\% = 97\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Tolinggula, Dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 4.2.2.3 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kecamatan Tolinggula**

TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS PBB (%)	KRITERIA
2013	100%	Sangat Efektiv
2014	100%	Sangat Efektiv
2015	100%	Sangat Efektiv
2016	89%	Cukup Efektiv
2017	100%	Sangat Efektiv
2018	100%	Sangat Efektiv
2019	97%	Efektiv

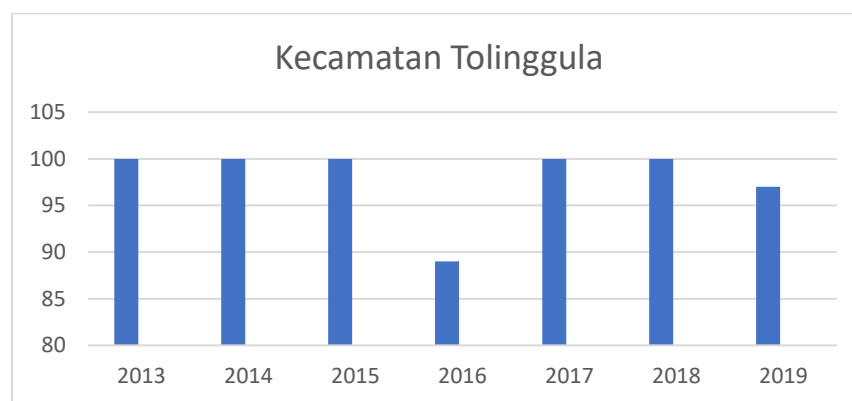
Sumber : Data diolah kembali 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Tolinggula, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar 100% .kemudian dilanjutkan dengan tahun 2016 turun menjadi 89% kemudian pada tahun 2017,2018 dan 2019 juga sama halnya pada tahun 2013 yaitu sebesar 100%. Pada Kecamatan Tolinggula bisa kita lihat pada tahun 2016 terjadi penurunan sekitar 21%itu karena adanya WP baru yang belum membayar PBB nya dan menyebabkan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 hanya mendapatkan 89% tapi itu tidak

berdampak besar pada penerimaan PBB karena pada tahun 2016 ini masih termasuk dalam kriteria Cukup Efektif. Kemudian pada tahun berikutnya pemerintah langsung bertindak cepat agar di kecamatan Tolinggula tidak terjadi lagi penurunan PBB.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4.2.2.3 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tolinggula



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di kecamatan Tolinggula sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tapi pada tahun 2016 menurun menjadi 89% itu artinya pada tahun 2016 penerimaan PBB jika dilihat dari kriteria efektivitas sudah termasuk dalam kriteria Cukup efektif.

4.2.2.4 Kecamatan Biau

Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Biau pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 :

$$2013 = \frac{34.095.651}{34.095.651} \times 100\% = 100\%$$

$$2014 = \frac{34.594.725}{34.594.725} \times 100\% = 100\%$$

$$\begin{aligned}
 2015 &= \frac{34.530.430}{34.530.430} \times 100\% = 100\% \\
 2016 &= \frac{15.625.147}{40.275.998} \times 100\% = 39\% \\
 2017 &= \frac{40.255.646}{40.255.646} \times 100\% = 100\% \\
 2018 &= \frac{40.244.967}{40.244.967} \times 100\% = 100\% \\
 2019 &= \frac{49.033.147}{49.033.147} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Biau, Dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 4.2.2.4 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kecamatan Biau**

TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS PBB (%)	KRITERIA
2013	100%	Sangat Efektif
2014	100%	Sangat Efektif
2015	100%	Sangat Efektif
2016	39%	Tidak Efektif
2017	100%	Sangat Efektif
2018	100%	Sangat Efektif
2019	100%	Sangat Efektif

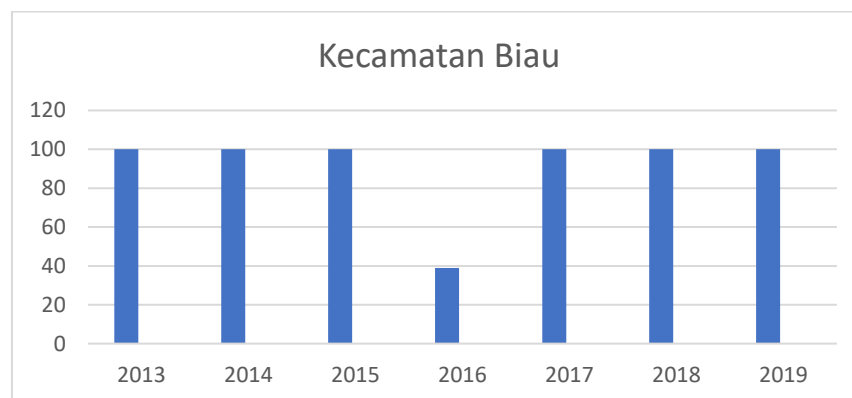
Sumber : Data diolah kembali 2020.

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Biau, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar 100% .kemudian dilanjutkan dengan tahun 2016 turun menjadi 39% kemudian pada tahun 2017,2018dan 2019 juga sama halnya pada tahun 2013 yaitu sebesar 100%. Terjadinya penurunan pada tahun 2016 di kecamatan Biau hingga mencapai 39% diakibatkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB karna

kurangnya pengetahuan tentang PBB dan factor lain yang menyebabkan PBB pada tahun 2016 tidak efektif di Kecamatan Biau karena adanya beberapa desa yang belum terpenuhi pembayaran PBBnya tetapi pada tahun berikutnya pemerintah kabupaten memberikan sanksi pada desa-desa yang belum melakukan pelunasan PBB di Kecamatan Biau dalam bentuk surat peringatan dan harus sudah di lunasi di tahun berikutnya.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4.2.2.4 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Biau



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di kecamatan Biau sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, tapi pada tahun 2016 menurun menjadi 40% itu artinya pada tahun 2016 penerimaan PBB tidak efektif.

4.2.2.5 Kecamatan Kwandang

Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kwandang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 :

$$2013 = \frac{11.920.007}{167.706.858} \times 100\% = 72\%$$

$$\begin{aligned}
 2014 &= \frac{157.577.942}{169.467.927} \times 100\% = 93\% \\
 2015 &= \frac{189.322.067}{191.751.522} \times 100\% = 99\% \\
 2016 &= \frac{202.798.088}{203.549.288} \times 100\% = 99\% \\
 2017 &= \frac{201.324.152}{201.846.152} \times 100\% = 99\% \\
 2018 &= \frac{200.709.852}{201.141.046} \times 100\% = 99\% \\
 2019 &= \frac{200.940.358}{203.873.594} \times 100\% = 98\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Kwandang, Dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 4.2.2.5 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kecamatan Kwandang**

TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS PBB (%)	KRITERIA
2013	71%	Kurang Efektif
2014	93%	Efektif
2015	99%	Efektif
2016	99%	Efektif
2017	99%	Efektif
2018	99%	Efektif
2019	98%	Efektif

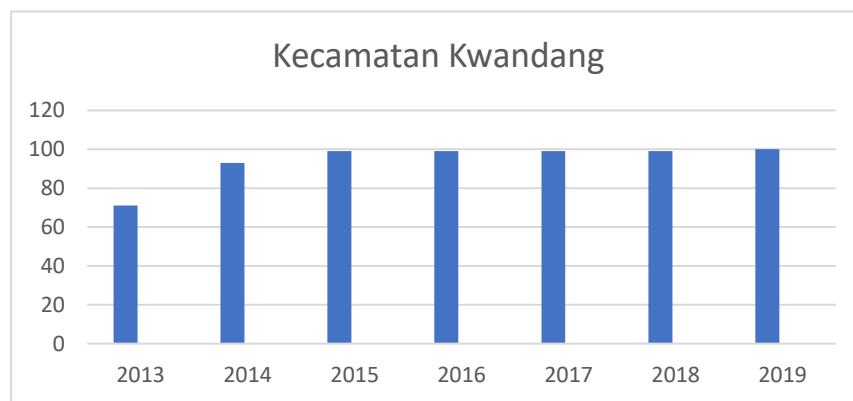
Sumber : Data diolah kembali 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Kwandang, dari tahun 2013 sebesar 71% mendapatkan kriteria kurang efektif .kemudian dilanjutkan dengan tahun 2014 naik menjadi 93% kemudian pada tahun 2015,2016,2017,2018,2019 dan juga naik lagi sebesar 99% Keudian turun lagi

menjadi 98% dengan presentase penurunan 1% . Pada kecamatan Kwandang tahun 2013 di temukan kurang efektif dalam penerimaan PBBnya itu terjadi karena ada beberapa desa juga yang belum melunasi PBBserta adanya para WP baru yang masih kurang mengetahui tentang apa yang harus WPlakukan pada saat itu sehingga pada tahun berikutnya pemerintah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat ke desa-desa tentang PBB dan WP ini sehingga pada tahun berikutnya semua sudah efektif.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4.2.2.5 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kwandang



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 di kecamatan Kwandang sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan karna terjadi peningkatan setiap tahunnya berarti sudah efektif.

4.2.2.6 Kecamatan Tomilito

Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bnagunan di Kecamatan Tomilito pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 :

$$2013 = \frac{43.377.254}{52.426.549} \times 100\% = 83\%$$

$$2014 = \frac{54.154.581}{54.154.581} \times 100\% = 100\%$$

$$\begin{aligned}
 2015 &= \frac{52.596.096}{55.596.096} \times 100\% = 97\% \\
 2016 &= \frac{58.077.943}{60.797.309} \times 100\% = 98\% \\
 2017 &= \frac{59.311.527}{61.257.720} \times 100\% = 97\% \\
 2018 &= \frac{61.937.636}{63.928.465} \times 100\% = 97\% \\
 2019 &= \frac{63.710.821}{64.937.415} \times 100\% = 98\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Tomilito, Dapat dilihat pada table di bawah ini

**Tabel 4.2.2.6 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kecamatan Tomilito**

TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS PBB (%)	KRITERIA
2013	83%	Cukup Efektiv
2014	100%	Sangat Efektiv
2015	97%	Efektiv
2016	98%	Efektiv
2017	97%	Efektiv
2018	97%	Efektiv
2019	98%	Efektif

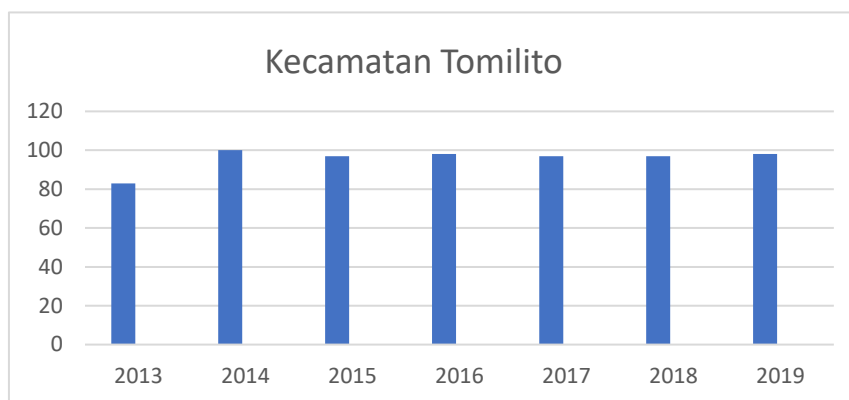
Sumber : Data diolah kembali 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Tomilito, dari tahun 2013 sebesar 83% .kemudian dilanjutkan dengan tahun 2014 naik menjadi 100% kemudian pada tahun 2015, 2017,dan 2018 menurun menjadi 97% dan naik kembali menjadi 98% kemudian 2016 naik lagi sebesar 98%. Sama hal nya dengan kecamatan sebelumnya terjadinya naik turun kriteria efektivitas di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan adanya para WP baru di

kecamatan itu yang belum mengetahui peraturan PBB tapi hal tersebut tidak berpengaruh dalam kriteria karena mendapatkan hasil cukup, sangat, dan efektif semuanya mendapatkan kriteria yang bagus.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4.2.2.6 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tomilito



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 mencapai 83% kemudian meningkat lagi 2014 menjadi 100% dengan tahun 2015, 2017, dan 2018 turun menjadi 97% dan 2018 meningkat kembali menjadi 98% kecamatan Tomilito sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan karena terjadi peningkatan setiap tahunnya sudah efektif.

4.2.2.7 Kecamatan Ponelo Kepulauan

Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bnagunan di Kecamatan Ponelo Kepulauan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 :

$$\begin{aligned}
 2013 &= \frac{5.848.446}{5.848.446} \times 100\% = 100\% \\
 2014 &= \frac{6.238.380}{6.238.380} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2015 &= \frac{6.830.808}{6.830.808} \times 100\% = 100\% \\
 2016 &= \frac{15.239.169}{15.239.169} \times 100\% = 100\% \\
 2017 &= \frac{15.207.586}{15.207.586} \times 100\% = 100\% \\
 2018 &= \frac{15.144.387}{15.144.387} \times 100\% = 100\% \\
 2019 &= \frac{16.813.571}{16.813.571} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 4.2.2.7 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kecamatan Ponelo Kepulauan**

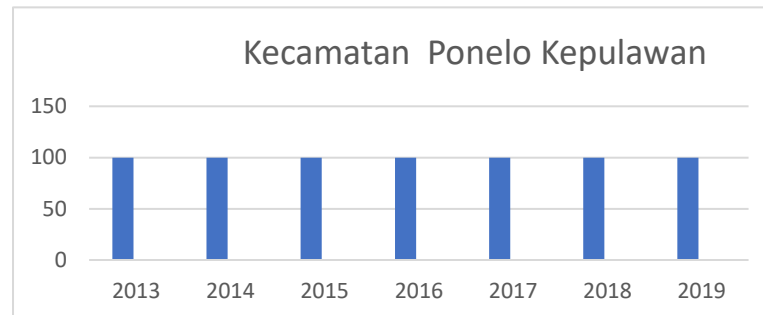
TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS PBB (%)	KRITERIA
2013	100%	Sangat Efektif
2014	100%	Sangat Efektif
2015	100%	Sangat Efektif
2016	100%	Sangat Efektif
2017	100%	Sangat Efektif
2018	100%	Sangat Efektif
2019	100%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah kembali 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Ponelo Kepulauan, dari tahun 2013 sampai dengan 2019 mncapai 100% itu artinya penerimaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mencapai target 100%.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini

Grafik 4.2.2.7 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Ponelo Kepulauan



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 di kecamatan Ponelo Kepulauan sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan karna setiap tahunnya mencapai 100% berarti sudah efektif.

4.2.2.8 Kecamatan Anggrek

Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bnagunan di Kecamatan Anggrek pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 :

$$\begin{aligned}
 2013 &= \frac{36.240.938}{85.036.954} \times 100\% = 43\% \\
 2014 &= \frac{86.818.441}{86.818.441} \times 100\% = 100\% \\
 2015 &= \frac{86.679.060}{91.033.940} \times 100\% = 95\% \\
 2016 &= \frac{100.559.431}{100.559.431} \times 100\% = 100\% \\
 2017 &= \frac{136.994.470}{136.994.470} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

$$2018 = \frac{128.380.844}{136.660.61} \times 100\% = 94\%$$

$$2019 = \frac{120.457.101}{140.794.101} \times 100\% = 85\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Anggrek, Dapat dilihat pada table di bawah ini

**Tabel 4.2.2.8 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kecamatan Anggrek**

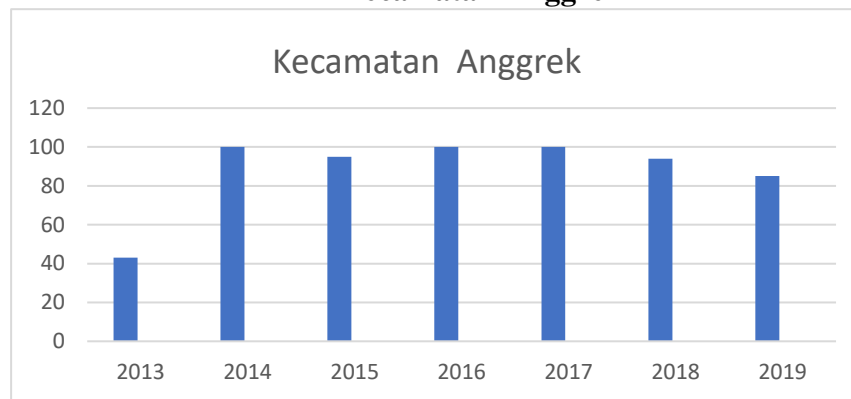
TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS PBB (%)	KRITERIA
2013	43%	Tidak Efektiv
2014	100%	Sangat Efektiv
2015	95%	Efektiv
2016	100%	Efektiv
2017	100%	Efektiv
2018	94%	Efektiv
2019	89%	Efektif

Sumber : Data diolah kembali 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Anggrek, dari tahun 2013 mendapatkan 43% .kemudian dilanjutkan dengan tahun 2014 naik menjadi 100% kemudian pada tahun 2015 turun sebesar 5% menjadi 95% tahun 2016,2017 naik sebesar 100% dan 2018 turun 3%jadi mendapatkan nilai sebesar 94%. Kemudian 2019 turun lagi menjasi 89%Pada tahu 2013 penerimaan PBB tidak mencapai target karena masih kurangnya kesadaran WP di setiap desaserta kurangnya pemberitahuan pemerintah ke masyarakat atau para WP baru hingga tidak dapat memenuhi tingkat kriteria efektivitas karena tidak efektiv.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

Grafik 4.2.2.8 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Anggrek



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 di kecamatan Anggrek sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan karna terjadi peningkatan setiap tahunnya tapi turun di tahun 2013 mencapai 43% .

4.2.2.9 Kecamatan Monano

Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bnagunan di Kecamatan Monano pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 :

$$2013 = \frac{39.011.123}{39.011.123} \times 100\% = 100\%$$

$$2014 = \frac{40.201.913}{40.201.913} \times 100\% = 100\%$$

$$2015 = \frac{42.370.551}{42.370.551} \times 100\% = 100\%$$

$$2016 = \frac{48.314.324}{48.314.324} \times 100\% = 100\%$$

$$2017 = \frac{48.343.830}{48.343.830} \times 100\% = 100\%$$

$$2018 = \frac{49.457.965}{49.457.965} \times 100\% = 100\%$$

$$2019 = \frac{120.457.101}{140.794.101} \times 100\% = 85\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Monano , Dapat dilihat pada table di bawah ini

**Tabel 4.2.2.9 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kecamatan Monano**

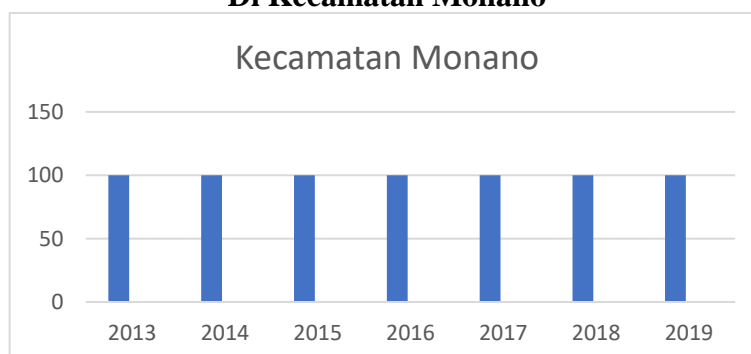
TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS PBB (%)	KRITERIA
2013	100%	Sangat Efektif
2014	100%	Sangat Efektif
2015	100%	Sangat Efektif
2016	100%	Sangat Efektif
2017	100%	Sangat Efektif
2018	100%	Sangat Efektif
2019	100%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah kembali 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Kwandang, dari tahun 2013 sampai dengan 2019 mencapai 100% .dan memenuhi kriteria efektivitas karna bias mencapai target 100%

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

**Grafik 4.2.2.9Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan
Di Kecamatan Monano**



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 di kecamatan Monano sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan karna terjadi peningkatan setiap tahunnya berarti sudah efektif.

4.2.2.10 Kecamatan Atinggola

Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bnagunan di Kecamatan Atinggola pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 :

$$\begin{aligned}
 2013 &= \frac{55.910.875}{55.910.875} \times 100\% = 100\% \\
 2014 &= \frac{57.456.020}{57.456.020} \times 100\% = 100\% \\
 2015 &= \frac{61.879.518}{61.879.518} \times 100\% = 100\% \\
 2016 &= \frac{73.711.294}{76.141.294} \times 100\% = 97\% \\
 2017 &= \frac{76.112.837}{76.112.837} \times 100\% = 100\% \\
 2018 &= \frac{76.096.277}{76.096.277} \times 100\% = 100\% \\
 2019 &= \frac{76.983.941}{76.983.941} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Atinggola, Dapat dilihat pada table di bawah ini

**Tabel 4.2.2.10 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kecamatan Atinggola**

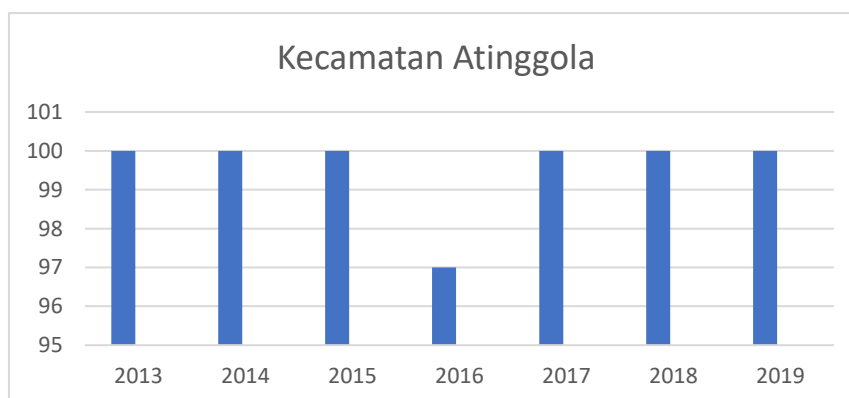
TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS PBB (%)	KRITERIA
2013	100%	Sangat Efektif
2014	100%	Sangat Efektif
2015	100%	Sangat Efektif
2016	97%	Efektif
2017	100%	Sangat Efektif
2018	100%	Sangat Efektif
2019	100%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah kembali 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Atinggola, dari tahun 2013,2014,2015 sebesar 100% .kemudian dilanjutkan dengan tahun 2016 turun menjadi 97% kemudian pada tahun ,2017,2018,2019 juga naik lagi sebesar 100%. Tapi penurunan pada tahun 2016 itu tidak terlalu berdampak buruk dikarenakan masih dalam katagori efektif. Penurunan terjadi karena sebagian para WP tidak membayar hak dan kewajibanya tapi tidak berdampak besar dan tidak terlalu berpengaruh dalam kiteria karna pada tahun 2016 mendapatkan tingkatan efektif.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Atinggola Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

**Grafik 4.10 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan
Di Kecamatan Atinggola**



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 di kecamatan Atinggola sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan karna terjadi peningkatan setiap tahunnya berarti sudah efektif.

4.2.2.11 Kecamatan Gentuma Raya

Berikut perhitungan rasio Efektivitas pajak Bumi dan Bnagunan di Kecamatan Gentuma Raya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 :

$$\begin{aligned}
 2013 &= \frac{50.757.628}{50.757.628} \times 100\% = 100\% \\
 2014 &= \frac{50.731.871}{50.757.628} \times 100\% = 99\% \\
 2015 &= \frac{52.205.369}{52.205.369} \times 100\% = 100\% \\
 2016 &= \frac{58.651.906}{58.651.906} \times 100\% = 100\% \\
 2017 &= \frac{57.029.164}{57.029.164} \times 100\% = 100\% \\
 2018 &= \frac{58.951.370}{58.951.370} \times 100\% = 100\% \\
 2018 &= \frac{58.951.370}{58.951.370} \times 100\% = 100\% \\
 2018 &= \frac{59.521.034}{59.521.034} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka perkembangan rasio efektivitas pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Gentuma Raya, Dapat dilihat pada table di bawah ini

**Tabel 4.11 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kecamatan Gentuma Raya**

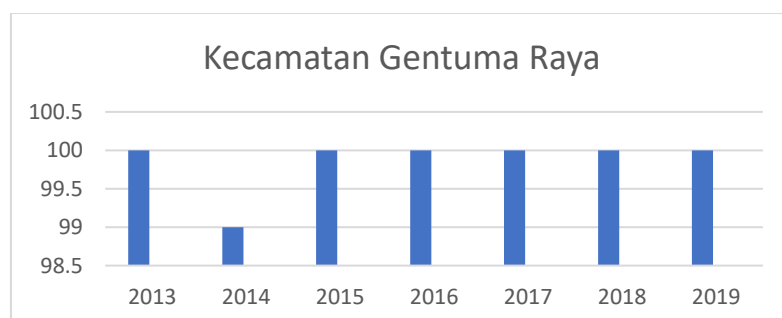
TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS PBB (%)	KRITERIA
2013	100%	Sangat Efektif
2014	99%	Efektif
2015	100%	Sangat Efektif
2016	100%	Sangat Efektif
2017	100%	Sangat Efektif
2018	100%	Sangat Efektif
2019	100%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah kembali 2020

Berdasarkan data perkembangan rasio efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Gentuma Raya, dari tahun 2013 sebesar 100% kemudian dilanjutkan dengan tahun 2014 turun menjadi 99% karena 1% para WP belum pembayar PBBnya kemudian pada tahun 2015,2016,2017,2018,2019 juga naik lagi sebesar 100%. Terjadinya penurunan 1% ini di timbulkan karna adanya WP yang baru dan belum tahu apa kewajiban dan hak mereka, tapi pemerintah langsung bergerak cepat memberikan pemberitahuan secara rinci agar masyarakat dapat tahu hak dan kewajibanya menjadi WP, perubahanya biasa di lihat di tahun-tahun berikutnya menjadi 100%.

Dari uraian di atas, maka rasio efektivitas Pajak Bumi dan bangunan di kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara Dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

**Grafik 4.11 Tingkat efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan
Di Kecamatan Gentuma Raya**



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 di kecamatan Gentuma Raya sudah sangat baik dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan karna terjadi peningkatan setiap tahunnya berarti sudah efektif.

4.2.3 Perhitungan Total Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara

Sebelum Menghitung Total Penerimaan PBB, maka berikut adalah tabel total penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 :

Tabel 4.2.3.1 Total Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
2013	610.919.656	397.287.560
2014	621.776.323	609.976.323
2015	664.039.149	654.409.111
2016	758.903.328	718.584.455
2017	790.730.656	788.230.476
2018	793.386.151	782.684.354
2019	825.515.368	800.205.784

Sumber : Data diolah kembali 2020

$$\text{Rasio Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

$$2013 = \frac{397.287.560}{610.919.656} \times 100\% = 66\%$$

$$2014 = \frac{609.976.323}{621.776.323} \times 100\% = 98\%$$

$$2015 = \frac{654.409.111}{664.039.149} \times 100\% = 99\%$$

$$2016 = \frac{718.584.455}{758.903.328} \times 100\% = 95\%$$

$$2017 = \frac{788.230.476}{790.730.656} \times 100\% = 99\%$$

$$2018 = \frac{782.684.354}{793.386.151} \times 100\% = 99\%$$

$$2019 = \frac{800.205.784}{825.515.368} \times 100\% = 96\%$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka perkembangan Rasio Efektivitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2013 sampai dengan 2019, dapat dilihat di tabel di bawah ini :

**Tabel 4.2.3.2 Kriteria Rasio Efektivitas PBB
Di Kabupaten Gorontalo Utara**

Tahun	Rasio Efektivitas PBB (%)
2013	66%
2014	98%
2015	99%
2016	95%
2017	99%
2018	99%
2019	96%

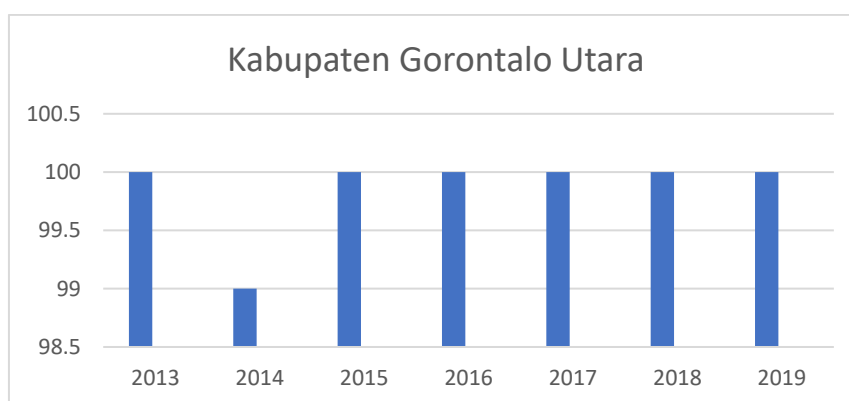
Sumber : Data diolah kembali 2020

Pada tabel di atas kita dapat melihat peningkatan pencapaian Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara di Tahun 2013 mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 66% kemudian di tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 98% di tahun selanjutnya 2015 naik lagi sebesar 99% dan terjadi penurunan 5% pada tahun 2016 sehingga hanya mendapatkan 95% kemudian naik kembali pada tahun 2017 kemudian 2018 sebesar 99% dan yang terakhir 2019 mendapatkan 96%. Terjadinya kurang efektif pada tahun 2013 karena ada kekeliruan data dari pihak KPP pratama tentang piutang yang terbaca di database kemudian dilakukan pemeriksaan dari pihak BPK selama 2 tahun berturut-turut 2014 sampai dengan 2015.

Setelah di selidiki selama 2 tahun berturut-turut Pihak BPK tidak menemukan adanya piutang dari data manual yang ada di pemda gorut karena di data manual PBB yang ada di pemda gorut terbaca lunas dan pihak KPP pratama mengakui kesalahan mereka karena pada saat itu tidak sempat menginput keseluruhan data PBB pada tahun 2013.

Berikut Grafik dari efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun 2013 sampai dengan 2019 :

Grafik 4.12 Tingkat Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Gorontalo Utara Dari tahun 2013 sampai dengan 2019



Untuk lebih jelas, perkembangan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 4.2.3.3 Tingkat Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Gorontalo Utara 2013-2018

Tahun	Realisasi PBB	Target PBB	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
2013	397.287.560	610.919.656	66%	Kurang Efektif
2014	609.976.323	621.776.323	98%	Efektif
2015	654.409.111	664.039.149	99%	Efektif
2016	718.584.455	758.903.328	95%	Efektif
2017	788.230.476	790.730.656	99%	Efektif
2018	782.684.354	793.386.151	99%	Efektif
2019	800.205.784	825.515.368	96%	Efektif

Sumber : Data diolah kembali tahun 2020

Hasil Analisis data tersebut di dukung informasi dan informan. Dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak SP selaku Kasubid Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan PBB bahwa :

“Tidak efektifnya PBB pada tahun 2013 itu di karenakan Kabupaten Gorontalo Utara belum ada kewenangan untuk mengolah data PBB, yang watu itu masih kewenangan Provinsi KPP Pratama Gorontalo. Dan PBB mulai diolah sendiri di kabupaten Gorontalo utara nanti pada tahun 2014.”

Penjelasan tersebut kemudian di sambung oleh Bapak RH selaku Kasuid Penagihan Di kantor DPPKAD :

“Pada saat penyerahan data PBB dari KPP Pratama ke Pemda Gorontalo Utara tahun 2013 itu data yang di berikan kepada kami adalah data sisitem, data system ini terburu-buru di berikan kepada kami pada saat itu karena kaabupaten gorontalo utara mulai berpisah dari kabupaten Gorontalo. Setelah di lihat ternyata database yang berikan oleh KPP Pratama itu terbaca ada piutang sebesar Rp.300.000.000 namun pemda memiliki data sendiri yaitu data manual dari PBB ini. Didata manual pemda ini tidak terbaca adanya piutang karena pembayaran PBB pada tahun 2013 itu lunas hanya di databasenya saja yang terbaca ada piutang. Hal ini menyebabkan kekeliruan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan data selama 2 tahun berturut-turut Itu karena kesalahan dari pihak KPP Pratama tidak sempat melakukan pengimputan dan terlalu terburu-buru memberikan databasenya kepada kami, Kesalahan KPP Pratama itu sudah di akui dari pihak mereka sendiri.”

4.2.4 Analisis Rasio Efisiensi

Sebelum dilakukan perhitungan rasio sehubungan dengan rasio efisiensi, maka berikut ini data-data penerimaan pajak bumi dan bangunan yang di butuhkan dalam perhitungan rasio yang bersumber dari laporan keuangan pada Kabupaten Gorontalo Utara, yang di uraikan dalam table berikut :

**Tabel 4.2.4.1 Biaya Pemungutan PBB
Di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2019**

Tahun	Biaya Pemungutan
2015	Rp.190.731.837
2016	Rp.303.693.596
2017	Rp.494.843.984
2018	Rp.477.101.589
2019	Rp.500.732.021

Sumber :Data diolah kembali tahun 2020

4.2.5 Perhitungan Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi biaya pemungutan pajak Bumi dan Bangunan dapat dihitung melalui rasio di bawah ini :

$$\text{Rasio Efisiensi PBB} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

$$2015 = \frac{190.731.837}{654.409.111} \times 100\% = 29.14\%$$

$$2016 = \frac{303.693.596}{718.584.455} \times 100\% = 42.26\%$$

$$2017 = \frac{494.843.984}{788.230.476} \times 100\% = 62.77\%$$

$$2018 = \frac{477.101.589}{782.684.354} \times 100\% = 60.95\%$$

$$2019 = \frac{500.732.021}{800.205.784} \times 100\% = 62.57\%$$

Berikut Tabel Kriteria tingkat Efisiensi PBB Di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015-2018 :

Tabel 4.2.4.2 Kriteria Efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Gorontalo Utara 2015-2018

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi PBB	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2015	Rp.190.731.837	Rp.654.409.111	29.14%	Sangat Efisien
2016	Rp.303.693.596	Rp.718.584.455	42.26%	Sangat Efisien
2017	Rp.494.843.984	Rp.788.230.476	62.77%	Efisien
2018	Rp.477.101.589	Rp.782.684.354	60.95%	Efisien
2019	Rp.500.732.021	Rp.800.205.784	62.57%	Efisien

er data diolah kembali tahun 2020

Pada table 4.3.4.2 kita dapat melihat berapa biaya pemungutan PBB pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, di table juga di tuliskan berapa nilai realisasi PBB , di sini kita bias melihat dari tingkatan efisiensi dari tahun ke tahun berikutnya.

Di rasio efisiensi berikut ini kita dapat melihat pada tahun 2015 tingkat efisiennya 29.14% itu katakana sangat efisien karena biaya pemungutan yang di keluarkan pada tahun 2015 yaitu 70.86% terpakai dalam pemungutan PBB. Begitu juga seperti pada tahun 2016 yang mencapai kriteria sangat efisien mendapat 42.26% karena biaya yang di gunakan untuk pemungutan PBB pada tahun 2016 yaitu sebesar 58,87% . Kemudian pada tahun 2017 besaran biaya pemungutan yang digunakan dalam pemungutan PBB yaitu senilai 37.23% dan sisa biaya yang tidak di gunakan sebesar 62.77% dengan kriteria PBB mencapai tingkat efisien dan pada tahun 2018

menggunakan biaya pemungutan sebesar 39.05% dengan sisa dana biaya pemungutan sebesar 60.95% dengan kriteria PBB sudah mencapai target efisien dan yang terakhir pada tahun 2019 mendapatkan tingkat efisien sebesar 54.31% mencapai kriteria sangat efisien.

Pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak mencapai kriteria sangat efisien karena pada tahun 2017 dan tahun 2018 biaya pemungutan PBB naik setiap tahunnya sedangkan biaya yang digunakan untuk pemungutan PBB tidak sampai sebesar itu, biaya pemungutan yang mereka gunakan masih sama jumlahnya dengan tahun 2015 dan tahun 2016 tetapi karena setiap tahunnya anggaran naik jadi terbaca di databasenya pemakaian biaya pemungutan PBB hanya sedikit.

Kenapa dikatakan sangat efisien dan efisien, efisien merupakan suatu parameter yang secara teoritis maupun praktis secara umum digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah unit kegiatan ekonomi. Jadi semakin besar jumlah realisasi dibandingkan jumlah biaya pemungutan maka semakin efisien. Biaya pemungutan yang semakin rendah bias jadi karena realisasi retribusi daerah tidak melebihi target yang direncanakan.

4.3 Pembahasan Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang ada sudah sangat efektif. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim : 2014).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eti Rohayati (2017) bahwa tingkat efektifitas penerimaan PBB di Kecamatan Tolangohula selama tiga tahun anggaran yaitu sangat efektif dalam peningkatan PAD yang telah ditargetkan. menurut skala penghitungan yang menunjukkan kriteria sangat efektif, yaitu berada pada persentase $>100\%$ pada tahun anggaran 2015 dan 2016 namun tidak efektif pada tahun anggaran 2014 Hal ini berarti menunjukkan kinerja yang positif bagi Kecamatan Tolangohula dalam meningkatkan PAD yang telah ditargetkan. Kemampuan Kecamatan Tolangohula dalam meraup PAD yang telah ditargetkan menandakan di Kecamatan Tolangohula masih memiliki banyak sumber PAD yang apabila bisa dioptimalkan dengan baik dapat membantu tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Tolangohula..

.Hasil dari perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan pada tabel 4.1 sampai dengan 4.12 yaitu tentang Rasio Efektivitas PBB dari tahun 2013 sampai 2018 di Kabupaten Gorontalo Utara. Pada tahun 2013 terjadi kurangnya tingkat efektivitas yang hanya mencapai 66% itu di karenakan Pajak Bumi Dan Bangunan pada waktu itu belum di olah sendiri oleh kabupaten Gorontalo utara karna pada tahun 2013 itu pajak bumi dan bangunan masih kewenangan provinsi Gorontalo yaitu KPP Pratama.

Kemudian pada tahun berikutnya tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pemerintah Provinsi KPP pratama Gorontalo memberikan kewenangan pada Kabupaten Gorontalo Utara yang pada saat itu masih kabupaten baru, jadi ketersediaan informasi yang memadai, terukur dan jelas pada tahun 2014. Terutama dalam kaitanya dengan penetapan *self-assessment system*, adalah sangat krusial bagi pemangku kepentingan untuk memiliki informasi dasar mengenai potensi Pajak dan bagaimana wajib pajak berperilaku dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam Rasio efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Gorontalo Utara Pada tahun 2014 sebesar 98% kemudian pada tahun 2015 sebesar 99%, selanjutnya pada tahun 2016 sebesar 95%, di lanjut lagi pada tahun 2017 sebesar 99%, dan terakhir pada tahun 2018 sebesar 99%. Itu artinya pemerintah di Kabupaten Gorontalo Utara sangat memperhatikan tingkat pengelolaan PBB di daerahnya terbukti pada tahun 2013 yang datanya tidak masuk dalam kriteria efektivitas para pemerintah di kabupaten Gorontalo utara tidak tinggal diam dan langsung menyelidiki data yang kurang atau kurang efektif, sehingga pada saat itu pihak DPPKAD berkerjasama dengan BPK untuk mencari kekurangan yang terjadi pada tahun 2013. Dan akhirnya pada tahun 2014 pihak KPP Pratama Provinsi Gorontalo mereka mengakui bahwa ada kesalahan pemberian data terhadap DPPKAD di kabupaten Gorontalo utara perihal data yang mereka berikan adalah data mentah dan dana PBB sebagian yang kurang itu belum ter input di database sehingga pada tahun 2013 terbaca ada piutang tapi semua itu sudah di jelaskan oleh pihak KPP Pratama. Bahwa sebenarnya pada tahun 2013 tingkat PBB pada saat itu lunas. Artinya dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Gorontalo Utara pada setiap tahunnya sudah mencapai tingkat efektif karena penagihan atau cara pemungutan PBB sudah sangat baik di kabupaten Gorontalo Utara.

4.4 Pembahasan Rasio Efisiensi

Efisiensi adalah tingkat perbandingan antara masukan (input) dengan hasil (output) yang dicerminkan dalam rasio atau perbandingan diantara keduanya. Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dikatakan tidak efisien. Jadi tinggi rendahnya efisien ditentukan oleh besar kecilnya rasio yang dihasilkan. Rasio Efisiensi PAD, dalam

merealisasikan PAD tentunya dikeluarkan biaya-biaya, hal ini akan menggambarkan kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan yang diimbangi dengan biaya yang memenuhi batas kewajaran (Halim : 2014)

Kemudian dalam Rasio Efisien dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kita ketahui Bersama bahwa Efisien mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara hemat, cepat, selamat dan tepat waktu. Mengharuskan seseorang bekerja secara maksimal tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Pekerjaan efisien sendiri dapat dilakukan dengan mengevaluasi, membuat perbandingan antara masukan dan pengeluaran yang diterima. Efisien berarti mencari cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan.

Pada tahun 2015 Tingkat efisien Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 29.14% termasuk dalam tingkat sangat efisien karena sebagian besar biaya pemungutan digunakan dalam proses pemungutan pajak Bumi dan bangunan, kemudian pada tahun 2016 mencapai 42.26% masih termasuk dalam tingkatan sangat efisien karena penggunaan biaya Pemungutan sebesar 58.74%, selanjutnya pada tahun 2017 mencapai 62,77% dan masih masuk dalam tingkatan efisien karena masih menggunakan biaya pemungutan setidaknya kurang lebih 40% dan yang terakhir pada tahun 2018 mencapai 60,95% sama halnya pada tahun 2017 masih masuk dalam tingkatan efisien karena masih menggunakan biaya pemungutan kurang lebih 40%.

Jadi pada Kabupaten Gorontalo Utara penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 termasuk dalam kategori sangat efisien dan efisien karena penggunaan biaya PBB pada setiap tahunnya terpakai dengan baik sesuai dengan realisasi PBB.

Berikut ini Tabel hasil dari Efektivitas dan Efisiensi PBB di kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2015-2019 :

Tabel 4.4 Hasil Efektivitas dan efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013-2019 :

NO	TAHUN	TINGKAT EFEKTIVITAS		TINGKAT EVISIENSI	
		Persen %	Kriteria	Persen %	Kriteria
1	2013	66%	Kurang Efektif	-	-
2	2014	98%	Eektiv	-	-
3	2015	99%	Eektiv	29.14%	Sangat Efisien
4	2016	95%	Eektiv	42.26%	Sangat Efisien
5	2017	99%	Eektiv	62.77%	Efisien
6	2018	99%	Eektiv	60.95%	Efisien
7	2019	96%	Efektiv	62.57%	Efisien

Di tabel ini kita dapat melihat hasil dari kesimpulan Rasio efektivitas dan evisiensi Pajak Bumi Dan bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Pada tabel ini kita lihat dari tahun 2013 mendapat nilai tingkat kriteria efektivitas sekitar 66% yaitu Kurang efektif di karenakan ada kesalah pahaman dari pihak KPP Pratama Provinsi Gorontalo dalam Pemberian data , kemudian kita lanjut pada tahun 2014 tingkat efektivitasnya naik dan mencapai 98% termasuk dalam kriteria efektif, tahun 2015 mencapai 99% dengan kriteria efektivitas sebesar 99% dan tingkat efisiensi mencapai 29,14% dengan kriteria Sangat efisien, selanjutnya pada tahun 2016 mendapat nilai efektivitas sebesar 95% dengan kriteria Efektif serta tingkat efisiensi sebesar 42.26% dengan kriteria sangat efisien, pada tahun 2017 mendapat tingkat efektivitas sebesar 99% dan tingkat efisien sebesar 62,77% dengan kriterian Efisien , pada tahun 2018 mendapatkan nilai efektivitas sebesar 99% dengan kriteria Efektif serta nilai tingkatan efisiensi sebesar 60,95% dengan kriteria Efisien, kemudian yang terakhir yaitu pada tahun 2019 mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 96% dan termasuk dalam katagori Efektif ,serta tingkat efisiensi mendapatkan nilai sebesar 62,57%w



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya maka di simpulkan sebagai berikut :

1. Rasio efektivitas pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Gorontalo Utara

Pada tahun 2013 mencapai 66% yang termasuk dalam katagori Kurang efektif karena masih kurangnya ketegasan pada tahun tersebut tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan masih di naungi dan di wenanggi oleh pihak KPP Pratama provinsi Gorontalo, bukan hanya itu alasan ke tidak lunasan PBB pada tahun 2013 itu di karenakan kesalahan pemberian data dari pihak KPP Pratama Provinsi Gorontalo pada Pmerintah Kabupaten Gorontalo Utara sehingga database membaca bahwa Kabupaten Gorontalo Utara masih memiliki piutaang pada tahun 2013,tapi pemerintah di Kabupaten Gorontalo Utara tidak tinggal diam akan hal itu, mereka langsung memeriksa apa yang salah sehingga minumbulkan piutang padahal pada tahun 2013 PBB di Kabupaten Gorontalo Utara Lunas.

Setelah diselidiki pada tahun 2014 ternyata ada kesalahan dari pihak KPP Pratama yang memberikan data mentah atau sebagian besar pembayaran PBB pada tahun 2013 belum terinput pada databasenya,sehingga di data sebelumnya masih terbaca adanya piutang. Tapi Pihak KPP Pratama Provinsi Gorontalo telah mengkui kesalahanya tersebut di karenakan kelalaian mereka sendiri . selanjutnya tahun 2014 sebesar 98% kemudian pada tahun 2015 sebesar 99%, selanjutnya pada tahun 2016 sebesar 95%,di lanjut lagi pada tahun tahun 2017 sebesar 99%, dan terahir pada tahun 2018 sebesar 99%. Artinya dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Gorontalo Utara pada setiap tahunnya sudah mencapai tingkat efektif

karena penagihan atau cara pemungutan PBB sudah sangat baik di kabupaten Gorontalo Utara.

2. Rasio Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pada tahun 2015 Tingkat efisien Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 29.14% termasuk dalam tingkat sangat efisien karena sebagian besar biaya pemungutan di gunakan dalam proses pemungutan pajak Bumi dan bangunan , kemudian pada tahun 2016 mencapai 42.26% masih termasuk dalam tingkatan sangat efisien karena penggunaan biaya Pemungutan sebesar 58.74%, selanjutnya pada tahun 2017 mencapai 62,77% dan masih masuk dalam tingkatan efisien karna masih menggunakan biaya pemungutan setidaknya kurang lebih 40% dan yang terakhir pada tahun 2018 mencapai 60,95% masih masuk dalam tingkatan efisien karna masih menggunakan biaya pemungutan setidaknya kurang lebih 40%.

5.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara harus dapat lebih tegas dalam menetapkan target PAD agar setiap tahunnya target PAD tersebut dapat terus meningkat sehingga kinerja pemerintah dapat lebih baik lagi dalam mencapai target PAD tersebut. Dengan semakin meningkatnya PAD yang didapat oleh suatu daerah terlebih dapat melampaui target yang dicapai, membuktikan kinerja Pemda Kabupaten Gorontalo Utara sudah sangat efektif, apalagi apabila target dari penerimaan PAD tersebut dapat meningkat setiap tahunnya.
2. Lebih meningkatkan sosialisasi tentang pemungutan Pajak terutama Pajak Bumi Dan Bangunan setiap tahunnya kepada masyarakat di tiap desa dan kecamatan agar para WP tau hak dan kewajibanya.
3. Kemudian diharapkan kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten dapat mempertahankan kinerja dalam pemungutan, pengimputan, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) agar tetap sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Dan yang terakhir Penulis harap peran pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memberikan reward kepada setiap Kabupaten yang telah mencapai target penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) agar kedepanya tidak hanya Kabupaten Gorontalo Utara saja yang dapat Mencapai targret, tapi juga Kabupaten-kabupaten lain yang ada di Gorontalo maupun di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina,Rima.2012. "Analisis Efektivitas Dan Kotribusi Pajak Bumi Danm Bangunan Terhadap pendapatan daerah di kabupaten gersik".Universitas Surabaya.
- Diana.2013. "Konsep dasar Perpajakan" . Refika Apditama.Bandung
- Eti Rohayati.2017. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tolangohula"
- Halim.2014. "Analisis Efisiensi,Efektivitas dan Kotribusi Daerah "
- Mardiasmo.2004. "Otonmi dan Manajemen Keuangan Daerah". Yogyakarta
- Mardiasmo.2009. "Perpajakn Edisi Revisi 2009" . Andi Yogyakarta.Yogyakarta
- Mardiasmo.2011. "Perpajakan Edisi Revisi" .Andi Yogyakarta.Yogyakarta
- Mardiasmo.2016. " Perpajakan".Andi Bandung.Bandung
- Nurlan dsarise.2009. "Pengelolaan Keuangan daerah" .rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 pembedagri.Gorontalo
- Puspitasari.2014. "Mekanisme pelaksanaan Pajak Bumi dan Banguan pada PT.Perkebunana Nusantara X persero".Kertosari Jember
- Rahman,hartina.2005. "Pajak dan Retribusi Daerah". Penerbit PT.Raja Grafindo Persada Jakarta. Jakarta
- Resmi.2014. "Perpajakan : Teori dan Kasus". Edisi 6.jakarta selemba Empat. Jakarta
- Sudirman dan Amirudin.2012. "Perpajakan" .Empat Dua Mulia Malang. Malang.
- Smeeths.2013. "De Economische Pajak Bumi dan Bngunan". Jerman
- Suandy.2015. "Hukum Pajak" . Edisi S.jakarta. Selemba empat.
- Sumena O.Polii (2018). "*Analisis efektivitas dan penerimaan pajak bumi dan bangunan*".
- Sugiono (2010).Metode Penelitian Bisnis .Edisi Lima.Bandung : Alfabeta. "*Tentang metode deskriptif*".
- Trie (2006), "*Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan*".

Tendiri Esse (2012). *"Peningkatan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan hasil daerah"*.

_____ Undang-undang No.28 Tahun (2009) *"Tentang pajak dan Kotribusi daerah"*.

_____ Undang-undang No.12 Tahun (1985) *"Tentang pajak bumi dan bangunan"*.
(Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia).

_____ Undang-undang No.22 Tahun (1999) *"Tentang efektivitas peneyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat"*.

_____ Undang-undang No.32 Tahun (2004) *"Tentang pemerintah daerah"*.

_____ Undang-undang No.11 Tahun (2007) *"Tentang pembentukan daerah otonomi baru pada kabupaten Gorontalo Utara"*.

_____ Undang-undang No.2 Tahun (2011) *"Pajak Deerah"*.

_____ Undang-undang No.6 Tahun (1983) dan diperbarui menjadi Undang-undang No.16 Tahun (2009). *"Tentang perpajakan dan ketentuan umum"*.

_____ Undang-undang No.8 Tahun (2015) *"Menyatakan tentang otonomi daerah"*.

_____ Undang-undang No.33 Tahun (2004) "

_____ Undang-undang pasal 1 ayat 1 pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun (2001). *"Pajak daerah dan kotribusi wajib pajak"*.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No.17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8724466, 829975 ; Fax : (0435) 82997
E-mail : lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1435 /PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2019

LAMPIRAN : -

HAL : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Di.-

Kabupaten Gorontalo Utara

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta Kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi, Kepada :

Nama Peneliti : ALFISHARI

NIM : E1116125

Program Studi : AKUNTANSI

Lokasi Penelitian : Badan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH D KABUPATEN GORONTALO UTARA.

Atas Kebijakan dan Kerja samanya di ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN KEUANGAN

Alamat Jl.Kusnodanupoyo No.050 Telp. (0442) 310050 Fax. 310503 KwandangKode Pos 96252

SURAT KETERANGAN
Nomor : 900/BK-Gorut/147/v/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *SUWARDI PAILAHA, SH*
NIP : *197811232010011003*
Jabatan : *KASUBID PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN*

Perihal Rekomendasi Penelitian, Menerangkan bahwa Mahasiswa (i) Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo .maka dengan ini di kami memberikan surat Keterangan Kepada.

Nama : ALFISHARI

NIM : E1116125

Program Studi : Fakultas Ekonomi/ Akuntansi

Judul Penelitian: Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara.

Maka dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

MENGETAHUI
KASUBID PENDAFTARAN, PENDATAAN
DAN PENETAPAN
BADAN KEUANGAN
GORONTALO UTARA
SUWARDI PAILAHA, SH
197811232010011003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0327/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ALFISHARI
NIM : E1116125
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO
UTARA

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 09 Juli 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Ariawan, S.Psi., SE., MM
Sebagai : Pembimbing I
2. Nama : Afriana Lamagio, SE., M.Ak
Sebagai : Pembimbing II

Dengan ini menyatakan bahwa :

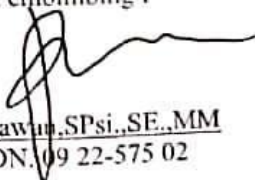
Nama Mahasiswa : ALFISARI
NIM : E1116125
Program Studi : Akuntansi (SI)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO
UTARA

Setelah kami melakukan pengecekan kembali antara softcopy skripsi dari hasil pemeriksaan aplikasi Turnitin dengan hasil Similarity sebesar 34% oleh Tim Verifikasi Plagiasi di Pustikom dengan Skripsi Aslinya, isinya SAMA dan format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi.


Demikian surat pernyataan ini di buat untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.

Gorontalo, Juni 2020

Pembimbing I

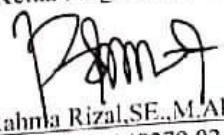

Dr. Ariawan, S.Psi., SE., MM
NIDN. 09 22-575 02

Pembimbing II


Afriana Lamagio, SE., M.Ak
NIDN. 09 290492 03

Mengetahui

Ketua Program Studi,


Rahma Rizal, SE., M.Ak
NIDN. 09 140279 02

Catatan Perbaikan :

- Penggunaan tanda petik dua tidak wajar
- Penulisan Rumus masih bentuk gambar
- Beberapa Paragraf bentuk gambar
- Beberapa kata tidak lengkap hurufnya/ Beberapa kata digabung tanpa spasi



**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2013**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp).	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	BULOILA	4.362.433	4.362.433	0	4.362.433	100,00	0	LUNAS	
2	KIKIA	2.980.538	2.980.538	0	2.980.538	100,00	0	LUNAS	
3	KASIA	6.213.963	6.213.963	0	6.213.963	100,00	0	LUNAS	
4	TUMBA	6.272.961	6.272.961	0	6.272.961	100,00	0	LUNAS	
5	LELATO	3.504.587	3.504.587	0	3.504.587	100,00	0	LUNAS	
6	PUNCAK MANDIRI	9.335.139	9.335.139	0	9.335.139	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		32.669.621	32.669.621	0	32.669.621	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	BULONTIO BARAT	5.306.558	5.306.558	0	5.306.558	100,00	0	LUNAS	
2	BULONTIO TIMUR	8.500.927	8.500.927	0	8.500.927	100,00	0	LUNAS	
3	MEBONGO	3.771.926	3.771.926	0	3.771.926	100,00	0	LUNAS	
4	PULAHENTI	1.962.558	1.962.558	0	1.962.558	100,00	0	LUNAS	
5	HUTOKALO	2.356.373	2.356.373	0	2.356.373	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		21.898.342	21.898.342	0	21.898.342	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		54.567.963	54.567.963	0	54.567.963	100,00	0	LUNAS	

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA TIMUR KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2013

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	DEME I	2.881.343	2.881.343	0	2.881.343	100,00	0	0	LUNAS
2	KOLUWOKA	1.946.263	1.946.263	0	1.946.263	100,00	0	0	LUNAS
3	BULUWATU	1.332.453	1.332.453	0	1.332.453	100,00	0	0	LUNAS
4	DULUKAPA	2.350.832	2.350.832	0	2.350.832	100,00	0	0	LUNAS
5	MOTIHELUMO	2.941.990	2.941.990	0	2.941.990	100,00	0	0	LUNAS
6	BUBALANGO	2.956.750	2.956.750	0	2.956.750	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		14.409.631	14.409.631	0	14.409.631	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	DEME II	3.933.974	3.933.974	0	3.933.974	100,00	0	0	LUNAS
2	BULADU	2.591.805	2.591.805	0	2.591.805	100,00	0	0	LUNAS
3	HULAWA	1.785.375	1.785.375	0	1.785.375	100,00	0	0	LUNAS
4	WUBUDU	2.587.991	2.587.991	0	2.587.991	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		10.899.145	10.899.145	0	10.899.145	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		25.308.776	25.308.776	0	25.308.776	100,00	0	0	LUNAS

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOLINGGULA KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2013

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	LIMBATO	2.041.457	2.041.457	0	2.041.457	100,00	0	0	LUNAS
2	PAPUALANGI	6.164.872	6.164.872	0	6.164.872	100,00	0	0	LUNAS
3	TOLINGGULA ULU	3.394.087	3.394.087	0	3.394.087	100,00	0	0	LUNAS
4	TOLITE JAYA	3.114.090	3.114.090	0	3.114.090	100,00	0	0	LUNAS
5	ILOTUNGULA	5.995.221	5.995.221	0	5.995.221	100,00	0	0	LUNAS
6	CEMPAKA PUTIH	1.561.000	1.561.000	0	1.561.000	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		22.270.727	22.270.727	0	22.270.727	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	TOLINGGULA TENGAH	5.955.115	5.955.115	0	5.955.115	100,00	0	0	LUNAS
2	TOLINGGULA PANTAI	6.444.936	6.444.936	0	6.444.936	100,00	0	0	LUNAS
3	MOLANGGA	4.305.127	4.305.127	0	4.305.127	100,00	0	0	LUNAS
4	ILOMANGGA	1.272.994	1.272.994	0	1.272.994	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		17.978.172	17.978.172	0	17.978.172	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		40.248.899	40.248.899	0	40.248.899	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN BIAU KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER2013**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	DIDINGGA	2.853.560	2.853.560	0	2.853.560	100,00	0	LUNAS	
2	SEMBIHINGAN	2.039.173	2.039.173	0	2.039.173	100,00	0	LUNAS	
3	POTANGA	6.010.785	6.010.785	0	6.010.785	100,00	0	LUNAS	
4	BOHULO	3.636.979	3.636.979	0	3.636.979	100,00	0	LUNAS	
5	WINDU	2.826.042	2.826.042	0	2.826.042	100,00	0	LUNAS	
6	TOPI	1.633.030	1.633.030	0	1.633.030	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		18.999.569	18.999.569	0	18.999.569	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	BUALO	2.521.751	2.521.751	0	2.521.751	100,00	0	LUNAS	
2	BIAU	4.437.584	4.437.584	0	4.437.584	100,00	0	LUNAS	
3	OMUTO	6.094.501	6.094.501	0	6.094.501	100,00	0	LUNAS	
4	LUHUTO	2.042.246	2.042.246	0	2.042.246	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		15.096.082	15.096.082	0	15.096.082	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		34.095.651	34.095.651	0	34.095.651	100,00	0	LUNAS	

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2013

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
	-	0	0	0	0	0,00	0	0	-
JUMLAH A		0	0	0	0	0,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	PONTOLO	9.548.924	0	0	0	0,00	9.548.924	0	-
2	MOLINGKAPOTO	8.200.026	0	0	0	0,00	8.200.026	0	-
3	MOOTINELO	11.724.410	0	0	0	0,00	11.724.410	0	-
4	LEBOTO	11.087.700	0	0	0	0,00	11.087.700	0	-
5	BUALEMO	6.989.360	0	0	0	0,00	6.989.360	0	-
6	POSSO	8.655.425	0	0	0	0,00	8.655.425	0	-
7	BULALO	22.562.536	0	0	0	0,00	22.562.536	0	-
8	TITIDU	13.570.961	0	0	0	0,00	13.570.961	0	-
9	MOLUO	13.558.448	0	0	0	0,00	13.558.448	0	-
10	OMBULODATA	7.561.161	0	0	0	0,00	7.561.161	0	-
11	PONTOLO ATAS	3.079.337	0	0	0	0,00	3.079.337	0	-
12	BOTUWOMBATO	1.614.922	1.614.922	0	1.614.922	100,00	0	0	LUNAS
13	MOLINGKAPOTO SELATAN	10.530.606	0	0	0	0,00	10.530.606	0	-
14	BOTUNGOBUNGO	8.480.518	8.480.518	0	8.480.518	100,00	0	0	LUNAS
15	ALATA KARYA	4.657.523	0	0	0	0,00	4.657.523	0	-
16	MASURU	1.962.296	1.824.567	0	1.824.567	92,98	137.729	0	-
17	CISADANE	12.820.517	0	0	0	0,00	12.820.517	0	-
18	KATIALADA	11.102.188	0	0	0	0,00	11.102.188	0	-
JUMLAH B		167.706.858	11.920.007	0	11.920.007	7,11	155.786.851	0	-
JUMLAH TOTAL (A + B)		167.706.858	11.920.007	0	11.920.007	7,11	155.786.851	0	-

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOMILITO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2013**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TANJUNG KARANG	9.049.295	0	0	0	0,00	9.049.295	-	
2	MUTIARA LAUT	1.566.250	1.566.250	0	1.566.250	100,00	0	LUNAS	
3	MOLANTADU	7.304.266	7.304.266	0	7.304.266	100,00	0	LUNAS	
4	HUIDU MELITO	9.322.748	9.322.748	0	9.322.748	100,00	0	LUNAS	
5	BULANGO RAYA	4.262.138	4.262.138	0	4.262.138	100,00	0	LUNAS	
6	LEYAO	1.549.041	1.549.041	0	1.549.041	100,00	0	LUNAS	
7	BUBODE	5.272.195	5.272.195	0	5.272.195	100,00	0	LUNAS	
8	MILANGO	2.849.894	2.849.894	0	2.849.894	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		41.175.827	32.126.532	0	32.126.532	78,02	9.049.295	-	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	DAMBALO	7.482.097	0	7.482.097	7.482.097	100,00	0	LUNAS	
2	JEMBATAN MERAH	3.768.625	3.768.625	0	3.768.625	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		11.250.722	3.768.625	7.482.097	11.250.722	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		52.426.549	35.895.157	7.482.097	43.377.254	82,74	9.049.295	-	

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2013

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	MALAMBE	1.540.495	1.540.495	0	1.540.495	100,00	0	0	LUNAS
2	OTIOLA	1.125.115	1.125.115	0	1.125.115	100,00	0	0	LUNAS
3	TIHONGO	1.332.167	1.332.167	0	1.332.167	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		3.997.777	3.997.777	0	3.997.777	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	PONELO	1.850.669	1.850.669	0	1.850.669	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		1.850.669	1.850.669	0	1.850.669	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		5.848.446	5.848.446	0	5.848.446	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ANGGREK KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2013**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TOLANGO	9.314.007	5.388.167	0	5.388.167	57,85	3.925.840	-	
2	POPALO	8.959.952	0	0	0	0,00	8.959.952	-	
3	TOLONGIO	8.898.214	0	0	0	0,00	8.898.214	-	
4	DUDEPO	5.169.582	0	0	0	0,00	5.169.582	-	
5	MOTILANGO	4.644.651	4.644.651	0	4.644.651	100,00	0	LUNAS	
6	ILOHELUMA	7.095.099	7.095.099	0	7.095.099	100,00	0	LUNAS	
7	HIYALO OYILE	2.202.677	2.202.677	0	2.202.677	100,00	0	LUNAS	
8	PUTIANA	8.921.590	0	0	0	0,00	8.921.590	-	
9	TUTUWOTO	2.689.882	0	0	0	0,00	2.689.882	-	
10	LANGGE	2.029.140	0	0	0	0,00	2.029.140	-	
11	ILODULUNGA	1.864.191	1.864.191	0	1.864.191	100,00	0	LUNAS	
12	HELUMO	3.192.569	3.192.569	0	3.192.569	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		64.981.554	24.387.354	0	24.387.354	37,53	40.594.200	-	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	ILANGATA	8.403.649	667.931	0	667.931	7,95	7.735.718	-	
2	IBARAT	9.995.957	9.529.859	0	9.529.859	95,34	466.098	-	
3	DATAHU	1.655.794	1.655.794	0	1.655.794	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		20.055.400	11.853.584	0	11.853.584	59,10	8.201.816	-	
JUMLAH TOTAL (A + B)		85.036.954	36.240.938	0	36.240.938	42,62	48.796.016	-	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN MONANO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2013**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	GARAPIA	2.325.131	2.325.131	0	2.325.131	100,00	0	LUNAS	
2	JURIATI	3.386.672	3.386.672	0	3.386.672	100,00	0	LUNAS	
3	MONAS	6.308.545	6.308.545	0	6.308.545	100,00	0	LUNAS	
4	SOGU	5.155.957	5.155.957	0	5.155.957	100,00	0	LUNAS	
5	DUNU	2.789.687	2.789.687	0	2.789.687	100,00	0	LUNAS	
6	TOLITEHUYU	2.166.201	2.166.201	0	2.166.201	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		22.132.193	22.132.193	0	22.132.193	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	TUDI	4.448.923	4.448.923	0	4.448.923	100,00	0	LUNAS	
2	MONANO	5.931.059	5.931.059	0	5.931.059	100,00	0	LUNAS	
3	MOKONOWU	3.767.162	3.767.162	0	3.767.162	100,00	0	LUNAS	
4	PILOHULATA	2.731.786	2.731.786	0	2.731.786	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		16.878.930	16.878.930	0	16.878.930	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		39.011.123	39.011.123	0	39.011.123	100,00	0	LUNAS	

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ATINGGOLA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2013

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	IMANA	8.669.354	8.669.354	0	8.669.354	100,00	0	LUNAS	
2	ILOMATA	4.463.881	4.463.881	0	4.463.881	100,00	0	LUNAS	
3	BINTANA	3.141.922	3.141.922	0	3.141.922	100,00	0	LUNAS	
4	MONGGUPO	6.020.940	6.020.940	0	6.020.940	100,00	0	LUNAS	
5	PINONTYONGA	5.358.145	5.358.145	0	5.358.145	100,00	0	LUNAS	
6	BUATA	1.336.987	1.336.987	0	1.336.987	100,00	0	LUNAS	
7	WAPALO	3.148.177	3.148.177	0	3.148.177	100,00	0	LUNAS	
8	ILOHELUMA	2.368.727	2.368.727	0	2.368.727	100,00	0	LUNAS	
9	SIGASO	3.404.488	3.404.488	0	3.404.488	100,00	0	LUNAS	
10	POSONO	2.456.129	2.456.129	0	2.456.129	100,00	0	LUNAS	
11	TOMBULILATO	4.170.349	4.170.349	0	4.170.349	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		44.539.099	44.539.099	0	44.539.099	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	KOTAJIN	4.404.537	4.404.537	0	4.404.537	100,00	0	LUNAS	
2	OLUHUTA	1.684.279	1.684.279	0	1.684.279	100,00	0	LUNAS	
3	KOTAJIN UTARA	5.282.960	5.282.960	0	5.282.960	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		11.371.776	11.371.776	0	11.371.776	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		55.910.875	55.910.875	0	55.910.875	100,00	0	LUNAS	

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN GENTUMA RAYA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2013

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	MOLONGGOTA	8.678.347	8.678.347	0	8.678.347	100,00	0	0	LUNAS
2	DUMOLODO	4.173.898	4.173.898	0	4.173.898	100,00	0	0	LUNAS
3	LANGKE	6.112.970	6.112.970	0	6.112.970	100,00	0	0	LUNAS
4	IPILO	4.609.751	4.609.751	0	4.609.751	100,00	0	0	LUNAS
5	MOTOMINGO	3.428.930	3.428.930	0	3.428.930	100,00	0	0	LUNAS
6	NANATI JAYA	3.280.583	3.280.583	0	3.280.583	100,00	0	0	LUNAS
7	DURIAN	2.838.581	2.838.581	0	2.838.581	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		33.123.060	33.123.060	0	33.123.060	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	GENTUMA	7.286.626	7.286.626	0	7.286.626	100,00	0	0	LUNAS
2	KETAPANG	2.889.985	2.889.985	0	2.889.985	100,00	0	0	LUNAS
3	PASALAE	3.676.592	3.676.592	0	3.676.592	100,00	0	0	LUNAS
4	BOHUSAMI	3.781.365	3.781.365	0	3.781.365	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		17.634.568	17.634.568	0	17.634.568	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		50.757.628	50.757.628	0	50.757.628	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2014**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG		KET
		(Rp)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(Rp)		
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	BULOILA	4.487.031	4.487.031	0	4.487.031	100,00	0	LUNAS	
2	KIKIA	3.155.954	3.155.954	0	3.155.954	100,00	0	LUNAS	
3	KASIA	6.258.197	6.258.197	0	6.258.197	100,00	0	LUNAS	
4	TUMBA	6.307.168	6.307.168	0	6.307.168	100,00	0	LUNAS	
5	LELATO	3.518.020	3.518.020	0	3.518.020	100,00	0	LUNAS	
6	PUNCAK MANDIRI	9.398.337	9.398.337	0	9.398.337	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		33.124.707	33.124.707	0	33.124.707	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	BULONTIO BARAT	5.101.161	5.101.161	0	5.101.161	100,00	0	LUNAS	
2	BULONTIO TIMUR	8.278.053	8.278.053	0	8.278.053	100,00	0	LUNAS	
3	MEBONGO	3.691.614	3.691.614	0	3.691.614	100,00	0	LUNAS	
4	PULAHENTI	2.205.922	2.205.922	0	2.205.922	100,00	0	LUNAS	
5	HUTOKALO	2.545.439	2.545.439	0	2.545.439	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		21.822.189	21.822.189	0	21.822.189	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		54.946.896	54.946.896	0	54.946.896	100,00	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA TIMUR KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2014**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		SID BULAN LALU	BULAN INI	SID BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	DEME I	2.763.558	2.763.558	0	2.763.558	100,00	0	LUNAS	
2	KOLUWOKA	2.096.307	2.096.307	0	2.096.307	100,00	0	LUNAS	
3	BULUWATU	1.438.925	1.438.925	0	1.438.925	100,00	0	LUNAS	
4	DULUKAPA	2.398.282	2.398.282	0	2.398.282	100,00	0	LUNAS	
5	MOTIHELUMO	3.058.682	3.058.682	0	3.058.682	100,00	0	LUNAS	
6	BUBALANGO	2.980.490	2.980.490	0	2.980.490	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		14.736.244	14.736.244	0	14.736.244	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	DEME II	4.074.434	4.074.434	0	4.074.434	100,00	0	LUNAS	
2	BULADU	2.563.510	2.563.510	0	2.563.510	100,00	0	LUNAS	
3	HULAWA	2.117.334	2.117.334	0	2.117.334	100,00	0	LUNAS	
4	WUBUDU	2.623.240	2.623.240	0	2.623.240	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		11.378.518	11.378.518	0	11.378.518	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		26.114.762	26.114.762	0	26.114.762	100,00	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOLINGGULA KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2014**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	LIMBATO	2.101.517	2.101.517	0	2.101.517	100,00	0	LUNAS	
2	PAPUALANGI	6.349.312	6.349.312	0	6.349.312	100,00	0	LUNAS	
3	TOLINGGULA ULU	3.535.736	3.535.736	0	3.535.736	100,00	0	LUNAS	
4	TOLITE JAYA	3.058.324	3.058.324	0	3.058.324	100,00	0	LUNAS	
5	ILOTUNGULA	6.169.750	6.169.750	0	6.169.750	100,00	0	LUNAS	
6	CEMPAKA PUTIH	1.570.000	1.570.000	0	1.570.000	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		22.784.639	22.784.639	0	22.784.639	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	TOLINGGULA TENGAH	5.939.845	5.939.845	0	5.939.845	100,00	0	LUNAS	
2	TOLINGGULA PANTAI	6.550.395	6.550.395	0	6.550.395	100,00	0	LUNAS	
3	MOLANGGA	4.410.450	4.410.450	0	4.410.450	100,00	0	LUNAS	
4	ILOMANGGA	1.365.463	1.365.463	0	1.365.463	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		18.266.153	18.266.153	0	18.266.153	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		41.050.792	41.050.792	0	41.050.792	100,00	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN BIAU KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER2014**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET	
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN										
1	DIDINGGA	2.916.572	2.916.572	0	2.916.572	100,00	0	0	LUNAS	
2	SEMBIHINGAN	2.107.692	2.107.692	0	2.107.692	100,00	0	0	LUNAS	
3	POTANGA	6.088.675	6.088.675	0	6.088.675	100,00	0	0	LUNAS	
4	BOHULO	3.738.669	3.738.669	0	3.738.669	100,00	0	0	LUNAS	
5	WINDU	2.715.739	2.715.739	0	2.715.739	100,00	0	0	LUNAS	
6	TOPI	1.705.478	1.705.478	0	1.705.478	100,00	0	0	LUNAS	
JUMLAH A		19.273.825	19.273.825	0	19.273.825	100,00	0	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN										
1	BUALO	2.624.329	2.624.329	0	2.624.329	100,00	0	0	LUNAS	
2	BIAU	4.467.701	4.467.701	0	4.467.701	100,00	0	0	LUNAS	
3	OMUTO	6.076.252	6.076.252	0	6.076.252	100,00	0	0	LUNAS	
4	LUHUTO	2.152.618	2.152.618	0	2.152.618	100,00	0	0	LUNAS	
JUMLAH B		15.320.900	15.320.900	0	15.320.900	100,00	0	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		34.594.725	34.594.725	0	34.594.725	100,00	0	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2014**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
	-	0	0	0	0	0,00	0	0	-
JUMLAH A		0	0	0	0	0,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	PONTOLO	9.257.004	6.886.478	2.011.181	8.697.659	93,96	559.345		LUNAS
2	MOLINGKAPOTO	8.081.373	7.241.020	0	7.241.020	89,60	840.353		LUNAS
3	MOOTINELO	11.419.512	11.419.512	0	11.419.512	100,00	0		LUNAS
4	LEBOTO	13.501.490	5.954.268	0	5.954.268	44,10	7.547.222		-
5	BUALEMO	6.854.358	2.774.880	4.079.478	6.854.358	100,00	0		LUNAS
6	POSSO	8.377.228	4.578.624	3.798.604	8.377.228	100,00	0		LUNAS
7	BULALO	22.554.395	17.511.501	3.853.917	21.365.418	94,73	1.188.977		-
8	TITIDU	12.976.574	6.811.405	5.466.022	12.277.427	94,61	699.147		-
9	MOLUJO	12.720.424	1.333.210	11.387.214	12.720.424	100,00	0		LUNAS
10	OMBULODATA	7.530.605	5.971.698	1.558.907	7.530.605	100,00	0		LUNAS
11	PONTOLO ATAS	3.014.484	2.440.537	573.947	3.014.484	100,00	0		LUNAS
12	BOTUWOMBATO	1.606.373	1.606.373	0	1.606.373	100,00	0		LUNAS
13	MOLINGKAPOTO SELATAN	10.303.388	10.303.388	0	10.303.388	100,00	0		LUNAS
14	BOTUNGOBUNGO	8.617.807	6.434.288	2.183.519	8.617.807	100,00	0		LUNAS
15	ALATA KARYA	7.758.016	7.656.010	102.006	7.758.016	100,00	0		LUNAS
16	MASURU	2.038.743	1.020.653	1.018.090	2.038.743	100,00	0		LUNAS
17	CISADANE	12.521.732	8.260.003	3.206.743	11.466.746	91,57	1.054.986		-
18	KATIALADA	10.334.466	7.993.675	2.340.791	10.334.466	100,00	0		LUNAS
JUMLAH B		169.467.972	115.997.523	41.580.419	157.577.942	92,98	11.890.030		-
JUMLAH TOTAL (A + B)		169.467.972	115.997.523	41.580.419	157.577.942	92,98	11.890.030		-

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOMILITO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2014**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TANJUNG KARANG	10.427.178	7.615.528	2.811.650	10.427.178	100,00	0	0	LUNAS
2	MUTIARA LAUT	1.648.250	1.648.250	0	1.648.250	100,00	0	0	LUNAS
3	MOLANTADU	7.336.017	6.840.642	495.375	7.336.017	100,00	0	0	LUNAS
4	HUIDU MELITO	9.298.879	6.047.684	3.251.195	9.298.879	100,00	0	0	LUNAS
5	BULANGO RAYA	4.294.220	4.294.220	0	4.294.220	100,00	0	0	LUNAS
6	LEYAO	1.593.017	1.593.017	0	1.593.017	100,00	0	0	LUNAS
7	BUBODE	5.269.537	5.269.537	0	5.269.537	100,00	0	0	LUNAS
8	MILANGO	2.905.888	2.905.888	0	2.905.888	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A			36.214.766	6.558.220	42.772.986	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	DAMBALO	7.705.136	5.310.915	2.394.221	7.705.136	100,00	0	0	LUNAS
2	JEMBATAN MERAH	3.676.459	3.676.459	0	3.676.459	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B			8.987.374	2.394.221	11.381.595	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)			45.202.140	8.952.441	54.154.581	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2014**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	MALAMBE	1.591.201	1.591.201	0	1.591.201	100,00	0	0	LUNAS
2	OTIOLA	1.263.894	1.263.894	0	1.263.894	100,00	0	0	LUNAS
3	TIHONGO	1.434.844	1.434.844	0	1.434.844	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		4.289.939	4.289.939	0	4.289.939	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	PONELO	1.948.441	1.948.441	0	1.948.441	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		1.948.441	1.948.441	0	1.948.441	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		6.238.380	6.238.380	0	6.238.380	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ANGGREK KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2014**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TOLANGO	9.380.720	9.380.720	0	9.380.720	100,00	0	0	LUNAS
2	POPALO	8.908.502	6.425.404	2.483.098	8.908.502	100,00	0	0	LUNAS
3	TOLONGIO	8.927.047	8.927.047	0	8.927.047	100,00	0	0	LUNAS
4	DUDEPO	5.234.640	5.234.640	0	5.234.640	100,00	0	0	LUNAS
5	MOTILANGO	4.732.091	4.732.091	0	4.732.091	100,00	0	0	LUNAS
6	ILOHELUMA	7.270.990	7.270.990	0	7.270.990	100,00	0	0	LUNAS
7	HIYALO OYILE	2.273.876	2.273.876	0	2.273.876	100,00	0	0	LUNAS
8	PUTIANA	8.985.769	5.646.050	3.339.719	8.985.769	100,00	0	0	LUNAS
9	TUTUWOTO	2.723.957	2.723.957	0	2.723.957	100,00	0	0	LUNAS
10	LANGGE	2.069.769	800.024	1.269.745	2.069.769	100,00	0	0	LUNAS
11	ILODULUNGA	1.935.840	1.935.840	0	1.935.840	100,00	0	0	LUNAS
12	HELUMO	3.243.794	3.243.794	0	3.243.794	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		65.686.996	58.594.433	7.092.562	65.686.996	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	ILANGATA	8.799.066	5.478.236	3.320.828	8.799.066	100,00	0	0	LUNAS
2	IBARAT	10.665.231	4.404.941	6.260.290	10.665.231	100,00	0	0	LUNAS
3	DATAHU	1.667.149	1.667.149	0	1.667.149	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		21.131.446	11.550.328	9.581.118	21.131.446	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		86.818.441	70.144.761	16.673.680	86.818.441	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN MONANO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2014**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG		KET
		(Rp)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(Rp)		
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	GARAPIA	2.406.609	2.406.609	0	2.406.609	100,00	0	0	LUNAS
2	JURIATI	3.481.710	3.481.710	0	3.481.710	100,00	0	0	LUNAS
3	MONAS	6.446.168	6.446.168	0	6.446.168	100,00	0	0	LUNAS
4	SOGU	5.228.462	5.228.462	0	5.228.462	100,00	0	0	LUNAS
5	DUNU	2.939.578	2.939.578	0	2.939.578	100,00	0	0	LUNAS
6	TOLITEHUYU	2.240.486	2.240.486	0	2.240.486	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		22.743.013	22.743.013	0	22.743.013	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	TUDI	4.559.929	4.559.929	0	4.559.929	100,00	0	0	LUNAS
2	MONANO	6.191.378	6.191.378	0	6.191.378	100,00	0	0	LUNAS
3	MOKONOWU	3.882.128	3.882.128	0	3.882.128	100,00	0	0	LUNAS
4	PILOHULATA	2.825.465	2.825.465	0	2.825.465	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		17.458.900	17.458.900	0	17.458.900	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		40.201.913	40.201.913	0	40.201.913	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ATINGGOLA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2014**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	IMANA	8.985.500	8.985.500	0	8.985.500	100,00	0	0	LUNAS
2	ILOMATA	4.713.513	4.713.513	0	4.713.513	100,00	0	0	LUNAS
3	BINTANA	3.253.968	3.253.968	0	3.253.968	100,00	0	0	LUNAS
4	MONGGUPO	6.254.498	6.254.498	0	6.254.498	100,00	0	0	LUNAS
5	PINONTYONGA	5.301.127	5.301.127	0	5.301.127	100,00	0	0	LUNAS
6	BUATA	1.450.750	1.450.750	0	1.450.750	100,00	0	0	LUNAS
7	WAPALO	2.734.625	2.734.625	0	2.734.625	100,00	0	0	LUNAS
8	ILOHELUMA	2.484.168	2.484.168	0	2.484.168	100,00	0	0	LUNAS
9	SIGASO	3.616.416	3.616.416	0	3.616.416	100,00	0	0	LUNAS
10	POSONO	2.540.020	2.540.020	0	2.540.020	100,00	0	0	LUNAS
11	TOMBULILATO	4.538.595	4.538.595	0	4.538.595	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		45.873.181	45.873.181	0	45.873.181	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	KOTAJIN	4.148.828	4.148.828	0	4.148.828	100,00	0	0	LUNAS
2	OLUHUTA	1.698.660	1.698.660	0	1.698.660	100,00	0	0	LUNAS
3	KOTAJIN UTARA	5.735.351	5.735.351	0	5.735.351	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		11.582.839	11.582.839	0	11.582.839	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		57.456.020	57.456.020	0	57.456.020	100,00	0	0	LUNAS

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN GENTUMA RAYA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2014

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)		REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
A. SEKTOR PERDESAAN										
1	MOLONGGOTA	8.532.679	8.532.679	0	8.532.679	100,00	0	LUNAS		
2	DUMOLODO	4.599.848	4.599.848	0	4.599.848	100,00	0	LUNAS		
3	LANGKE	6.214.560	6.214.560	0	6.214.560	100,00	0	LUNAS		
4	IPILO	4.772.463	4.772.463	0	4.772.463	100,00	0	LUNAS		
5	MOTOMINGO	3.554.181	3.554.181	0	3.554.181	100,00	0	LUNAS		
6	NANATI JAYA	3.334.241	3.334.241	0	3.334.241	100,00	0	LUNAS		
7	DURIAN	2.929.760	2.929.760	0	2.929.760	100,00	0	LUNAS		
JUMLAH A		33.937.732	33.937.732	0	33.937.732	100,00	0	LUNAS		
B. SEKTOR PERKOTAAN										
1	GENTUMA	6.927.129	6.927.129	0	6.927.129	100,00	0	LUNAS		
2	KETAPANG	2.789.392	2.789.392	0	2.789.392	100,00	0	LUNAS		
3	PASALAE	3.499.639	3.499.639	0	3.499.639	100,00	0	LUNAS		
4	BOHUSAMI	3.577.979	3.577.979	0	3.577.979	100,00	0	LUNAS		
JUMLAH B		16.794.139	16.794.139	0	16.794.139	100,00	0	LUNAS		
JUMLAH TOTAL (A + B)		50.731.871	50.731.871	0	50.731.871	100,00	0	LUNAS		

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2016**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	BULOILA	5.185.627	5.185.627	0	5.185.627	100,00	0	0	LUNAS
2	KIKIA	3.379.555	3.379.555	0	3.379.555	100,00	0	0	LUNAS
3	KASIA	6.434.745	6.434.745	0	6.434.745	100,00	0	0	LUNAS
4	TUMBA	5.747.136	5.747.136	0	5.747.136	100,00	0	0	LUNAS
5	LELATO	3.567.209	3.567.209	0	3.567.209	100,00	0	0	LUNAS
6	PUNCAK MANDIRI	9.486.502	9.486.502	0	9.486.502	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		33.800.774	33.800.774	0	33.800.774	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	BULONTIO BARAT	5.673.499	5.673.499	0	5.673.499	100,00	0	0	LUNAS
2	BULONTIO TIMUR	8.733.921	8.733.921	0	8.733.921	100,00	0	0	LUNAS
3	MEBONGO	3.549.122	3.549.122	0	3.549.122	100,00	0	0	LUNAS
4	PULAHENTI	2.450.000	2.450.000	0	2.450.000	100,00	0	0	LUNAS
5	HUTOKALO	2.754.935	2.754.935	0	2.754.935	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		23.161.477	23.161.477	0	23.161.477	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		56.962.251	56.962.251	0	56.962.251	100,00	0	0	LUNAS

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA TIMUR KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2015

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
	1	DEME I	2.887.704		0	2.887.704	100,00	0	LUNAS
	2	KOLUWOKA	2.261.745	2.261.745	0	2.261.745	100,00	0	LUNAS
	3	BULUWATU	1.562.189	1.562.189	0	1.562.189	100,00	0	LUNAS
	4	DULUKAPA	2.550.314	2.550.314	0	2.550.314	100,00	0	LUNAS
	5	MOTIHELUMO	3.270.694	3.270.694	0	3.270.694	100,00	0	LUNAS
	6	BUBALANGO	3.012.890	3.012.890	0	3.012.890	100,00	0	LUNAS
	JUMLAH A		15.545.536	15.545.536	0	15.545.536	100,00	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
	1	DEME II	4.332.275	4.332.275	0	4.332.275	100,00	0	LUNAS
	2	BULADU	2.696.057	2.696.057	0	2.696.057	100,00	0	LUNAS
	3	HULAWA	2.215.398	2.215.398	0	2.215.398	100,00	0	LUNAS
	4	WUBUDU	2.807.817	2.807.817	0	2.807.817	100,00	0	LUNAS
	JUMLAH B		12.051.547	12.051.547	0	12.051.547	100,00	0	LUNAS
	JUMLAH TOTAL (A + B)		27.597.083	27.597.083	0	27.597.083	100,00	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOLINGGULA KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2015**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG		KET
		(Rp)	SID BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(Rp)		
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	LIMBATO	2.237.417	2.237.417	0	2.237.417	100,00	0	0	LUNAS
2	PAPUALANGI	6.670.899	6.670.899	0	6.670.899	100,00	0	0	LUNAS
3	TOLINGGULA ULU	3.904.576	3.904.576	0	3.904.576	100,00	0	0	LUNAS
4	TOLITE JAYA	3.096.199	3.096.199	0	3.096.199	100,00	0	0	LUNAS
5	ILOTUNGGULA	6.457.150	6.457.150	0	6.457.150	100,00	0	0	LUNAS
6	CEMPAKA PUTIH	1.582.000	1.582.000	0	1.582.000	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		23.948.241	23.948.241	0	23.948.241	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	TOLINGGULA TENGAH	6.327.228	6.327.228	0	6.327.228	100,00	0	0	LUNAS
2	TOLINGGULA PANTAI	6.976.620	6.976.620	0	6.976.620	100,00	0	0	LUNAS
3	MOLANGGA	4.702.928	4.702.928	0	4.702.928	100,00	0	0	LUNAS
4	ILOMANGGA	1.480.868	1.480.868	0	1.480.868	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		19.487.644	19.487.644	0	19.487.644	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		43.435.885	43.435.885	0	43.435.885	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN BIAU KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER2015**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG		KET
		(Rp)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(Rp)		
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	DIDINGGA	3.017.060	3.017.060	0	3.017.060	100,00	0	0	LUNAS
2	SEMBIHINGAN	2.193.696	2.193.696	0	2.193.696	100,00	0	0	LUNAS
3	POTANGA	6.305.648	6.305.648	0	6.305.648	100,00	0	0	LUNAS
4	BOHULO	3.870.528	3.870.528	0	3.870.528	100,00	0	0	LUNAS
5	WINDU	2.811.557	2.811.557	0	2.811.557	100,00	0	0	LUNAS
6	TOPI	1.836.567	1.836.567	0	1.836.567	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		20.035.056	20.035.056	0	20.035.056	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	BUALO	2.791.322	2.791.322	0	2.791.322	100,00	0	0	LUNAS
2	BIAU	4.624.449	4.624.449	0	4.624.449	100,00	0	0	LUNAS
3	OMUTO	4.768.527	4.768.527	0	4.768.527	100,00	0	0	LUNAS
4	LUHUTO	2.311.076	2.311.076	0	2.311.076	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		14.495.374	14.495.374	0	14.495.374	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		34.530.430	34.530.430	0	34.530.430	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2015**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
	-	0	0	0	0	0,00	0	0	-
JUMLAH A		0	0	0	0	0,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	PONTOLO	9.555.224	9.555.224	0	9.555.224	100,00	0	0	LUNAS
2	MOLINGKAPOTO	9.576.031	7.761.938	1.814.093	9.576.031	100,00	0	0	LUNAS
3	MOOTINELO	11.937.849	11.937.849	0	11.937.849	100,00	0	0	LUNAS
4	LEBOTO	13.822.601	8.596.853	5.225.748	13.822.601	100,00	0	0	LUNAS
5	BUALEMO	9.548.642	9.548.642	0	9.548.642	100,00	0	0	LUNAS
6	POSSO	8.608.893	8.608.893	0	8.608.893	100,00	0	0	LUNAS
7	BULALO	23.478.317	17.976.183	5.502.134	23.478.317	100,00	0	0	LUNAS
8	TITIDU	15.180.124	7.291.546	5.458.723	12.750.269	83,99	2.429.855	2.429.855	-
9	MOLUO	14.985.681	11.309.265	3.676.416	14.985.681	100,00	0	0	LUNAS
10	OMBULODATA	8.416.806	8.416.806	0	8.416.806	100,00	0	0	LUNAS
11	PONTOLO ATAS	5.335.762	5.335.762	0	5.335.762	100,00	0	0	LUNAS
12	BOTUWOMBATO	3.575.577	3.575.577	0	3.575.577	100,00	0	0	LUNAS
13	MOLINGKAPOTO SELATAN	10.667.943	8.377.224	2.290.719	10.667.943	100,00	0	0	LUNAS
14	BOTUNGOBUNGO	10.205.370	8.866.635	1.338.735	10.205.370	100,00	0	0	LUNAS
15	ALATA KARYA	8.656.269	8.656.269	0	8.656.269	100,00	0	0	LUNAS
16	MASURU	2.843.768	2.843.768	0	2.843.768	100,00	0	0	LUNAS
17	CISADANE	12.919.536	9.016.848	3.902.688	12.919.536	100,00	0	0	LUNAS
18	KATIALADA	12.437.529	10.707.561	1.729.968	12.437.529	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		191.751.922	158.382.843	30.939.224	189.322.067	98,73	2.429.855	2.429.855	-
JUMLAH TOTAL (A + B)		191.751.922	158.382.843	30.939.224	189.322.067	98,73	2.429.855	2.429.855	-

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOMILITO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2015

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TANJUNG KARANG	10.611.997	5.606.149	5.005.848	10.611.997	100,00	0	0	LUNAS
2	MUTIARA LAUT	1.740.250	1.740.250	0	1.740.250	100,00	0	0	LUNAS
3	MOLANTADU	7.514.347	5.011.301	2.503.046	7.514.347	100,00	0	0	LUNAS
4	HUIDU MELITO	9.471.782	4.599.697	4.189.304	8.789.001	92,79	682.781	0	-
5	BULANGO RAYA	4.383.568	4.383.568	0	4.383.568	100,00	0	0	LUNAS
6	LEYAO	1.663.641	1.663.641	0	1.663.641	100,00	0	0	LUNAS
7	BUBODE	5.415.046	5.415.046	0	5.415.046	100,00	0	0	LUNAS
8	MILANGO	3.026.808	3.026.808	0	3.026.808	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		43.827.439	31.446.460	11.698.198	43.144.658	98,44	682.781	0	-
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	DAMBALO	7.827.880	3.712.012	1.952.948	5.664.960	72,37	2.162.920	0	-
2	JEMBATAN MERAH	3.786.478	3.786.478	0	3.786.478	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		11.614.358	7.498.490	1.952.948	9.451.438	81,38	2.162.920	0	-
JUMLAH TOTAL (A + B)		55.441.797	38.944.950	13.651.146	52.596.096	94,87	2.845.701	0	-

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2015

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	MALAMBE	1.742.999	1.742.999	0	1.742.999	100,00	0	0	LUNAS
2	OTIOLA	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	100,00	0	0	LUNAS
3	TIHENO	1.550.209	1.550.209	0	1.550.209	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		4.693.208	4.693.208	0	4.693.208	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	PONELO	2.137.593	2.137.593	0	2.137.593	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		2.137.593	2.137.593	0	2.137.593	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		6.830.801	6.830.801	0	6.830.801	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ANGGREK KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2015**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TOLANGO	9.743.283	4.555.762	5.187.521	9.743.283	100,00	0	0	LUNAS
2	POPALO	9.131.895	939.273	8.192.622	9.131.895	100,00	0	0	LUNAS
3	TOLONGIO	9.152.395	4.565.894	4.586.501	9.152.395	100,00	0	0	LUNAS
4	DUDEPO	5.489.166	5.489.166	0	5.489.166	100,00	0	0	LUNAS
5	MOTILANGO	5.007.947	5.007.947	0	5.007.947	100,00	0	0	LUNAS
6	ILOHELUMA	7.652.139	7.652.139	0	7.652.139	100,00	0	0	LUNAS
7	HIYALO OYILE	2.372.236	2.372.236	0	2.372.236	100,00	0	0	LUNAS
8	PUTIANA	9.143.394	4.899.722	4.243.672	9.143.394	100,00	0	0	LUNAS
9	TUTUWOTO	2.900.031	2.900.031	0	2.900.031	100,00	0	0	LUNAS
10	LANGGE	2.134.313	0	2.134.313	2.134.313	100,00	0	0	LUNAS
11	ILODULUNGA	2.036.110	2.036.110	0	2.036.110	100,00	0	0	LUNAS
12	HELUMO	3.352.143	3.352.143	0	3.352.143	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		68.115.052	43.770.423	24.344.629	68.115.052	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	ILANGATA	10.426.618	8.653.673	1.772.945	10.426.618	100,00	0	0	LUNAS
2	IBARAT	10.769.335	4.278.422	2.166.033	6.444.455	59,84	4.324.880	-	-
3	DATAHU	1.692.935	1.692.935	0	1.692.935	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		22.888.888	14.625.030	3.938.978	18.564.008	81,10	4.324.880	-	-
JUMLAH TOTAL (A + B)		91.003.940	58.395.453	28.283.607	86.679.060	95,25	4.324.880	-	-

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN MONANO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2015**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN	REALISASI PENERIMAAN				%	SISA POTENSI / KURANG		KET
		(Rp)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	(Rp)				
A. SEKTOR PERDESAAN										
1	GARAPIA	2.511.624	2.511.624	0	2.511.624	100,00	0	0	LUNAS	
2	JURIATI	3.598.181	3.598.181	0	3.598.181	100,00	0	0	LUNAS	
3	MONAS	6.698.416	3.999.153	2.699.263	6.698.416	100,00	0	0	LUNAS	
4	SOGU	5.797.608	5.797.608	0	5.797.608	100,00	0	0	LUNAS	
5	DUNU	3.165.619	3.165.619	0	3.165.619	100,00	0	0	LUNAS	
6	TOLITEHUYU	2.332.078	0	2.332.078	2.332.078	100,00	0	0	LUNAS	
JUMLAH A		24.103.526	19.072.185	5.031.341	24.103.526	100,00	0	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN										
1	TUDI	4.748.438	4.748.438	0	4.748.438	100,00	0	0	LUNAS	
2	MONANO	6.511.332	4.109.022	2.402.310	6.511.332	100,00	0	0	LUNAS	
3	MOKONOWU	4.038.193	4.038.193	0	4.038.193	100,00	0	0	LUNAS	
4	PILOHULATA	2.969.062	2.969.062	0	2.969.062	100,00	0	0	LUNAS	
JUMLAH B		18.267.025	15.864.715	2.402.310	18.267.025	100,00	0	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		42.370.551	34.936.900	7.433.651	42.370.551	100,00	0	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ATINGGOLA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2015**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	IMANA	9.753.029	9.753.029	0	9.753.029	100,00	0	0	LUNAS
2	ILOMATA	5.027.514	5.027.514	0	5.027.514	100,00	0	0	LUNAS
3	BINTANA	3.544.486	3.544.486	0	3.544.486	100,00	0	0	LUNAS
4	MONGGUPO	6.678.916	6.678.916	0	6.678.916	100,00	0	0	LUNAS
5	PINONTOTONGA	5.726.898	5.726.898	0	5.726.898	100,00	0	0	LUNAS
6	BUATA	1.572.750	1.572.750	0	1.572.750	100,00	0	0	LUNAS
7	WAPALO	3.031.375	2.250.375	0	2.250.375	74,24	781.000	0	-
8	ILOHELUMA	2.671.699	2.671.699	0	2.671.699	100,00	0	0	LUNAS
9	SIGASO	3.983.443	3.983.443	0	3.983.443	100,00	0	0	LUNAS
10	POSONO	2.541.784	2.541.784	0	2.541.784	100,00	0	0	LUNAS
11	TOMBULILATO	4.991.460	4.991.460	0	4.991.460	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		49.523.354	48.742.354	0	48.742.354	98,42	781.000		-
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	KOTAJIN	4.330.723	4.330.723	0	4.330.723	100,00	0	0	LUNAS
2	OLUHUTA	1.850.810	1.850.810	0	1.850.810	100,00	0	0	LUNAS
3	KOTAJIN UTARA	6.174.631	6.174.631	0	6.174.631	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		12.356.164	12.356.164	0	12.356.164	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		61.879.518	61.098.518	0	61.098.518	98,74	781.000		-

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN GENTUMA RAYA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2015

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	MOLONGGOTA	8.789.304	7.236.688	1.552.616	8.789.304	100,00	0	0	LUNAS
2	DUMOLODO	4.860.975	4.860.975	0	4.860.975	100,00	0	0	LUNAS
3	LANGKE	6.353.380	4.323.980	2.029.400	6.353.380	100,00	0	0	LUNAS
4	IPILO	5.023.160	3.710.700	1.312.460	5.023.160	100,00	0	0	LUNAS
5	MOTOMINGO	3.722.632	3.722.632	0	3.722.632	100,00	0	0	LUNAS
6	NANATI JAYA	3.477.391	3.477.391	0	3.477.391	100,00	0	0	LUNAS
7	DURIAN	3.042.760	3.042.760	0	3.042.760	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		35.269.602	30.375.126	4.894.476	35.269.602	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	GENTUMA	6.827.409	6.827.409	0	6.827.409	100,00	0	0	LUNAS
2	KETAPANG	2.908.542	2.908.542	0	2.908.542	100,00	0	0	LUNAS
3	PASALAE	3.723.070	3.723.070	0	3.723.070	100,00	0	0	LUNAS
4	BOHUSAMI	3.476.746	3.476.746	0	3.476.746	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		16.935.767	16.935.767	0	16.935.767	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		52.205.369	47.310.893	4.894.476	52.205.369	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2016**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	BULOILA	6.274.471	6.274.471	0	6.274.471	100,00	0	0	LUNAS
2	KIKIA	4.075.855	4.075.855	0	4.075.855	100,00	0	0	LUNAS
3	KASIA	7.099.337	7.099.337	0	7.099.337	100,00	0	0	LUNAS
4	TUMBA	6.656.979	6.656.979	0	6.656.979	100,00	0	0	LUNAS
5	LELATO	3.912.778	3.912.778	0	3.912.778	100,00	0	0	LUNAS
6	PUNCAK MANDIRI	9.791.372	9.791.372	0	9.791.372	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		37.810.792	37.810.792	0	37.810.792	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	BULONTIO BARAT	6.623.282	6.623.282	0	6.623.282	100,00	0	0	LUNAS
2	BULONTIO TIMUR	10.229.516	10.229.516	0	10.229.516	100,00	0	0	LUNAS
3	MEBONGO	5.087.730	5.087.730	0	5.087.730	100,00	0	0	LUNAS
4	PULAHENTI	3.185.000	3.185.000	0	3.185.000	100,00	0	0	LUNAS
5	HUTOKALO	3.450.960	3.450.960	0	3.450.960	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		28.576.488	28.576.488	0	28.576.488	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		66.387.280	66.387.280	0	66.387.280	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA TIMUR KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2016**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG		KET
		(Rp)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(Rp)		
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	DEME I	3.483.502	3.483.502	0	3.483.502	100,00	0	0	LUNAS
2	KOLUWOKA	2.760.245	2.760.245	0	2.760.245	100,00	0	0	LUNAS
3	BULUWATU	1.948.425	1.948.425	0	1.948.425	100,00	0	0	LUNAS
4	DULUKAPA	3.163.546	3.163.546	0	3.163.546	100,00	0	0	LUNAS
5	MOTIHELUMO	3.926.483	3.926.483	0	3.926.483	100,00	0	0	LUNAS
6	BUBALANGO	3.112.140	3.112.140	0	3.112.140	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		18.394.341	18.394.341	0	18.394.341	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	DEME II	5.194.184	5.194.184	0	5.194.184	100,00	0	0	LUNAS
2	BULADU	3.301.092	3.301.092	0	3.301.092	100,00	0	0	LUNAS
3	HULAWA	2.531.578	2.531.578	0	2.531.578	100,00	0	0	LUNAS
4	WUBUDU	3.412.735	3.412.735	0	3.412.735	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		14.439.590	14.439.590	0	14.439.590	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		32.833.931	32.833.931	0	32.833.931	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOLINGGULA KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2016**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	KURANG				
					(Rp)				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	LIMBATO	2.668.600	2.668.600	0	2.668.600	100,00	0	LUNAS	
2	PAPUALANGI	7.780.036	2.012.653	0	2.012.653	25,87	5.767.383	-	
3	TOLINGGULA ULU	4.826.822	4.826.822	0	4.826.822	100,00	0	LUNAS	
4	TOLITE JAYA	3.844.339	3.844.339	0	3.844.339	100,00	0	LUNAS	
5	ILOTUNGULA	7.701.082	7.701.082	0	7.701.082	100,00	0	LUNAS	
6	CEMPAKA PUTIH	1.601.000	1.601.000	0	1.601.000	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		28.421.879	22.654.496	0	22.654.496	79,71	5.767.383	-	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	TOLINGGULA TENGAH	7.740.106	7.740.106	0	7.740.106	100,00	0	LUNAS	
2	TOLINGGULA PANTAI	8.380.873	8.380.873	0	8.380.873	100,00	0	LUNAS	
3	MOLANGGA	5.756.915	5.756.915	0	5.756.915	100,00	0	LUNAS	
4	ILOMANGGA	1.853.625	1.853.625	0	1.853.625	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		23.731.519	23.731.519	0	23.731.519	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		52.153.396	46.386.015	0	46.386.015	88,94	5.767.383	-	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN BIAU KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER2016**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG		KET
		(Rp)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(Rp)		
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	DIDINGGA	3.420.502	3.420.502	0	3.420.502	100,00	0	LUNAS	
2	SEMBIHINGAN	2.466.466	0	0	0	0,00	2.466.466	-	
3	POTANGA	7.027.235	0	3.492.750	3.492.750	49,70	3.534.485	-	
4	BOHULO	4.582.366	0	0	0	0,00	4.582.366	-	
5	WINDU	3.199.384	0	1.477.958	1.477.958	46,20	1.721.426	-	
6	YOPI	2.250.694	0	0	0	0,00	2.250.694	-	
JUMLAH A		22.986.649	3.420.502	4.970.708	8.391.210	36,50	14.595.439	-	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	BUALO	3.335.895	0	1.497.632	1.497.632	44,89	1.838.263	-	
2	BIAU	5.395.466	0	0	0	0,00	5.395.466	-	
3	OMUTO	5.736.332	5.736.332	0	5.736.332	100,00	0	LUNAS	
4	LUHUTO	2.821.656	0	0	0	0,00	2.821.656	-	
JUMLAH B		17.289.349	5.736.332	1.497.632	7.233.964	41,84	10.055.385	-	
JUMLAH TOTAL (A + B)		40.275.998	9.156.834	6.468.340	15.625.174	38,80	24.650.824	-	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2016**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
	-	0	0	0	0	0,00	0	0	-
JUMLAH A		0	0	0	0	0,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	PONTOLO	10.355.293	7.235.176	3.120.117	10.355.293	100,00	0	0	LUNAS
2	MOLINGKAPOTO	10.979.060	8.123.544	2.855.516	10.979.060	100,00	0	0	LUNAS
3	MOOTINELLO	12.039.110	10.149.750	1.889.360	12.039.110	100,00	0	0	LUNAS
4	LEBOTO	14.924.775	4.543.358	10.381.417	14.924.775	100,00	0	0	LUNAS
5	BUALEMO	10.829.414	8.191.109	2.638.305	10.829.414	100,00	0	0	LUNAS
6	POSSO	9.561.684	6.264.900	3.296.784	9.561.684	100,00	0	0	LUNAS
7	BULALO	24.072.764	17.692.748	6.380.016	24.072.764	100,00	0	0	LUNAS
8	TITIDU	16.225.164	8.492.582	7.732.582	16.225.164	100,00	0	0	LUNAS
9	MOLUO	15.159.357	12.272.799	2.135.358	14.408.157	95,04	751.200	0	LUNAS
10	OMBULO DATA	8.848.770	6.415.792	2.432.978	8.848.770	100,00	0	0	LUNAS
11	PONTOLO ATAS	6.304.259	4.869.187	1.435.072	6.304.259	100,00	0	0	LUNAS
12	BOTUWOMBATO	3.867.601	3.867.601	0	3.867.601	100,00	0	0	LUNAS
13	MOLINGKAPOTO SELATAN	11.426.223	10.526.317	899.906	11.426.223	100,00	0	0	LUNAS
14	BOTUNGOBUNGO	10.317.396	8.362.459	1.954.937	10.317.396	100,00	0	0	LUNAS
15	ALATA KARYA	8.936.990	8.341.390	595.600	8.936.990	100,00	0	0	LUNAS
16	MASURU	3.215.571	1.996.771	1.218.800	3.215.571	100,00	0	0	LUNAS
17	CISADANE	13.331.243	7.489.842	5.841.401	13.331.243	100,00	0	0	LUNAS
18	KATIALADA	13.154.614	4.077.178	9.077.436	13.154.614	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		203.549.288	138.912.503	63.885.585	202.798.088	99,63	751.200	0	-
JUMLAH TOTAL (A + B)		203.549.288	138.912.503	63.885.585	202.798.088	99,63	751.200	0	-

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOMILITO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2016**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG		KET
		(Rp)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(Rp)		
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TANJUNG KARANG	11.197.071	8.287.868	1.093.500	9.381.368	83,78	1.815.703	-	
2	MUTIARA LAUT	2.016.500	1.752.500	264.000	2.016.500	100,00	0	LUNAS	
3	MOLANTADU	8.175.517	5.022.274	3.153.243	8.175.517	100,00	0	LUNAS	
4	HUIDU MELITO	10.127.855	4.021.726	6.106.129	10.127.855	100,00	0	LUNAS	
5	BULANGO RAYA	4.771.542	4.771.542	0	4.771.542	100,00	0	LUNAS	
6	LEYAO	1.887.463	1.887.463	0	1.887.463	100,00	0	LUNAS	
7	BUBODE	5.934.587	4.281.712	1.652.875	5.934.587	100,00	0	LUNAS	
8	MILANGO	3.408.301	3.408.301	0	3.408.301	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A			33.433.386	12.269.747	45.703.133	96,18	1.815.703	-	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	DAMBALO	8.775.106	5.049.103	2.822.340	7.871.443	89,70	903.663	-	
2	JEMBATAN MERAH	4.503.367	4.503.367	0	4.503.367	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B			9.552.470	2.822.340	12.374.810	93,19	903.663	-	
JUMLAH TOTAL (A + B)			42.985.856	15.092.087	58.077.943	95,53	2.719.366	-	

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2016

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	MALAMBE	3.540.766	3.540.766	0	0	3.540.766	100,00	0	LUNAS
2	OTIOLA	3.627.858	3.627.858	0	0	3.627.858	100,00	0	LUNAS
3	TIHONGO	4.707.487	4.707.487	0	0	4.707.487	100,00	0	LUNAS
JUMLAH A		11.876.111	11.876.111	0	0	11.876.111	100,00	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	PONELO	3.363.058	3.363.058	0	0	3.363.058	100,00	0	LUNAS
JUMLAH B		3.363.058	3.363.058	0	0	3.363.058	100,00	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		15.239.169	15.239.169	0	0	15.239.169	100,00	0	LUNAS

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ANGGREK KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2016

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TOLANGO	11.425.238	3.462.459	7.962.777	11.425.238	100,00	0	0	LUNAS
2	POPALO	9.606.099	4.305.553	5.300.546	9.606.099	100,00	0	0	LUNAS
3	TOLONGIO	10.011.574	10.011.574	0	10.011.574	100,00	0	0	LUNAS
4	DUDEPO	6.357.707	6.357.707	0	6.357.707	100,00	0	0	LUNAS
5	MOTILANGO	5.496.037	5.496.037	0	5.496.037	100,00	0	0	LUNAS
6	ILOHELUMA	8.609.424	8.609.424	0	8.609.424	100,00	0	0	LUNAS
7	HIYALO OYILE	2.685.962	2.685.962	0	2.685.962	100,00	0	0	LUNAS
8	PUTIANA	9.690.893	6.332.826	3.358.067	9.690.893	100,00	0	0	LUNAS
9	TUTUMOTO	3.288.435	3.288.435	0	3.288.435	100,00	0	0	LUNAS
10	LANGGE	2.385.297	998.281	1.387.016	2.385.297	100,00	0	0	LUNAS
11	ILODULUNGA	2.377.963	2.377.963	0	2.377.963	100,00	0	0	LUNAS
12	HELUMO	3.819.188	3.819.188	0	3.819.188	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A			57.745.409	18.008.406	75.753.815	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	ILANGATA	11.427.144	6.521.823	4.905.321	11.427.144	100,00	0	0	LUNAS
2	IBARAT	11.597.787	6.222.546	5.375.241	11.597.787	100,00	0	0	LUNAS
3	DATAHU	1.780.585	1.780.585	0	1.780.585	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B			14.525.054	10.280.562	24.805.616	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)			72.270.463	28.288.968	100.559.431	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN MONANO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2016**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	GARAPIA	2.871.487	2.871.487	0	2.871.487	100,00	0	LUNAS	
2	JURIATI	4.034.486	4.034.486	0	4.034.486	100,00	0	LUNAS	
3	MONAS	7.547.186	7.547.186	0	7.547.186	100,00	0	LUNAS	
4	SOGU	6.281.036	6.281.036	0	6.281.036	100,00	0	LUNAS	
5	DUNU	3.874.930	3.874.930	0	3.874.930	100,00	0	LUNAS	
6	TOLITERHUYU	2.624.358	2.624.358	0	2.624.358	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		27.233.483	27.233.483	0	27.233.483	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	TUDI	5.399.055	5.399.055	0	5.399.055	100,00	0	LUNAS	
2	MONANO	7.732.647	7.732.647	0	7.732.647	100,00	0	LUNAS	
3	MOKONOWU	4.532.578	4.532.578	0	4.532.578	100,00	0	LUNAS	
4	PILOHULATA	3.416.561	3.416.561	0	3.416.561	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		21.080.841	21.080.841	0	21.080.841	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		48.314.324	48.314.324	0	48.314.324	100,00	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ATINGGOLA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2016**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	IMANA	12.139.038	12.139.038	0	12.139.038	100,00	0	0	LUNAS
2	ILOMATA	5.723.667	5.723.667	0	5.723.667	100,00	0	0	LUNAS
3	BINTANA	4.471.866	3.495.654	976.212	4.471.866	100,00	0	0	LUNAS
4	MONGGUPO	8.340.897	8.340.897	0	8.340.897	100,00	0	0	LUNAS
5	PINONTYONGA	7.053.850	7.053.850	0	7.053.850	100,00	0	0	LUNAS
6	BUATA	1.939.000	1.295.000	644.000	1.939.000	100,00	0	0	LUNAS
7	WAPALO	3.925.000	1.495.000	0	1.495.000	38,09	2.430.000	0	-
8	ILOHELUMA	3.308.218	3.308.218	0	3.308.218	100,00	0	0	LUNAS
9	SIGASO	5.120.608	5.120.608	0	5.120.608	100,00	0	0	LUNAS
10	POSONO	2.909.259	2.909.259	0	2.909.259	100,00	0	0	LUNAS
11	TOMBULILATO	6.381.281	2.491.614	3.889.667	6.381.281	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		61.312.682	53.372.803	5.509.879	58.882.682	96,04	2.430.000	0	-
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	KOTAJIN	4.957.310	4.957.310	0	4.957.310	100,00	0	0	LUNAS
2	OLUHUTA	2.328.157	2.328.157	0	2.328.157	100,00	0	0	LUNAS
3	KOTAJIN UTARA	7.543.145	4.025.048	3.518.096	7.543.145	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		14.828.612	11.310.513	3.518.099	14.828.612	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		76.141.294	64.683.316	9.027.978	73.711.294	96,81	2.430.000	0	-

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN GENTUMA RAYA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2016**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)		REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	SISA POTENSI / KURANG (Rp)					
A. SEKTOR PERDESAAN										
1	MOLONGGOTA	9 654 290	9 654 290	0	9 654 290	100,00	0	LUNAS		
2	DUMOLODO	5 770 073	5 770 073	0	5 770 073	100,00	0	LUNAS		
3	LANGKE	6 908 000	6 908 000	0	6 908 000	100,00	0	LUNAS		
4	IPILO	5 825 963	5 825 963	0	5 825 963	100,00	0	LUNAS		
5	MOTOMINGO	4 359 657	4 359 657	0	4 359 657	100,00	0	LUNAS		
6	NANATI JAYA	3 893 488	3 893 488	0	3 893 488	100,00	0	LUNAS		
7	DURIAN	3 389 340	3 389 340	0	3 389 340	100,00	0	LUNAS		
JUMLAH A		39.800.811	39.800.811	0	39.800.811	100,00	0	LUNAS		
B. SEKTOR PERKOTAAN										
1	GENTUMA	7.136.776	7.136.776	0	7.136.776	100,00	0	LUNAS		
2	KETAPANG	3.370.518	3.370.518	0	3.370.518	100,00	0	LUNAS		
3	PASALAE	4.574.689	4.574.689	0	4.574.689	100,00	0	LUNAS		
4	BOHUSAMI	3.769.112	3.769.112	0	3.769.112	100,00	0	LUNAS		
JUMLAH B		18.851.095	18.851.095	0	18.851.095	100,00	0	LUNAS		
JUMLAH TOTAL (A + B)		58.651.906	58.651.906	0	58.651.906	100,00	0	LUNAS		

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2017**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	BULOILA	6.274.471	6.274.471	0	6.274.471	100,00	0	0	LUNAS
2	KIKIA	4.075.855	4.075.855	0	4.075.855	100,00	0	0	LUNAS
3	KASIA	7.099.337	7.099.337	0	7.099.337	100,00	0	0	LUNAS
4	TUMBA	6.656.979	6.656.979	0	6.656.979	100,00	0	0	LUNAS
5	LELATO	3.912.778	3.912.778	0	3.912.778	100,00	0	0	LUNAS
6	PUNCAK MANDIRI	9.791.372	9.791.372	0	9.791.372	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		37.810.792	37.810.792	0	37.810.792	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	BULONTIO BARAT	6.623.282	6.623.282	0	6.623.282	100,00	0	0	LUNAS
2	BULONTIO TIMUR	10.258.840	10.258.840	0	10.258.840	100,00	0	0	LUNAS
3	MEBONGO	5.086.810	5.086.810	0	5.086.810	100,00	0	0	LUNAS
4	PULAHENTI	3.185.000	3.185.000	0	3.185.000	100,00	0	0	LUNAS
5	HUTOKALO	3.495.050	3.495.050	0	3.495.050	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		28.648.992	28.648.992	0	28.648.992	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		66.459.784	66.459.784	0	66.459.784	100,00	0	0	LUNAS

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA TIMUR KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2017

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	DEME I	3.483.502	3.483.502	0	3.483.502	100,00	0	0	LUNAS
2	KOLUWOKA	2.760.245	2.760.245	0	2.760.245	100,00	0	0	LUNAS
3	BULUWATU	1.948.425	1.948.425	0	1.948.425	100,00	0	0	LUNAS
4	DULUKAPA	3.163.546	3.163.546	0	3.163.546	100,00	0	0	LUNAS
5	MOTIHELIMO	3.926.483	3.926.483	0	3.926.483	100,00	0	0	LUNAS
6	BUBALANGO	3.112.140	3.112.140	0	3.112.140	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		18.394.341	18.394.341	0	18.394.341	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	DEME II	5.190.152	5.190.152	0	5.190.152	100,00	0	0	LUNAS
2	BULADU	3.295.152	3.295.152	0	3.295.152	100,00	0	0	LUNAS
3	HULAWA	2.531.578	2.531.578	0	2.531.578	100,00	0	0	LUNAS
4	WUBUDU	3.617.756	3.617.756	0	3.617.756	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		14.634.638	14.634.638	0	14.634.638	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		33.028.979	33.028.979	0	33.028.979	100,00	0	0	LUNAS

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOLINGGULA KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2017

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	LIMBATO	2.668.600	2.668.600	0	2.668.600	100,00	0	0	LUNAS
2	PAPUALANGI	7.778.788	7.778.788	0	7.778.788	100,00	0	0	LUNAS
3	TOLINGGULA ULU	4.858.208	4.858.208	0	4.858.208	100,00	0	0	LUNAS
4	TOLITE JAYA	3.844.339	3.844.339	0	3.844.339	100,00	0	0	LUNAS
5	ILOTUNGULA	7.701.082	7.701.082	0	7.701.082	100,00	0	0	LUNAS
6	CEMPAKA PUTIH	1.601.000	1.601.000	0	1.601.000	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		28.452.017	28.452.017	0	28.452.017	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	TOLINGGULA TENGAH	7.747.455	7.747.455	0	7.747.455	100,00	0	0	LUNAS
2	TOLINGGULA PANTAI	8.378.026	8.378.026	0	8.378.026	100,00	0	0	LUNAS
3	MOLANGGA	5.741.580	5.741.580	0	5.741.580	100,00	0	0	LUNAS
4	ILOMANGGA	1.853.625	1.853.625	0	1.853.625	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		23.720.686	23.720.686	0	23.720.686	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		52.172.703	52.172.703	0	52.172.703	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN BIAU KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER2017**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	DIDINGGA	3.420.502	3.420.502	0	3.420.502	100,00	0	LUNAS	
2	SEMBIHINGAN	2.466.468	2.466.468	0	2.466.468	100,00	0	LUNAS	
3	POTANGA	7.027.235	7.027.235	0	7.027.235	100,00	0	LUNAS	
4	BOHULO	4.582.364	4.582.364	0	4.582.364	100,00	0	LUNAS	
5	WINDU	3.195.464	3.195.464	0	3.195.464	100,00	0	LUNAS	
6	TOPI	2.250.654	2.250.654	0	2.250.654	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		22.982.729	22.982.729	0	22.982.729	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	BUALO	3.335.895	3.335.895	0	3.335.895	100,00	0	LUNAS	
2	BIAU	5.385.194	5.385.194	0	5.385.194	100,00	0	LUNAS	
3	OMUTO	5.730.167	5.730.167	0	5.730.167	100,00	0	LUNAS	
4	LUHUTO	2.821.656	2.821.656	0	2.821.656	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		17.272.917	17.272.917	0	17.272.917	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		40.255.646	40.255.646	0	40.255.646	100,00	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2017**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET	
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
A. SEKTOR PERDESAAN										
	-	0	0	0	0	0	0,00	0	-	
JUMLAH A		0	0	0	0	0	0,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN										
1	PONTOLO	10.346.318	10.346.318	0	0	10.346.318	100,00	0	LUNAS	
2	MOLINGKAPOTO	10.996.952	10.996.952	0	0	10.996.952	100,00	0	LUNAS	
3	MOOTINELO	11.974.038	11.974.038	0	0	11.974.038	100,00	0	LUNAS	
4	LEBOTO	14.915.045	9.622.785	5.292.260	0	14.915.045	100,00	0	LUNAS	
5	BUALEMO	10.824.122	10.824.122	0	0	10.824.122	100,00	0	LUNAS	
6	POSSO	9.566.668	9.566.668	0	0	9.566.668	100,00	0	LUNAS	
7	BULALO	23.671.826	23.671.826	0	0	23.671.826	100,00	0	LUNAS	
8	TITIDU	16.161.126	9.239.049	6.922.077	0	16.161.126	100,00	0	LUNAS	
9	MOLUO	15.096.549	13.761.547	1.335.002	0	15.096.549	100,00	0	LUNAS	
10	OMBULODATA	8.844.666	8.300.881	0	0	8.300.881	93,85	543.785	-	
11	PONTOLO ATAS	6.283.739	6.283.739	0	0	6.283.739	100,00	0	LUNAS	
12	BOTUWOMBATO	3.867.601	3.867.601	0	0	3.867.601	100,00	0	LUNAS	
13	MOLINGKAPOTO SELATAN	11.495.680	11.495.680	0	0	11.495.680	100,00	0	LUNAS	
14	BOTUNGOBUNGO	10.506.406	10.506.406	0	0	10.506.406	100,00	0	LUNAS	
15	ALATA KARYA	8.926.668	8.926.668	0	0	8.926.668	100,00	0	LUNAS	
16	MASURU	3.182.081	3.182.081	0	0	3.182.081	100,00	0	LUNAS	
17	CISADANE	13.249.996	13.249.996	0	0	13.249.996	100,00	0	LUNAS	
18	KATIALADA	11.958.456	11.958.456	0	0	11.958.456	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		201.867.937	187.774.813	13.549.339	0	201.324.152	99,73	543.785	-	
JUMLAH TOTAL (A + B)		201.867.937	187.774.813	13.549.339	0	201.324.152	99,73	543.785	-	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOMILITO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2017**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TANJUNG KARANG	11.550.071	9.593.676	0	9.593.676	83,06	1.956.395	-	
2	MUTIARA LAUT	2.077.400	2.077.400	0	2.077.400	100,00	0	LUNAS	
3	MOLANTADU	8.174.531	7.678.275	496.256	8.174.531	100,00	0	LUNAS	
4	HUIDU MELITO	10.125.749	4.593.120	5.532.629	10.125.749	100,00	0	LUNAS	
5	BULANGO RAYA	4.771.542	4.771.542	0	4.771.542	100,00	0	LUNAS	
6	LEYAO	1.887.463	1.887.463	0	1.887.463	100,00	0	LUNAS	
7	BUBODE	5.930.737	5.930.737	0	5.930.737	100,00	0	LUNAS	
8	MILANGO	3.408.301	3.408.301	0	3.408.301	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		47.925.794	39.940.514	6.028.885	45.969.399	95,92	1.956.395	-	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	DAMBALO	8.775.106	7.204.931	1.570.175	8.775.106	100,00	0	LUNAS	
2	JEMBATAN MERAH	4.556.820	3.804.320	752.500	4.556.820	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		13.331.926	11.009.251	2.322.675	13.331.926	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		61.257.720	50.949.765	8.351.560	59.301.325	96,81	1.956.395	-	

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2017

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	MALAMBE	3.525.672	3.525.672	0	3.525.672	100,00	0	LUNAS	
2	OTIOLA	3.629.513	3.629.513	0	3.629.513	100,00	0	LUNAS	
3	TIHENO	4.707.487	4.707.487	0	4.707.487	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		11.862.672	11.862.672	0	11.862.672	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	PONELO	3.344.914	3.344.914	0	3.344.914	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		3.344.914	3.344.914	0	3.344.914	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		15.207.586	15.207.586	0	15.207.586	100,00	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ANGGREK KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2017**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TOLANGO	11.758.037	9.504.903	2.253.134	11.758.037	100,00	0	LUNAS	
2	POPALO	10.000.602	4.023.828	5.976.774	10.000.602	100,00	0	LUNAS	
3	TOLONGIO	10.469.246	1.038.696	9.430.547	10.469.246	100,00	0	LUNAS	
4	DUDEPO	6.357.707	6.357.707	0	6.357.707	100,00	0	LUNAS	
5	MOTILANGO	5.533.712	944.096	4.589.616	5.533.712	100,00	0	LUNAS	
6	ILOHELUMA	8.609.424	4.502.877	4.106.547	8.609.424	100,00	0	LUNAS	
7	HIYALO OYILE	2.685.962	2.685.962	0	2.685.962	100,00	0	LUNAS	
8	PUTIANA	11.594.232	6.171.614	5.422.618	11.594.232	100,00	0	LUNAS	
9	TUTUWOTO	3.288.435	3.288.435	0	3.288.435	100,00	0	LUNAS	
10	LANGGE	2.385.297	2.385.297	0	2.385.297	100,00	0	LUNAS	
11	ILODULUNGA	2.373.777	1.086.745	1.287.032	2.373.777	100,00	0	LUNAS	
12	HELUMO	3.819.188	3.819.188	0	3.819.188	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		78.875.619	45.809.351	33.066.268	78.875.619	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	ILANGATA	44.041.225	44.041.225	0	44.041.225	100,00	0	LUNAS	
2	IBARAT	12.296.941	2.955.986	9.340.953	12.296.941	100,00	0	LUNAS	
3	DATAHU	1.780.685	1.780.685	0	1.780.685	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		58.118.851	48.777.898	9.340.953	58.118.851	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		136.994.470	94.587.249	42.407.221	136.994.470	100,00	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN MONANO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2017**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	GARAPIA	2.871.487	2.871.487	0	2.871.487	100,00	0	0	LUNAS
2	JURIATI	4.034.486	4.034.486	0	4.034.486	100,00	0	0	LUNAS
3	MONAS	7.545.446	4.658.799	2.886.647	7.545.446	100,00	0	0	LUNAS
4	SOGU	6.281.036	6.281.036	0	6.281.036	100,00	0	0	LUNAS
5	DUNU	3.872.032	3.872.032	0	3.872.032	100,00	0	0	LUNAS
5	TOLITEHUYU	2.624.358	2.624.358	0	2.624.358	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		27.228.845	24.342.198	2.886.647	27.228.845	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	TUDI	5.414.468	5.414.468	0	5.414.468	100,00	0	0	LUNAS
2	MONANO	7.727.916	7.727.916	0	7.727.916	100,00	0	0	LUNAS
3	MOKONOWU	4.532.578	4.532.578	0	4.532.578	100,00	0	0	LUNAS
4	PILOHULATA	3.440.023	3.440.023	0	3.440.023	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		21.114.985	21.114.985	0	21.114.985	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		48.343.830	45.457.183	2.886.647	48.343.830	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ATINGGOLA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2017**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	IMANA	12.122.978	12.122.978	0	12.122.978	100,00	0	0	LUNAS
2	ILOMATA	5.723.667	5.723.667	0	5.723.667	100,00	0	0	LUNAS
3	BINTANA	4.502.135	1.992.342	2.509.793	4.502.135	100,00	0	0	LUNAS
4	MONGGUPO	8.328.760	8.260.175	68.585	8.328.760	100,00	0	0	LUNAS
5	PINONTYONGA	7.034.644	7.034.644	0	7.034.644	100,00	0	0	LUNAS
6	BUATA	1.939.000	975.000	964.000	1.939.000	100,00	0	0	LUNAS
7	WAPALO	3.925.000	3.925.000	0	3.925.000	100,00	0	0	LUNAS
8	ILOHELUMA	3.308.218	3.308.218	0	3.308.218	100,00	0	0	LUNAS
9	SIGASO	5.119.771	2.371.300	2.748.471	5.119.771	100,00	0	0	LUNAS
10	POSONO	2.909.259	2.909.259	0	2.909.259	100,00	0	0	LUNAS
11	TOMBULILATO	6.381.281	6.381.281	0	6.381.281	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		61.294.713	55.003.864	6.290.849	61.294.713	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	KOTAJIN	4.946.822	4.946.822	0	4.946.822	100,00	0	0	LUNAS
2	OLUHUTA	2.328.157	2.328.157	0	2.328.157	100,00	0	0	LUNAS
3	KOTAJIN UTARA	7.543.145	7.543.145	0	7.543.145	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		14.818.124	14.818.124	0	14.818.124	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		76.112.837	69.821.988	6.290.849	76.112.837	100,00	0	0	LUNAS

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN GENTUMA RAYA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2017

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	MOLONGGOTA	9 643 735	9 643 735	0	9 643 735	100,00	0	LUNAS	
2	DUMOLODO	5 770 073	5 770 073	0	5 770 073	100,00	0	LUNAS	
3	LANGKE	7 328 000	7 328 000	0	7 328 000	100,00	0	LUNAS	
4	IPILO	5 825 963	5 825 963	0	5 825 963	100,00	0	LUNAS	
5	MOTOMINGO	4 359 657	4 359 657	0	4 359 657	100,00	0	LUNAS	
6	NANATI JAYA	3 893 488	3 893 488	0	3 893 488	100,00	0	LUNAS	
7	DURIAN	3 389 340	3 389 340	0	3 389 340	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		40.210.256	40.210.256	0	40.210.256	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	GENTUMA	7 113 062	7 113 062	0	7 113 062	100,00	0	LUNAS	
2	KETAPANG	3 365 294	3 365 294	0	3 365 294	100,00	0	LUNAS	
3	PASALAE	4 571 440	4 571 440	0	4 571 440	100,00	0	LUNAS	
4	BOHUSAMI	3 769 112	3 769 112	0	3 769 112	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		18.818.908	18.818.908	0	18.818.908	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		59.029.164	59.029.164	0	59.029.164	100,00	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2018**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG		KET
		(Rp)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(Rp)		
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	BULOILA	6.274.471	6.274.471	0	6.274.471	100,00	0	0	LUNAS
2	KIKIA	4.101.355	4.101.355	0	4.101.355	100,00	0	0	LUNAS
3	KASIA	7.099.337	7.099.337	0	7.099.337	100,00	0	0	LUNAS
4	TUMBA	6.656.979	6.656.979	0	6.656.979	100,00	0	0	LUNAS
5	LELATO	3.912.778	3.912.778	0	3.912.778	100,00	0	0	LUNAS
6	PUNCAK MANDIRI	9.825.372	9.825.372	0	9.825.372	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		37.870.292	37.870.292	0	37.870.292	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	BULONTIO BARAT	6.623.282	6.623.282	0	6.623.282	100,00	0	0	LUNAS
2	BULONTIO TIMUR	10.280.415	10.280.415	0	10.280.415	100,00	0	0	LUNAS
3	MEBONGO	5.134.677	5.134.677	0	5.134.677	100,00	0	0	LUNAS
4	PULAHENTI	3.185.000	3.185.000	0	3.185.000	100,00	0	0	LUNAS
5	HUTOKALO	3.495.060	3.495.060	0	3.495.060	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		28.718.434	28.718.434	0	28.718.434	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		66.588.726	66.588.726	0	66.588.726	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN SUMALATA TIMUR KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2018**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	DEME I	3.483.502	3.483.502	0	3.483.502	100,00	0	LUNAS	
2	KOLUWOKA	2.760.245	2.760.245	0	2.760.245	100,00	0	LUNAS	
3	BULUWATU	1.948.425	1.948.425	0	1.948.425	100,00	0	LUNAS	
4	DULUKAPA	3.163.546	3.163.546	0	3.163.546	100,00	0	LUNAS	
5	MOTIHELUMO	3.926.483	3.926.483	0	3.926.483	100,00	0	LUNAS	
5	BUBALANGO	3.112.140	3.112.140	0	3.112.140	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		18.394.341	18.394.341	0	18.394.341	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	DEME II	5.190.152	5.190.152	0	5.190.152	100,00	0	LUNAS	
2	BULADU	3.295.152	3.295.152	0	3.295.152	100,00	0	LUNAS	
3	HULAWA	2.531.578	2.531.578	0	2.531.578	100,00	0	LUNAS	
4	WUBUDU	3.615.196	3.615.196	0	3.615.196	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		14.632.078	14.632.078	0	14.632.078	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		33.026.419	33.026.419	0	33.026.419	100,00	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOLINGGULA KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2018**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	LIMBATO	2.668.600	2.668.600	0	2.668.600	100,00	0	0	LUNAS
2	PAPUALANGI	7.778.788	7.778.788	0	7.778.788	100,00	0	0	LUNAS
3	TOLINGGULA ULU	4.856.798	4.856.798	0	4.856.798	100,00	0	0	LUNAS
4	TOLITE JAYA	3.836.323	3.836.323	0	3.836.323	100,00	0	0	LUNAS
5	ILOTUNGULA	7.694.912	5.768.912	1.926.000	7.694.912	100,00	0	0	LUNAS
6	CEMPAKA PUTIH	1.501.000	1.501.000	0	1.501.000	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		28.436.421	28.510.421	1.926.000	28.436.421	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	TOLINGGULA TENGAH	7.739.700	7.739.700	0	7.739.700	100,00	0	0	LUNAS
2	TOLINGGULA PANTAI	8.377.998	8.377.998	0	8.377.998	100,00	0	0	LUNAS
3	MOLANGGA	5.738.160	5.738.160	0	5.738.160	100,00	0	0	LUNAS
4	ILOMANGGA	1.553.525	1.553.525	0	1.553.525	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		23.709.481	23.709.481	0	23.709.481	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		52.145.902	50.219.902	1.926.000	52.145.902	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN BIAU KAB. GORONTALOUTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER2018**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG		KET
		(Rp)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(Rp)		
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	DIDINGGA	3.420.502	3.420.502	0	3.420.502	100,00	0	LUNAS	
2	SEMBIHINGAN	2.466.468	2.466.468	0	2.466.468	100,00	0	LUNAS	
3	POTANGA	7.027.235	7.027.235	0	7.027.235	100,00	0	LUNAS	
4	BOHULO	4.582.366	3.845.585	736.781	4.582.366	100,00	0	LUNAS	
5	WINDU	3.192.839	3.192.839	0	3.192.839	100,00	0	LUNAS	
6	TOPI	2.286.049	2.286.049	0	2.286.049	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		22.975.459	22.238.678	736.781	22.975.459	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	BUALO	3.335.895	3.335.895	0	3.335.895	100,00	0	LUNAS	
2	BIAU	5.385.199	2.049.600	3.335.599	5.385.199	100,00	0	LUNAS	
3	OMUTO	5.726.767	5.726.767	0	5.726.767	100,00	0	LUNAS	
4	LUHUTO	2.821.656	2.821.656	0	2.821.656	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		17.269.517	13.933.918	3.335.599	17.269.517	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		40.244.976	36.172.596	4.072.380	40.244.976	100,00	0	LUNAS	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2018**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
	-	0	0	0	0	0,00	0	0	-
JUMLAH A		0	0	0	0	0,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	PONTOLO	10.488.269	10.488.269	0	10.488.269	100,00	0	0	LUNAS
2	MOLINGKAPOTO	10.972.496	7.544.379	3.428.117	0	10.972.496	100,00	0	LUNAS
3	MOOTINELO	11.638.651	11.638.651	0	0	11.638.651	100,00	0	LUNAS
4	LEBOTO	14.919.508	3.672.112	11.247.396	0	14.919.508	100,00	0	LUNAS
5	BUALEMO	10.800.884	10.800.884	0	0	10.800.884	100,00	0	LUNAS
6	POSSO	9.562.928	9.562.928	0	0	9.562.928	100,00	0	LUNAS
7	BULALO	23.638.587	14.702.550	8.936.037	0	23.638.587	100,00	0	LUNAS
8	TITIDU	16.058.044	16.058.044	0	0	16.058.044	100,00	0	LUNAS
9	MOLUO	14.937.064	12.196.699	2.309.171	0	14.937.064	100,00	0	LUNAS
10	OMBULODATA	8.844.666	7.982.776	861.890	0	8.844.666	100,00	0	LUNAS
11	PONTOLO ATAS	6.277.775	6.277.775	0	0	6.277.775	100,00	0	-
12	BOTUWOMBATO	3.867.601	999.797	2.867.804	0	3.867.601	100,00	0	LUNAS
13	MOLINGKAPOTO SELATAN	11.459.887	11.459.887	0	0	11.459.887	100,00	0	LUNAS
14	BOTUNGOBUNGO	10.486.621	10.486.621	0	0	10.486.621	100,00	0	LUNAS
15	ALATA KARYA	8.883.340	8.883.340	0	0	8.883.340	100,00	0	LUNAS
16	MASURU	3.177.981	3.177.981	0	0	3.177.981	100,00	0	LUNAS
17	CISADANE	13.221.538	13.221.538	0	0	13.221.538	100,00	0	LUNAS
18	KATIALADA	11.905.206	11.905.206	0	0	11.905.206	100,00	0	LUNAS
JUMLAH B		201.141.046	171.059.437	29.650.415	0	200.709.852	99,79	431.194	-
JUMLAH TOTAL (A + B)		201.141.046	171.059.437	29.650.415	0	200.709.852	99,79	431.194	-

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN TOMILITO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2018**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TANJUNG KARANG	14.240.048	12.249.217	0	12.249.217	86,02	1.990.829	-	
2	MUTIARA LAUT	2.077.400	2.077.400	0	2.077.400	100,00	0	LUNAS	
3	MOLANTADU	8.174.531	8.174.531	0	8.174.531	100,00	0	LUNAS	
4	HUIDU MELITO	10.118.069	5.678.648	4.439.421	10.118.069	100,00	0	LUNAS	
5	BULANGO RAYA	4.767.582	1.848.056	2.919.526	4.767.582	100,00	0	LUNAS	
6	LEYAO	1.887.463	0	1.887.463	1.887.463	100,00	0	LUNAS	
7	BUBODE	5.930.737	5.930.737	0	5.930.737	100,00	0	LUNAS	
8	MILANGO	3.408.301	3.408.301	0	3.408.301	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		50.604.129	39.366.890	9.246.410	48.613.300	96,07	1.990.829	-	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	DAMBALO	8.775.106	8.775.106	0	8.775.106	100,00	0	LUNAS	
2	JEMBATAN MERAH	4.549.230	434.575	4.114.655	4.549.230	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		13.324.336	9.209.681	4.114.655	13.324.336	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		63.928.465	48.576.571	13.361.065	61.937.636	96,89	1.990.829	-	

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2018

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI				
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	MALAMBE	3.492.491	3.492.491	0	3.492.491	100,00	0	0	LUNAS
2	OTIOLA	3.627.588	3.627.588	0	3.627.588	100,00	0	0	LUNAS
3	TIHENGGO	4.705.296	4.705.296	0	4.705.296	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		11.825.375	11.825.375	0	11.825.375	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	PONELO	3.319.012	3.319.012	0	3.319.012	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		3.319.012	3.319.012	0	3.319.012	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		15.144.387	15.144.387	0	15.144.387	100,00	0	0	LUNAS

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ANGGREK KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2018

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG		KET
		(Rp)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		(Rp)		
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	TOLANGO	11.753.802	11.753.802	0	11.753.802	100,00	0	LUNAS	
2	POPALO	10.980.001	7.839.334	0	7.839.334	71,40	3.140.667	-	
3	TOLONGIO	10.450.790	4.002.366	3.206.012	7.208.378	68,97	3.242.412	-	
4	DUDEPO	6.350.259	6.350.259	0	6.350.259	100,00	0	LUNAS	
5	MOTILANGO	5.533.712	0	3.637.017	3.637.017	65,72	1.896.695	-	
6	ILOHELUMA	8.609.424	2.003.414	6.606.010	8.609.424	100,00	0	LUNAS	
7	HIYALO OYILE	2.685.962	2.685.962	0	2.685.962	100,00	0	LUNAS	
8	PUTIANA	11.772.585	11.772.585	0	11.772.585	100,00	0	LUNAS	
9	TUTUWOTO	3.325.497	1.591.353	1.734.144	3.325.497	100,00	0	LUNAS	
10	LANGGE	2.385.297	0	2.385.297	2.385.297	100,00	0	LUNAS	
11	ILODULUNGA	2.369.269	0	2.369.269	2.369.269	100,00	0	LUNAS	
12	HELUMO	3.834.815	3.834.815	0	3.834.815	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		80.051.413	51.833.890	19.937.749	71.771.639	89,66	8.279.774	-	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	ILANGATA	42.486.754	31.378.821	11.107.933	42.486.754	100,00	0	LUNAS	
2	IBARAT	12.341.766	8.261.461	4.080.305	12.341.766	100,00	0	LUNAS	
3	DATAHU	1.780.685	1.780.685	0	1.780.685	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		56.609.205	41.420.967	15.188.238	56.609.205	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		136.660.618	93.254.857	35.125.987	128.380.844	93,94	8.279.774	-	

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN MONANO KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2018**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	GARAPIA	2.871.487	2.871.487	0	2.871.487	100,00	0	LUNAS	
2	JURIATI	4.034.486	4.034.486	0	4.034.486	100,00	0	LUNAS	
3	MONAS	7.535.718	7.535.718	0	7.535.718	100,00	0	LUNAS	
4	SOGU	6.281.036	6.281.036	0	6.281.036	100,00	0	LUNAS	
5	DUNU	3.869.575	3.869.575	0	3.869.575	100,00	0	LUNAS	
6	TOLITEHUYU	2.624.358	2.624.358	0	2.624.358	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH A		27.216.660	27.216.660	0	27.216.660	100,00	0	LUNAS	
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	TUDI	5.414.468	5.414.468	0	5.414.468	100,00	0	LUNAS	
2	MONANO	8.854.236	8.854.236	0	8.854.236	100,00	0	LUNAS	
3	MOKONOWU	4.532.578	4.532.578	0	4.532.578	100,00	0	LUNAS	
4	PILOHULATA	3.440.023	3.440.023	0	3.440.023	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH B		22.241.305	22.241.305	0	22.241.305	100,00	0	LUNAS	
JUMLAH TOTAL (A + B)		49.457.965	49.457.965	0	49.457.965	100,00	0	LUNAS	

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN ATINGGOLA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2018

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	IMANA	12.119.906	7.375.117	4.744.789	12.119.906	100,00	0	0	LUNAS
2	ILOMATA	5.723.667	5.723.667	0	5.723.667	100,00	0	0	LUNAS
3	BINTANA	4.502.135	4.502.135	0	4.502.135	100,00	0	0	LUNAS
4	MONGGUPO	8.323.480	3.088.319	5.235.161	8.323.480	100,00	0	0	LUNAS
5	PINONTYONGA	7.034.644	7.034.644	0	7.034.644	100,00	0	0	LUNAS
6	BUATA	1.939.000	1.939.000	0	1.939.000	100,00	0	0	LUNAS
7	WAPALO	3.925.000	1.555.000	2.370.000	3.925.000	100,00	0	0	LUNAS
8	ILOHELUMA	3.308.218	3.308.218	0	3.308.218	100,00	0	0	LUNAS
9	SIGASO	5.119.771	5.119.771	0	5.119.771	100,00	0	0	LUNAS
10	POSONO	2.909.259	2.909.259	0	2.909.259	100,00	0	0	LUNAS
11	TOMBULILATO	6.381.281	6.381.281	0	6.381.281	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		61.286.361	48.936.411	12.349.950	61.286.361	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	KOTAJIN	4.938.614	4.938.614	0	4.938.614	100,00	0	0	LUNAS
2	OLUHUTA	2.328.157	2.328.157	0	2.328.157	100,00	0	0	LUNAS
3	KOTAJIN UTARA	7.543.145	7.543.145	0	7.543.145	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		14.809.916	14.809.916	0	14.809.916	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		76.096.277	63.746.327	12.349.950	76.096.277	100,00	0	0	LUNAS

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KECAMATAN GENTUMA RAYA KAB. GORONTALO UTARA
BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2018**

NO	DESA	POTENSI / PENETAPAN (Rp)	REALISASI PENERIMAAN			%	SISA POTENSI / KURANG (Rp)		KET
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
A. SEKTOR PERDESAAN									
1	MOLONGGOTA	9 632 350	9 632 350	0	9 632 350	100,00	0	0	LUNAS
2	DUMOLODO	5 770 073	5 770 073	0	5 770 073	100,00	0	0	LUNAS
3	LANGKE	7 328 000	7 328 000	0	7 328 000	100,00	0	0	LUNAS
4	IPILO	5 825 963	5 825 963	0	5 825 963	100,00	0	0	LUNAS
5	MOTOMINGO	4 359 057	4 359 057	0	4 359 057	100,00	0	0	LUNAS
6	NANATI JAYA	3 893 488	3 893 488	0	3 893 488	100,00	0	0	LUNAS
7	DURIAN	3 389 340	3 389 340	0	3 389 340	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH A		40.198.271	40.198.271	0	40.198.271	100,00	0	0	LUNAS
B. SEKTOR PERKOTAAN									
1	GENTUMA	7 079 108	7 079 108	0	7 079 108	100,00	0	0	LUNAS
2	KETAPANG	3 347 681	3 347 681	0	3 347 681	100,00	0	0	LUNAS
3	PASALAE	4 557 200	4 557 200	0	4 557 200	100,00	0	0	LUNAS
4	BOHUSAMI	3 769 112	3 769 112	0	3 769 112	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH B		18.753.099	18.753.099	0	18.753.099	100,00	0	0	LUNAS
JUMLAH TOTAL (A + B)		58.951.370	58.951.370	0	58.951.370	100,00	0	0	LUNAS

KWARDANG, 29 JUNI 2020
KABUPATEN KERALA-BADAN KEUANGAN

[Signature]
HUSNI HALIDI, S.E.M.S.
NIP. 19630912199303 1009

BADAN KEUANGAN
GORONTALO

Skripsi_ALFISHARI_E.11.16.125_ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

ORIGINALITY REPORT

37%	34%	13%	23%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	anzdoc.com Internet Source	3%
2	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	3%
3	repository.widyatama.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
6	ejournal.unp.ac.id Internet Source	2%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	www.suganda.co.id Internet Source	1%

9	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
10	media.neliti.com Internet Source	1%
11	Submitted to General Sir John Kotelawala Defence University Student Paper	1%
12	syafrianto.blogspot.com Internet Source	1%
13	Vernando Viki Tambingon, Hendrik Manossoh, Novi S. Budiarto. "ANALISIS STRATEGI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SERTA EFEKTIVITAS PENERIMAANNYA DI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2016-2017", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2019 Publication	1%
14	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
15	ejournal.unisnu.ac.id Internet Source	1%
16	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%

17	core.ac.uk Internet Source	1%
18	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
19	www.bovendigoelkab.go.id Internet Source	1%
20	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%
21	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
22	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
23	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
24	www.feuj.xyz Internet Source	1%
25	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
26	repository.uma.ac.id Internet Source	<1%
27	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
28	es.scribd.com Internet Source	

		<1 %
29	id.123dok.com Internet Source	<1 %
30	elib.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
31	pustaka.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
32	andhikagunawan.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	www.slideserve.com Internet Source	<1 %
34	Jessica Lianita Agnelleide Loong, Treesje Runtu, Meily Y. B. Kalalo. "ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	<1 %
35	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
36	Cherry Agustine Chandra, Harijanto Sabijono, Treesje Runtu. "EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI	<1 %

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI KOTA GORONTALO TAHUN 2016-
2018", GOING CONCERN : JURNAL RISET
AKUNTANSI, 2020

Publication

37	www.library.usd.ac.id Internet Source	<1 %
38	salamadian.com Internet Source	<1 %
39	upi-yptk.ac.id Internet Source	<1 %
40	dclassmanagement.blogspot.com Internet Source	<1 %
41	sitimuzdalifah2316.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	sosbudpolhuk.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	tombulilato.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
45	eprints.umsida.ac.id	

	Internet Source	<1 %
46	padyangantaxcenter.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
48	arifinrosid.com Internet Source	<1 %
49	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
50	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
51	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
52	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
53	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
54	Surendro Nurbawono. "KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	<1 %

55	andersonefraim.blogspot.com Internet Source	<1 %
56	Keren Kezia Rejoice Adlin Mamangkey, Hendrik Manossoh, Heince Rudy Nicky Wokas. "Analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2014-2018", Indonesia Accounting Journal, 2020 Publication	<1 %
57	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %
58	Submitted to Universiti Teknologi Malaysia Student Paper	<1 %
59	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
60	marthinvic.blogspot.com Internet Source	<1 %
61	Submitted to James Monroe High School Student Paper	<1 %
62	www.yahukimokab.go.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words